



TUGAS AKHIR - RP09 133

**ARAHAN PENATAAN KEGIATAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN GELORA
SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**

**SEPTIAN EKO WIBISONO
NRP 3610 100 023**

**Dosen Pembimbing :
Adjie Pamungkas ST. M.Dev.Plg., Ph.D**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2014**



FINAL PROJECT - RP09 133

THE ARRANGEMENT OF STREET VENDORS ACTIVITY IN GELORA SEPULUH NOPEMBER AREA

**SEPTIAN EKO WIBISONO
NRP 3610 100 023**

**Advisor
Adjie Pamungkas ST. M.Dev.Plg., Ph.D**

**DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
Faculty of Civil Engineering and Planning
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

ARAHAN PENATAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN GELORA SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Oleh :

**SEPTIAN EKO WIBISONO
NRP. 3610 100 023**

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

Adjie Pamungkas, ST., M.Dev.Plg., Ph.D
NIP. 197811022002121002

SURABAYA, JULI 2014



Arahan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Nama Mahasiswa : Septian Eko Wibisono
NRP : 3610100023
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota FTSP
Dosen Pembimbing : Adjie Pamugkas ST. M. Dev. Plg., Ph.D

Abstrak

Belum adanya pengaturan kebijakan PKL yang jelas menyebabkan melubernya PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember sampai ke badan jalan. Belum lagi dengan dibangunnya Taman Mundhu yang menarik banyak Pedagang untuk berjualan disekitaran taman. PKL yang tidak tertata akan merusak estetika kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Hal inilah yang mendorong dirumuskannya arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Terdapat tiga metode analisis yang digunakan dalam studi ini, yaitu analisis Statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik PKL, kemudian analisis Delphi untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk merumuskan arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Hasil yang didapatkan dari penelitian berupa pengelompokan arahan berdasarkan aspek pembinaan, aspek lingkungan, aspek manajemen lahan, aspek kebijakan serta aspek ekonomi. Berdasarkan arahan dengan mengkombinasikan peraturan yang ada maka akan didapatkan lokasi-lokasi yang diperbolehkan pedagang melakukan kegiatan

Kata kunci : PKL, penataan kegiatan, dan alokasi ruang

“ Halaman ini sengaja dikosongkan”

ABSTRACT

THE ARRANGEMENT OF STREET VENDORS ACTIVITY IN GELORA SEPULUH NOPEMBER AREA

Name : Septian Eko Wibisono
ID Number : 3610100023
Department : Urban and Regional Planning
Advisor : Adjie Pamugkas ST. M. Dev. Plg., Ph.D

The absence of clear policy of street vendors setting causes its overflow on roads of Gelora Sepuluh Nopember Surabaya Region.. Yet again the built of mundhu park that attracts many traders to sell around the park. Street vendors which is not organized can ruin the aesthetics of Gelora Sepuluh Nopember area. This has encouraged the formulation of street vendors layout directivities in Gelora Sepuluh Nopember Streets.

There are three methods of analysis used in this study, it is the descriptive statistics analysis to determine the characteristics of street vendors, then delphi analysis to analyze factors that influence the arrangement of street vendors, and finally qualitative descriptive analysis to formulate the direction of arrangement of street vendors in Gelora Sepuluh Nopember

Result obtained from the research is a grouping directivities based on coaching aspect, the environmental aspect, the aspect of land management, policy aspect, and economic aspect. Based on combining existing rules and directivities, the result obtained is a location that allowed street vendors activities

Key words: *street vendors, structuring activities, and space allocation*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "*Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember*". Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan tugas akhir ini tak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua yang telah mencurahkan restu dan doanya yang tak pernah surut, memberikan support dan semangat.
2. Bapak Adjie Pamungkas ST. M.Dev.Plg., Ph.D selaku pembimbing tugas akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, nasehat dan semangat.
3. Bapak Ir. Sardjito, MT dan selaku dosen penguji tugas akhir yang telah banyak memberikan saran dan masukan.
4. Bapak Putu Gde Ariastita ST. MT selaku ketua jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS.
5. Ibu Ketut Dewi Martha Erli ST. MT selaku dosen koordinator tugas akhir yang telah banyak melakukan upaya dalam terlaksananya mata kuliah tugas akhir.
6. Bapak Ardy Maulidy Navastara ST. MT selaku dosen wali dan dosen penguji yang telah banyak memberi semangat dan masukan dalam perkuliahan sampai pengerjaan tugas akhir.
7. Seluruh dosen dan karyawan di PWK yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas bimbingan dan bantuan selama kuliah.
8. Seluruh responden yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih atas kesedian waktu dan masukan untuk pengerjaan tugas akhir.
9. Krismadhita Cytonia Rohananda a.k.a kancil yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.

10. Kepada teman-teman yang telah bersama-sama, berjuang untuk mendapatkan tempat dalam mengerjakan tugas akhir, kontrakan Medi, Adhe, Topik, Niko, Pras, Hendri, Udin, Dayat, Menk, Maulana, Una Dika, Dhani “Non”, Guntur yang membantu menemani pengerjaan tugas akhir.
11. Saudara seperjuangan PWK-ITS, khususnya PLAX 2010 yang rela berbagi ilmu, motivasi, persaudaraan dan solidaritasnya.

Penulis menyadari bahwa, tugas akhir ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan, kritik, saran sangat diharapkan penulis. Semoga hasil penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 26 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4 Ruang Lingkup	5
1.4.1 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	6
1.4.3 Ruang Lingkup Substansi	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat Teoritik	6
1.5.2 Manfaat Praktis	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
1.7 Kerangka Berpikir	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Sektor Informal.....	11
2.1.2 PKL Sebagai Sektor Informal	12
2.2 Karakteristik PKL.....	13
2.3 Prinsip Pemilihan Lokasi Kegiatan Perdagangan.....	19
2.4 Konflik Sosial.....	22
2.4.1 Ciri-Ciri Konflik	22
2.4.2 Sumber-Sumber Konflik.....	24
2.5 Modal Sosial	25
2.5.1 Interaksi Sosial.....	28
2.5.2 Partisipasi Masyarakat	30
2.6 Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya PKL	33
2.7 Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	35

2.7.1 Kewajiban dan Kewenangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	37
2.8 Penelitian Sebelumnya Mengenai Upaya Penataan PKL	38
2.9 Sintesa Tinjauan Teori.....	42
2.9.1 Indikator dan Variabel Karakteristik PKL.....	42
2.9.2 Indikator dan Variabel Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan PKL	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Jenis Penelitian	47
3.3 Variabel Penelitian	47
3.4 Populasi dan Sampel	54
3.5 Metode Pengumpulan Data	56
3.6 Teknis Analisis Data.....	58
3.6.1 Identifikasi Karakteristik PKL sekitar Gelora Sepuluh Nopember	59
3.6.2 Menganalisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penataan PKL di sekitar Gelora Sepuluh Nopember	59
3.6.3 Merumuskan Arahana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember	61
3.7 Tahapan penelitian.....	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi	67
4.1.1 Kondisi Eksisting Kelurahan Tambaksari	67
4.1.2 Gambaran Umum PKL di Wilayah Studi.....	68
4.2 Karakteristik Aspek Fisik PKL di Kawasan Penelitian.....	69
4.2.1 Karakteristik Aspek Kegiatan PKL di Kawasan Penelitian	79
4.2.2 Karakteristik Aspek Psikologis PKL di Kawasan Penelitian	83
4.3 Pembahasan Mengenai Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora sepuluh Nopember	86
4.3.1 Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya.....	90

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penataan PKL	105
4.5 Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora sepuluh Nopember	114
4.5.1 Arahan Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember dengan Menggunakan Analisa Deskriptif Kualitatif.....	118

BAB V PENUTUP	183
5.1 Kesimpulan.....	183
5.2 Saran Penelitian	187

DAFTAR PUSTAKA	189
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Teori Karakteristik PKL	17
Tabel 2.2 Aspek dan Indikator	18
Tabel 2.2 Ekonomi Lahan	23
Tabel 2.4 Manajemen Konflik.....	25
Tabel 2.5 Modal Sosial	32
Tabel 2.6 Penataan Ruang	36
Tabel 2.7 Rangkuman Hasil Penelitian Studi Kasus	39
Tabel 2.8 Sintesa Variabel Karakteristik PKL	42
Tabel 2.9 Penentuan Variabel	43
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	48
Tabel 3.2 Variabel dan Definisi Operasional dalam Menentukan Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan PKL....	51
Tabel 3.3 Pemetaan Stakeholder	55
Tabel 3.4 Data dari Perolehan Data Sekunder.....	58
Tabel 3.5 Desain Penelitian	64
Tabel 4.1 Responden Analisa Delphi	90
Tabel 4.2 Hasil Eksplorasi Delphi.....	91
Tabel 4.3 Variabel Temuan Baru	99
Tabel 4.4 Hasil Analisis Delphi Tahap II.....	100
Tabel 4.5 Hasil Analisis Delphi Tahap III.....	104
Tabel 4.6 Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember	113
Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember.....	147
Tabel 4.8 Arahan Penataan Zonasi PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember.....	177
Tabel 5.1 Rumusan Arahan Penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember Surabaya.....	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	9
Gambar 3.1 Tahapan Analisa Delphi	61
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Tambaksari Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Gambar 4.2 Diagram Jenis Barang Dagangan.....	70
Gambar 4.3 Diagram Tingkat Pendapatan	71
Gambar 4.4 Diagram Modal Usaha.....	72
Gambar 4.5 Diagram Sarana Yang Digunakan	73
Gambar 4.6 Diagram Tingkat Keterampilan	74
Gambar 4.7 Diagram Tingkat Pendidikan	75
Gambar 4.8 Diagram Sumber Tenaga Kerja	76
Gambar 4.9 Diagram Luas Lapak.....	77
Gambar 4.10 Diagram Status Lapak.....	78
Gambar 4.11 Diagram Fungsi Kegiatan Usaha	79
Gambar 4.12 Diagram Sifat Kegiatan Usaha	80
Gambar 4.13 Diagram Waktu Kegiatan Usaha	81
Gambar 4.14 Diagram Interaksi Pedagang	83
Gambar 4.15 Diagram Suasana Psikologis.....	84
Gambar 4.16 Diagram Latar Belakang Menjadi PKL	85
Gambar 4.17 Diagram Tendanisasi PKL.....	116
Gambar 4.18 Diagram Penggunaan Alat Peraga	119
Gambar 4.19 Diagram PKL Binaan Merupakan Bentuk Adanya Kerjasama Dengan Stkeholder	124
Gambar 4.20 Pengaruh Lingkungan Sekitar Terhadap Adanya PKL	126
Gambar 4.21 Timbulnya Kemacetan Akibat Adanya PKL	128
Gambar 4.22 Gambaran Aspek Ekonomi	141
Gambar 4.17 Zonasi PKL Di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya.....	181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan sektor informal tidak terlepas dari proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (Widodo, 2005). Di Negara Sedang Berkembang, sekitar 30-70% populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor informal. Secara umum sektor informal memiliki definisi yaitu bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum sanggup berdikari (Hidayat, 1983). Sektor informal juga memiliki karakteristik seperti jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang relatif rendah dibandingkan sektor formal. (Sethuraman, 1996).

Pendekatan informalitas yang terjadi di perkotaan sendiri dicermati dalam fenomena PKL (Pedagang Kaki Lima) yang kerap kali dipandang dari sisi negatif. PKL sendiri bukanlah suatu kelompok yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah satu moda dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal bukanlah satu-satunya indikator ketersediaan lapangan kerja. Keberadaan sektor informal pun adalah wujud tersedianya lapangan pekerjaan (Rukmana, 2005). Selain itu permasalahan yang ditimbulkan oleh sebagian besar PKL (62,86 hingga

96,44%) menutup penuh trotoar yang ditempatinya. Sangat kecil PKL yang menyisakan trotoar bagi pejalan kaki. Kondisi ini menyebabkan pejalan kaki turun ke badan jalan. Bersama-sama dengan parkir yang ditimbulkannya dan PKL menghambat kelancaran lalu-lintas perkotaan. (Indrawati, et. al, 2007).

Dari penjelasan sektor informal dan pedagang kaki lima beserta permasalahan yang di timbulkan, PKL menempati ruang-ruang kota sehingga dapat menimbulkan permasalahan ketertiban, keindahan serta merusak tata kota. Oleh sebab itu sudah seharusnya permasalahan yang ditimbulkan PKL ditangani bersama dengan cara melakukan penertiban dan penataan pemanfaatan ruang yang efektif tanpa menghilangkan sektor informal tersebut. Permasalahan pedagang kaki lima muncul karena belum adanya lokasi yang memadai para pedagang kaki lima secara layak didekat pusat kegiatan yang membutuhkan kegiatan mereka. (Ummu Athiyya, 2007).

Di Kota Surabaya sendiri terdapat kebijakan tentang pengaturan dan penataan PKL yang terdapat pada Perda No. 17 Tahun 2003 namun setelah di berlakukan, pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa revisi tentang peraturan penataan PKL. Berlakunya Perwali No. 34 Tahun 2005 tentang penetapan lokasi, jenis kegiatan, jumlah PKL, dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha pedagang kaki lima di Kota Surabaya kemudian mengalami beberapa kali revisi dan kendala, pada tahun 2008 pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Perwali No. 33 Tahun 2008 tentang pencabutan Perwali No. 34 Tahun 2005, kondisi tersebut menandakan bahwa tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pengaturan dan penataan PKL di Kota Surabaya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM (2010) saat ini baru ada 17 sentra PKL yang telah dibangun dan jumlah PKL yang dapat ditampung baru 1.620 PKL binaan,

sedangkan masih ada 9.700 PKL binaan yang belum tertampung. Jumlah tersebut belum termasuk PKL lain yang belum dibina. Kawasan Surabaya Timur memiliki jumlah sentra PKL paling banyak yaitu ada 9 tempat. Kemudian di Surabaya Selatan terdapat 8 tempat, sedangkan di Surabaya Pusat terdapat 7 tempat. Selanjutnya di Surabaya barat terdapat 3 tempat dan yang paling sedikit terdapat di Surabaya utara dengan 2 tempat sentra PKL.

PKL kawasan Gelora Sepuluh Nopember dipilih menjadi wilayah studi penelitian karena kawasan PKL binaan tersebut kembali mengalami kesemrawutan. PKL yang tidak tertata dan teratur di wilayah ini merupakan salah satu permasalahan yang di hadapi dalam upaya menata kembali kawasan Gelora Sepuluh Nopember yang bersih, rapi, dan tidak kumuh. Pada awalnya, para pedagang yang telah tergabung dalam paguyuban PKL Tambaksari berjualan disekitar Gelora Sepuluh Nopember, namun karena jumlah pedagang yang berjualan semakin besar dan keadaan lokasi berjualan yang kurang memungkinkan lagi, maka tempat berjualan para pedagang meluber ke depan stadion, dimana di depan stadion tersebut dibangun sebuah taman baru yang membuat para pedagang lain tertarik untuk menempati lokasi tersebut. Respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan PKL sangat besar hal tersebut bisa dilihat di akhir pekan, di sekeliling kawasan sangat ramai dengan pedagang dan pembeli.

Upaya penataan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kota dengan menyediakan lahan di Kapas Krampung Plaza secara gratis selama 6 bulan. Upaya pemerintah ini ternyata tidak cukup ampuh dalam menangani PKL, banyak pedagang yang kembali menempati tempat berdagang yang berada di pinggir-pinggir jalan. Kapas Krampung Plaza (KAZA) yang di peruntukan PKL ternyata belum mampu memuaskn PKL. KAZA dinilai tidak sesuai dengan karakteristik PKL yang cenderung memilih tempat

yang lebih ramai yang diharapkan banyak yang membeli barang dagangannya. Proses relokasi yang pernah dilakukan berjalan tidak lama karena lokasi yang dipilih pemerintah yaitu KAZA sepi pengunjung dan pembeli akibatnya omzet penjualan pedagang juga menurun drastis (Kabar Warta, 2012).

Permasalahan PKL di kawasan ini juga terkait dengan keberadaannya yang menggunakan fasilitas publik seperti trotoar dan jalan raya. Akibatnya PKL menghambat lalu lintas seperti di jalan Tambaksari depan stadion Gelora Sepuluh Nopember. Bahkan, sepanjang sisi kiri jalan penuh dengan gerobak dan tenda warna-warni. Disisi kanan jalan juga tampak penjual makanan yang ikut meramaikan keberadaan Taman Mundu. (liputan6.com, 2013)

Fasilitas publik lainnya yang digunakan yaitu jalur pejalan kaki. Hal tersebut menjadikan jalur pejalan kaki tidak nyaman dan optimal fungsinya. Ditambah lagi dengan alat peraga yang tidak teratur dan mengurangi estetika kawasan Tambaksari. Faktor kebersihan juga nampak menjadi masalah PKL di kawasan ini. Kondisi saat ini PKL mengotori area-area publik. Dapat disimpulkan, ketidakseimbangan, dan ketidakteraturan penggunaan ruang antara alat peraga PKL dan ruang publik adalah masalah utama keberadaan PKL di kawasan Tambaksari

Lemahnya aspek pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pedagang kaki lima di kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat berkembang pesatnya pedagang kaki lima di daerah tersebut. Luberan pedagang dan parkir yang tidak terakomodir dengan baik menyebabkan kemacetan arus lalu lintas didepanya. (Liputan6.com, 2013)

Penataan PKL merupakan salah satu alternatif penyelesaian dari benturan sosial antara kepentingan PKL dengan masyarakat. PKL sebagai alternatif pekerjaan untuk mencari penghidupan dan masyarakat yang terpenuhinya hak

atas fasilitas publik. Sudut pandang demikian menjadi pertimbangan dalam menentukan penyelesaian masalah PKL di Tambaksari. Yaitu dengan mengatur kebutuhan ruang antara PKL dan fasilitas publik secara seimbang. Dengan adanya penataan PKL diharapkan dapat memberikan solusi dan mengurangi dampak negatif terhadap keberadaan PKL. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap para pedagang seharusnya tidak menggunakan pengusuran karena akan berakibat pada tindakan kekerasan dan ketidakpuasan pedagang (Antarajatim,2012). Pemerintah sebaiknya memberikan solusi yang disetujui oleh para pedagang. Memindahkan tempat usaha mereka ketempat lain bukanlah usaha yang mudah. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan arahan penataan keberadaan pedagang kaki lima yang berada di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember yang berdampak langsung terhadap penataan Kota Surabaya

1.2 Rumusan Masalah

Upaya penataan PKL Surabaya khususnya di kawasan Tambaksari belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Gelora Sepuluh Nopember mempunyai daya tarik bagi masyarakat, ditambah lagi dengan dibangunnya taman Mundhu didepan stadion sehingga membuat para pedagang bertambah banyak dalam menawarkan barang dagangannya. Dengan semakin menjamurnya PKL yang meluber ke badan-badan jalan yang mengambat lalulintas sehingga menimbulkan kesan mengurangi keindahan kawasan dan mengganggu pejalan kaki.pengaturan tentang pengelolaan pedagang terkait jumlah PKL dengan luas lokasi yang ditempati harus diperhatikan pula , supaya PKL tidak meluber. Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora sepuluh Nopember?

2. Bagaimana arahan yang digunakan dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan arahan penataan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember, Tambaksari. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL Gelora Sepuluh Nopember
3. Merumuskan arahan penataan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Gelora Sepuluh Nopember

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu ruang lingkup pembahasan, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi.

1.4.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam Penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik PKL Tambaksari serta menganalisis faktor-faktor penataan PKL. Setelah itu hasil dari identifikasi karakteristik dan analisis faktor-faktor penataan PKL digunakan untuk merumuskan penataan PKL di Tambaksari yang akan dikelompokkan kedalam beberapa aspek, nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah PKL. Lingkup PKL yang dimaksud adalah PKL yang mempunyai karakteristik yang dilihat dari jenis barang yang didagangkan, pendapatan serta sarana yang digunakan serta aspek kegiatan.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang akan dijadikan objek dalam penelitian adalah kelurahan Tambaksari. Berikut adalah batasan wilayahnya :

- Batas Utara : Jalan Kapas Krampung
- Batas Selatan : Jalan Pacarkeling
- Batas Timur : Jalan Bronggalan
- Batas Barat : Jalan Kusuma Bangsa

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Substansi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik pedagang kaki lima, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penataan pedagang kaki lima, arahan penataan pedagang kaki lima berdasarkan karakteristik aspek fisik, serta pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pedagang kaki lima.

1. Substansi teori sektor informal kota, khususnya karakteristik dan jenis pedagang kaki lima
2. Perencanaan dan penataan pedagang kaki lima ditinjau dari aspek kegiatan dan pemanfaatan ruang

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberi masukan studi mengenai arahan penataan, pengendalian kegiatan dan pemanfaatan ruang pada pedagang kaki lima secara objektif, dan termasuk dalam substansi ilmu perencanaan tata guna lahan perkotaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai regulator atau pembuat kebijakan terkait pentingnya penataan dan pengendalian lokasi pedagang kaki lima dalam mendukung perkembangan sektor informal sebagai penggerak perekonomian rakyat.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung penataan pedagang kaki lima sekaligus pengendalian kegiatan sektor informal kota

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dilakukan penelitian; rumusan masalah dan pertanyaan penelitian; tujuan dan sasaran; ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup pembahasan; manfaat penelitian; sistematika penulisan; dan kerangka pemikiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang hasil studi literatur yang berupa dasar-dasar teori dan referensi yang terkait dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas tentang karakteristik pedagang kaki lima serta kriteria dalam penataan pedagang kaki lima

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

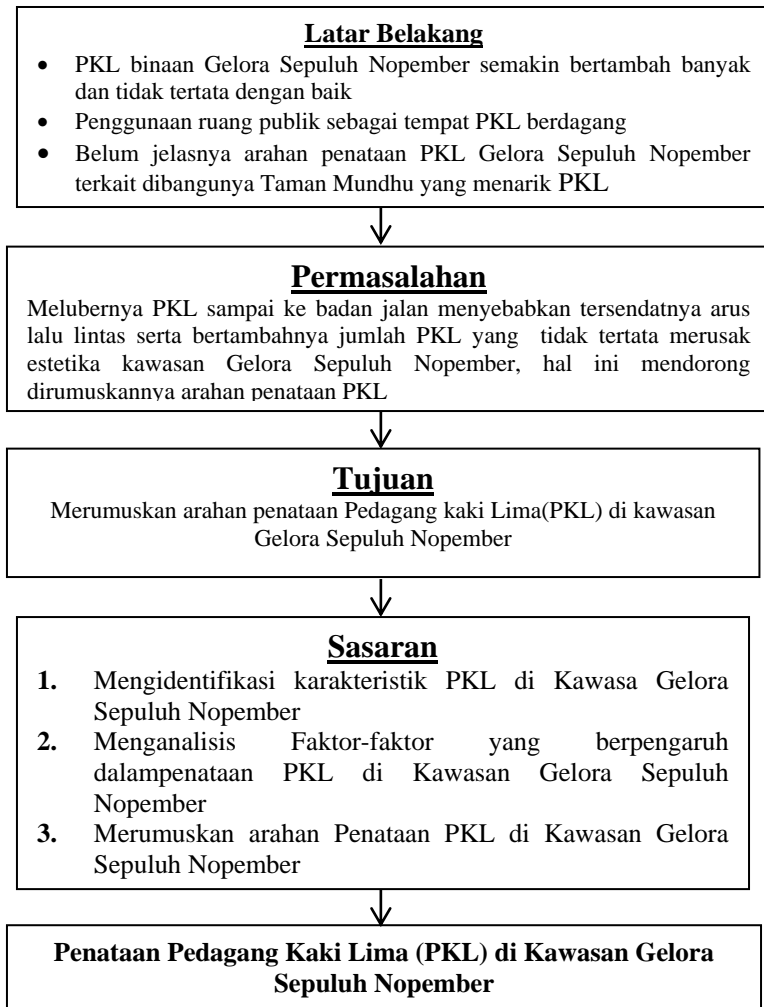
Berisi tentang hasil pengamatan atau pengumpulan data dan informasi lapangan, pengolahan data dan informasi, serta memuat analisis dan pembahasan data/informasi serta pembahasan hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang simpulan dari seluruh hasil penelitian, kelemahan studi dan rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk menindaklanjuti dari hasil penelitian

1.7 Kerangka Berpikir

Berikut adalah kerangka berpikir penelitian :



Gambar 1.1
Diagram Kerangka Berpikir
Sumber : Penulis, 2014

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sektor Informal

Istilah informal menurut Keith Hart (Manning dan Effendi, 1985) seorang antropolog asal Inggris, 1973 dalam Ari Sulistiyo Budi, 2006 adalah untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Teknologi yang digunakan dalam kelompok informal cenderung menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas serta dilakukan oleh anggota keluarga.

Menurut Hidayat dan Sumitro dalam Dessy Arifanto (2006) sektor informal dapat diartikan sebagai unit-unit usaha yang berskala kecil yang menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri. El shaks (Jurnal Baliurang, 2004) Dalam Dessy Arifianto (2006) memberikan dua tipologi pengklasifikasian sektor informal yaitu, pertama : unit usaha yang memberikan layanan vital bagi masyarakat kota dan bersifat melengkapi sektor formal seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, dan angkutan jasa kecil-kecilan. Kedua, kegiatan ekonomi yang cenderung bersifat personal, marjinal dan ilegal. Tipologi ini biasanya tidak menggunakan modal dan lebih menggandalkan pada kekuatan fisik.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1997) dijelaskan bahwa belum ada kebulatan pendapat tentang batasan yang tepat untuk sektor informal di Indonesia. Tetapi ada kesepakatan tidak resmi antara para ilmuwan yang terlihat dalam penelitian masalah-masalah sosial untuk menerima ”definisi kerja” sektor informal di Indonesia sebagai berikut: a) Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah; b) Sektor yang belum dapat menggunakan (karena tidak punya akses) bantuan, meskipun pemerintah telah menyediakannya; c) Sektor yang telah menerima bantuan pemerintah tetapi bantuan tersebut belum sanggup membuat

sektor itu mandiri. Secara umum dari sektor informal adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum sanggup berdikari (Hidayat, 1983).

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sektor informal merupakan unit usaha kecil yang dalam pengelolaanya tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Selain itu sektor informal dianggap sebagai pelengkap dari sektor formal serta menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran

2.1.2 PKL Sebagai Sektor Informal

Makna dari sektor informal sulit untuk digambarkan namun dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Usaha sektor informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang tidak jelas. (Hann Dieter, 1991). Dengan pengertian tersebut terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan tidak diakui karena posisi mereka diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.

Beberapa segi sektor informal yang pertama adalah kegiatan sektor informal bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dari sektor formal, bahkan sektor ini memperoleh pengakuan kegiatannya justru dari sektor formal itu sendiri. Kedua, bahwa gejala formal-informal merupakan karakteristik kegiatan ekonomi Negara yang sedang berkembang, dimana sektor informal mendominasi hampir seluruh kegiatan bidang jasa. Ketiga, sektor informal memiliki anggapan akan terikat kedalam suatu bentuk solidaritas tersendiri tidak terbukti (Manning dan Effendi, 1985).

Dalam Ari Sulistyو Budi (2006) memberikan didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Mulyanto (2007) dalam Slamet Santoso (2008), PKL merupakan usaha kecil yang berorientasi pada laba atau profit layaknya sebuah

kewirausahaan. PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. PKL menjadi manajer tunggal yang menagani usahanya mulai dari perencanaan usaha, mengerjakan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau bahkan tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan formal

Dari pengertian diatas PKL dapat diartikan sebagai salah satu kelompok sektor informal yang lokasi usahanya dikeramaian umum seperti trotoar dipinggir jalan, kawasan perdagangan, ataupun sekolah biasanya tidak memiliki izin usaha sehingga aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta memiliki modal yang terbatas. Pedagang kaki lima timbul karena adanya efek dari proses urbanisasi dan kurangnya lapangan pekerjaan formal yang ada yang bisa menampung para pekerja yang memutuskan untuk bekerja pada sektor informal khususnya menjadi pedagang kaki lima.

2.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Mc Gee dan Yeung (1977) mengemukakan karakteristik PKL dibagi berdasar barang dagangan, jenis ruang usaha, dan jenis sarana usaha :

- a. Jenis dagangan PKL dipengaruhi oleh aktivitas utama yang ada disekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas
- b. Jenis dagangan yang dijual antara lain : bahan mentah makanan, makanan setengah jadi, non makanan dan jasa pelayanan.
- c. Lokasi berdagangnya berada dipinggir jalan ataupun tempat-tempat yang seiring dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar, terminal serta daerah komersil
- d. Sifat usahanya terdiri dari sarana non permanen, semi permanen dan permanen. Secara umum sarana yang digunakan yaitu gerobak, pikulan, warung semi permanen, kios atau gelaran alas

Karakteristik PKL dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980), yaitu :

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen.
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu ada yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang)
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi dari jerih payahnya
- e. kualitas barang-barang yang diperdagangkan relative rendah dan biasanya tidak berstandar
- f. volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pemebeli ummunnya merupakan pembeli yang berdaya beli.
- g. Usaha kecil biasanya berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anakturut membantu dalam usaha tersebut, baik secra langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaanya ada yang secara penuh, sebagaian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, da nada pula yang melaksanakan secara musiman.
- j. Barang yang dijual biasanya merupakan *convicience goods* jarang sekali *speciality goods*.
- k. Seringkali dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Menurut Wirosandjoyo (1985) PKL tergolong sektor informal. Sektor informal merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan), yang memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik waktu, pemodalan dan penerimaan.
- b. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil, dan diusahakan berdasarkan hitungan harian.

- c. Umumnya tidak memiliki tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya
- d. Tidak memiliki keterkaitan usaha yang lain yang besar
- e. Umumnya dilakukan oleh dan melayani masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- f. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan dan keterampilan kerja
- g. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari kerabat keluarga, kenalan atau dari daerah yang sama
- h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan dan perkreditan formal

Rustianingsih, (2004) mengungkapkan pengaturan maupun pengarahannya PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL (setting perilaku), karakteristik konsumen PKL maupun karakteristik ruang fisik PKL (setting fisik). Karakteristik PKL adalah pemahaman terhadap perilaku dari masyarakat PKL dengan indikasi sebagai berikut :

- a. Fungsi kegiatan : fungsi pelayanan pedagang eceran, fungsi pelayanan jasa, fungsi hiburan, dan fungsi sosial ekonomi
- b. Tingkat pendidikan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap tingkat pemahaman masyarakat PKL dalam mencerna suatu pola kebijakan yang ditetapkan pemerintah
- c. Jenis dagangan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap ada tidaknya mayoritas dan minoritas atau keragaman dari kegiatan PKL, juga memperlihatkan sarana dan prasarana yang dipakai dalam berdagang. Hal ini mempermudah kita untuk pengaturan ruangnya.
- d. Lamanya berprofesi indikasi ini memperlihatkan asal muasal mereka terlibat pada kegiatan PKL
- e. Tingkat pendapatan PKL : indikasi ini memperlihatkan kondisi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL di suatu lokasi maka terjadi kecenderungan kawasan tersebut akan menjadi sasaran utama PKL yang biasanya berdekatan dengan lokasi formal

- f. Model yang diinginkan PKL : indikasi ini memperlihatkan keinginan PKL terhadap model penataan
- g. Interaksi sesama PKL : indikasi yang memperlihatkan tingkat solidaritas sesama PKL
- h. Kebutuhan ruang PKL : indikasi yang memperlihatkan terhadap kebutuhan lahan untuk masing-masing jenis dagangan.

Karakteristik ruang fisik PKL (Rustianingsih, 2004) adalah kebutuhan elemen analisis untuk menentukan syarat-syarat utama yang harus dipenuhi dalam menyediakan ruang bagi kegiatan PKL. Karakteristik umum yang memepengaruhi kebutuhan ruang bagi PKL adalah ;

- Lokasi yang strategis
- Aksesibilitas yang tinggi

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, menurut Malik (2005), Palupi dan Raharjo (2004) dan Indrawati (2005), PKL diklasifikasikan menjadi :

- a. Berdasarkan latar belakang ekonominya, kalsifikasi pertama adalah PKL yang benar-benar terpaksa menjadi PKL karena kesulitan hidup. Mereka berdagang dengan warung beroda (dorong) ataupun bangunan semi permanen di Trotoar. Sembari berdagang mereka juga bertempat tinggal disitu, karena tidak ada tempat lain lagi untuk dijadikan tempat tinggal. Kedua, PKL yang berdagang karena masalah ekonomi juga namun mereka telah memiliki tempat tinggal dan simbol hidup modern seperti TV misalnya. Ketiga, PKL yang berdagang karena melihat potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada membuka toko/warung disbanding harus menyewanya. Selain itu harus mudah diakses pembeli.
- b. Berdasarkan jenis makanan yang dijual terdiri dari PKL penjual (a) makanan, (b) pakaian, (c) kelontong, (d) peralatan bekas (klitikan) dan sebagainya.
- c. Berdasarkan waktu berdagang pada pagi hingga siang hari, pagi hingga sore, sore hingga malam hari, malam hari hingga pagi hari, pagi hingga malam hari dan sepanjang hari.

- d. Berdasarkan bangunan tempat berdagang. Dapat diklasifikasikan menjadi (a) PKL bergerak/movable/dorongan, (b) PKL tanpa bangunan seperti PKL oprokan/dasaran/gelaran, (c) PKL dengan bangunan permanen (selalu ada setiap saat, baik bentuknya masih tetap ataupun sudah berubah), (d) PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).
- e. Berdasarkan luas bangunan/tempat berdagang (*space use*), terdiri dari 7 kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m², 4-6 m², 7-9 m², 10-12 m², 13-15 m², 16-17 m², dan lebih dari 18 m².

Tabel 2.1
Kajian Teori karakteristik PKL

Sumber	Aspek yang terdapat dalam Teori
Mc Gee dan Young (1977)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang yang diperdagangkan • Keberadaan lokasi berdagang • Sifat usaha berdagang • Sarana yang digunakan dalam berdagang
Kartono dkk (1980)	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pedagang • Lokasi • Jenis barang yang diperdagangkan • Modal usaha • Kualitas barang • Interaksi pedagang • Sifat kegiatan usaha • Psikologis pedagang
Wirosandjoyo (1985)	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana yang digunakan • Lokasi usaha • Jangkauan pelayanan • Keterampilan • Tenaga kerja

Rustianingsih (2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi kegiatan • Tingkat pendidikan • Jenis barang yang diperdagangkan • Pendapatan • Interaksi • Kebutuhan ruang (lokasi)
Malik(2005), Palupi (2004), Indrawati(2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi • Sarana berdagang • Barang yang diperdagangkan • Waktu berdagang • Kondisi bangunan • Luas bangunan

Sumber : Hasil kajian teori, 2014

Berdasarkan pada kajian yang telah disebutkan oleh para pakar diatas, dapat ditentukan aspek yang dapat membentuk karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL). Aspek tersebut di kelompokkan berdasarkan aspek fisik, aspek kegiatan dan psikologi pedagang. Dari ketiga aspek tersebut kemudian ditentukan indikatornya. Aspek dan indikator dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aspek dan Indikator

Aspek	Indikator	Variabel
Aspek Fisik	• Menjual barang dalam skala kecil	• Jenis barang
	• Usaha bermodal kecil	• Pendapatan • Modal usaha
	• Bentuk tempat berdagang	• Sarana yang digunakan
	• Keterbatasan cara berdagang	• Tingkat pendidikan • Tingkat keterampilan

	• Tenaga kerja	• Sumber tenaga kerja
	• Kebutuhan ruang	• Luas lapak • Status lapak
Aspek kegiatan	• Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	• Sifat berdagang • Waktu berdagang • Fungsi berdagang
	• Interaksi Pedagang	• Adanya tawar menawar
Aspek Psikologis	• Adanya Penertiban dari Satpol PP	• Suasana psikologis PKL
	• Kondisi Ekonomi	• Latar belakang menjadi PKL

Sumber : Hasil sintesa kajian teori, 2014

Berdasarkan tabel diatas diperoleh indikator dari ketiga aspek, yaitu aspek fisik dengan indikator : hanya menjual barang murah, usaha bermodal kecil, bentuk tempat berdagang, keterbatasan cara berdagang, tenaga kerja, dan kebutuhan ruang, untuk aspek kegiatan diperoleh inidikator yaitu pedagang yang menetap dan berpindah-pindah dan interaksi pedagang. Dari aspek Psikologis diperoleh indikator berupa adanya penertiban dari Satpol PP dan Kondisi ekonomi. Berdasarkan indikator pada Tabel 2.2 diperoleh variabel dari tabel hasil tinjauan teori yang meliputi karakteristik fisik berupa : jenis barang, sarana yang digunakan, pendapatan, modal usaha, Tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, sumber tenaga kerja, luas lapak dan status lapak. Dari aspek kegiatan PKL meliputi : fungsi kegiatan usaha, sifat kegiatan usaha, waktu kegiatan usaha dan adanya tawar menawar. Dari aspek psikologi PKL meliputi suasana psikologis dan latar belakang menjadi PKL.

1.3 Prinsip Pemilihan Lokasi Kegiatan Perdagangan

Lokasi yang baik memiliki wilayah sekitar yang bersifat kondusif dalam mendukung kegiatan perdagangan. Lokasi yang baik adalah lokasi dengan arus kunjung tinggi. Generator aktivitas

seperti lokasi di perempatan jalan, perkantoran, hotel, sekolah, wilayah pemukiman, pusat rekreasi, atraksi turis, terowongan bawah tanah, jembatan penghubung, tempat pemberhentian atau penggantian transportasi publik, serta stasiun MRT akan memastikan arus pengunjung yang mapan (Neo dan Wing, 2005). Dalam tinjauan lokasi ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu :

a. Ekonomi Lahan

Prinsip ini menyatakan bahwa lokasi harus dinilai sebagai ekonomi. Lahan yang dipilih haruslah suatu lahan yang cukup ekonomis bagi aktivitas perdagangan eceran. Tingkat nilai ekonomi lahan dapat dikaji melalui teknis analisis perbandingan biaya dan keuntungan (*cost benefit analysis*) dari proses pembangunan, operasi perbaikan hingga pemeliharaan (Nelson 1981). Dari analisis *cost benefit* ini, dapat dikeluarkan suatu kesimpulan mengenai tingkat keekonomisan penggunaan lahan dari modal yang dikeluarkam jika berada pada suatu lokasi tapak tertentu. Diharapkan lokasi tapak terpilih memiliki efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan yang maksimum bagi aktivitas perdagangan eceran.

Dari nilai ekonomi lahan ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penataan lokasi PKL adalah harga lahan dan perbandingan dengan kondisi lahan yang ada. Sebuah lahan yang nantinya digunakan sebagai lokasi penataan PKL haruslah terjangkau bagi PKL baik dalam sewa lahan maupun dalam hal operasionalnya.

Rustianingsih, (2004) mengungkapkan pengaturan maupun pengarahan PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL (*setting perilaku*), karakteristik konsumen PKL maupun karakteristik ruang fisik PKL (*setting fisik*). Karakteristik PKL adalah pemahaman terhadap perilaku dari masyarakat PKL dengan indikasi sebagai berikut :

- a. Fungsi kegiatan : fungsi pelayanan pedagang eceran, fungsi pelayanan jasa, fungsi hiburan, dan fungsi sosial ekonomi.
- b. Tingkat pendidikan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap tingkat pemahaman masyarakat PKL dalam mencerna suatu pola kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- c. Jenis dagangan : indikasi ini memperlihatkan kepada kita terhadap ada tidaknya mayoritas dan minoritas atau keragaman dari kegiatan PKL, juga memperlihatkan sarana dan prasarana yang dipakai dalam berdagang. Hal ini mempermudah kita untuk pengaturan ruangnya.
- d. Lamanya berprofesi : indikasi ini memperlihatkan asal-muasal mereka terlibat pada kegiatan PKL.
- e. Tingkat pendapatan PKL : indikasi ini memperlihatkan kondisi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL di suatu lokasi maka terjadi kecenderungan kawasan tersebut akan menjadi sasaran utama PKL yang biasanya berdekatan dengan lokasi formal.
- f. Model yang diinginkan PKL : indikasi ini memperlihatkan keinginan PKL terhadap model penataan.
- g. Interaksi sesama PKL : indikasi yang memperlihatkan tingkat solidaritas sesama PKL.
- h. Kebutuhan ruang PKL : indikasi yang memperlihatkan terhadap kebutuhan lahan untuk masing-masing jenis dagangan.

Untuk karakteristik setting perilaku diatas peneliti mengambil tingkat pendapatan pedagang. Teori diatas menyebutkan bahwa tingkat pendapatan PKL dipengaruhi oleh lokasi PKL yang berdekatan dengan lokasi formal. Tingkat pendapatan pedagang akan diambil dalam penelitian tentang penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Kemudian tinjauan tentang ekonomi lahan yang membahas tentang harga lahan. Dalam penataan lokasi PKL akan cenderung memilih lahan yang murah apabila harga lahan tersebut tinggi maka status lahan tersebut akan menjadi lahan sewa untuk berdagang para PKL.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut maka aspek ekonomi akan dikelompokkan menjadi harga lahan, status lahan, dan tingkat pendapatan pedagang. Berikut penjelasan dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Ekonomi Lahan

Aspek	Indikator penelitian	Variabel
-------	----------------------	----------

Ekonomi lahan	Penilaian suatu lahan terhadap nilai ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Harga lahan
	Kondisi lahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Status lahan
Pendapatan	Hasil yang diperoleh dari berdagang dengan lokasi yang strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan pedagang

Sumber : Hasil Analisa, 2014

2.4 Konflik Sosial

Konflik adalah akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau belawanan antara satu atau keduanya saling terganggu (Hardjana, 1994). Konflik adalah suatu situasi dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya (Hardjana, 2004). Konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi atau kepribadian (Wahyudi, 2006). Konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, keadaan atau perilaku yang bertentangan (Pickering, 2001).

Jadi konflik merupakan perbedaan keinginan dan tujuan sehingga salah satu atau keduanya merasa dirugikan dengan kegiatan sebagian atau kedua pihak. Perbedaan tujuan dan kepentingan antara dua pihak atau lebih menyebabkan perilaku yang bertentangan dan menjurus pada tindakan anarki. Jika dikaji lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi antara pihak regulator dan sektor informal dapat digolongkan menjadi sebuah konflik.

2.4.1 Ciri-Ciri Konflik

Ciri-ciri terdapatnya konflik adalah sebagai berikut :

- a. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan (Wijono, 1993)
- b. Paling tidak timbul pertentangan antar dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan,

- memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan(Wijono, 1993)
- c. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala, meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti : status, jabatan, tanggungjawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu : mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio psikologis seperti : rasa aman, kepercayaan diri, kasih penghargaan dan aktualisasi diri (Ross,1993)
 - d. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan ayang berlarut-larut. (Wijono, 1993)
 - e. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat,golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestige dan sebagainya.(Ross, 1993).

Perbedaan tujuan yang terjadi antara pihak regulator dengan pihak sektor informal khususnya PKL bisa digolongkan sebagai sebuah konflik karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik sebuah konflik. Berikut adalah karakteristik konflik yang berhubungan dengan penataan PKL :

- Perbedaan antara pihak regulator dengan pihak sektor informal dalam mencapai tujuan dan melakukan tugasnya masing-masing.
- Munculnya interaksi dari kedua pihak yang berujung pada pertentangan dan berakhir dengan tindakan penggusuran yang cenderung anarki.
- Munculnya ketidakseimbangan akibat dari konflik yang ada seperti kembalinya PKL menempati lahan yang dulunya pernah digusur akibat pembiaran lahan pasca penggusuran yang mengakibatkan menjadi terbiasa dengan konflik yang dihadapi.

2.4.2 Sumber-Sumber Konflik

Ada beberapa hal yang mendasari munculnya konflik antar pribadi dalam organisasi, misalnya :

- a. Regulasi : penyusunan sebuah regulasi dapat menyebabkan sebuah konflik karena sebuah regulasi dirumuskan dengan sifat mengikat pada suatu individu atau kelompok tertentu. Perumusan sebuah regulasi terkadang mengalami ketimpangan dan keberpihakan kepada salah satu pihak dengan adanya keberpihakan akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik karena adanya penyangkalan dari pihak yang dirugikan.
- b. Perbedaan tujuan : perbedaan tujuan antara dua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama penting dan saling berhubungan menyebabkan terjadinya konflik dalam mencapai tujuan masing-masing.
- c. Komunikasi : komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya komunikasi antar sesama kelompok atau individu maka konflik akan dengan mudah terjadi karena tidak ada hubungan baik antara kedua belah pihak. Dengan adanya komunikasi antar pihak dan mengerti apa yang akan menjadi tujuan pihak lain dan juga menghindari kesalahan pahaman dalam pengambilan keputusan.
- d. Keras kepala merupakan mentalitas “dengan craku-atau tidak sama sekali”. Satu-satunya yang dapat meyelamatkan dalam konflik ini karena biasanya hal ini tetap mengacu pada pemikiran yang logis. Meskipun demikian tidak ada kompromi sehingga tidak ada penyelesaian (Stevenin, 2000).

Konflik yang terjadi antara sektor informal dengan pihak regulator sering terjadi karena beberapa sebab yang terbagi dalam beberapa proses dan akhirnya menyebabkan pecahnya konflik antar kedua pihak. Berikut adalah

gambaran proses mengapa sering terjadi konflik antara stakeholder dalam penataan PKL :

- a. Regulasi yang berpihak hanya pada sektor formal dan tidak ada regulasi yang berpihak pada sektor informal
- b. Perbedaan tujuan antara PKL dengan pihak regulator dalam mencapai tujuan
- c. Kurangnya komunikasi yang terjaga antara PKL dan regulator dalam pengambilan kebijakan

Dalam tinjauan dari sumber-sumber konflik diatas pembuatan regulasi yang berbeda tujuan antara PKL dengan pemerintah seharusnya disini pihak pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu terhadap suatu kebijakan yang diambil agar kedua belah pihak sama-sama sejalan. Oleh karena itu komunikasi menjadi sangat penting disuatu sisi pedagang tidak merasa dirugikan disuatu sisi pihak regulator. Dalam hal ini komunikasi antar stakeholder diperlukan dalam paya pencapaian tujuan tertentu.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas, maka dapat dibentuk karakteristik pada sebuah konflik. Pada aspek sumber konflik sendiri nantinya akan menjadi satu aspek yaitu aspek sosial. Berikut tinjauan manajemen konflik tersaji pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Manajemen Konflik

Aspek	Indikator Penelitian	Variabel
Sumber Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang berpihak • Perbedaan tujuan • Tidak adanya komunikasi antara stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antar stakeholder

Sumber : Hasil sintesa kajian pustaka, 2014

2.5 Modal Sosial

Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Francis Fukuyama, 2002: xii) Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. *Trust* (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. *Trust* merupakan produk dari norma-norma sosial *kooperation* yang sangat penting yang kemudian menunculkan modal sosial.

Fukuyama (2002), menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. *Trust* bermanfaat bagi pencipta ekonomi tunggal karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (*cost*), hal ini melihat dimana dengan adanya *trust* tercipta kesediaan seseorang untuk menempatkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu. Adanya *high-trust* akan terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat masing-masing individu bersedia mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Bagi masyarakat *low-trust* dianggap lebih inferior dalam pelaku ekonomi kolektifnya. Jika *low-trust* terjadi dalam suatu masyarakat, maka campur tangan Negara perlu dilakukan guna memberikan bimbingan. (Francis Fukuyama, 2002)

Unsur penting kedua dari modal sosial adalah *reciprocal* (timbal balik), dapat dijumpai dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial (Soetomo, 2006). Unsur yang selanjutnya yakni interaksi sosial. Interaksi yang semakin meluas akan menjadi semacam jaringan sosial yang lebih memungkinkan semakin meluasnya lingkup kepercayaan dan lingkup hubungan timbal balik

Jaringan sosial merupakan bentuk dari modal sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari

daerah yang sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dll. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal social dari jaringan tersebut. (Pratikno dkk: 8). Dilihat dari tindakan ekonomi, jaringan adalah sekelompok agen individual yang berbagi nilai-nilai dan norma-norma informal melampaui nilai-nilai dan norma-norma yang penting untuk pasar biasa. Melalui pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek sosial melainkan juga ekonomi.

Ketiga unsur utama modal sosial dapat dilihat secara aktual dalam berbagai bentuk kehidupan bersama dapat digunakan konsep modal sosial sesuai pendapat Uphoff (Soetomo, 2006). Dalam pandangan Uphoff (Soetomo, 2006), modal sosial dapat dilihat dalam dua kategori, fenomena struktural dan kognitif. Kategori struktural merupakan modal sosial yang terkait dengan beberapa bentuk organisasi sosial khusus peranan, aturan, *precedent* dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas bagi kerjasama dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan. Modal sosial dalam kategori kognitif diderivasi dari proses mental dan hasil pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi khususnya norma, nilai, sikap, kepercayaan yang memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kerjasama khususnya dalam bentuk tindakan bersama yang saling menguntungkan. Bentuk-bentuk aktualisasi modal sosial dalam fenomena struktural maupun kognitif itulah yang perlu digali dari dalam kehidupan masyarakat selanjutnya dikembangkan dalam usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.

Level mekanisme modal sosial dapat mengambil bentuk kerjasama. Kerjasama sendiri merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh seseorang atau kelompok lain. Akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. Perlu ditegaskan bahwa ciri penting modal sosial sebagai sebuah capital

dibandingkan dengan bentuk capital lainnya adalah asal usulnya yang bersifat sosial. Relasi sosial bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap pembentukan modal sosial tergantung apakah relasi sosial itu dianggap sinergi atau kompetisi dimana kemenangan seseorang hanya dapat dicapai diatas kekalahan orang lain.

2.5.1 Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2007), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun orang-perorang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang meyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dll. Semua itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya (Soerjono Soekanto, 2007).

Kontak dan komunikasi merupakan syarat mutlak dalam proses interaksi sosial, sehingga tanpa kedua unsur tersebut maka sangatlah mustahil interaksi sosial terjadi. Interaksi merupakan kunci semua kehidupan sosial , karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama.di maksudkan lagi hal ini sebagai pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan di usaha PKL untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan di dalam usah mereka untuk mencapai tujuanya. (Abu Ahmadi, 2007).

Charles P. Loonis (Soleman b. Taneko, 1984), mencamtumkan ciri penting dari interaksi sosial, yakni :

- a. Jumlah peaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.
- b. Adanya komunikasi para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
- c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
- d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oelh pengamat

Apabila interaksi sosial diulang menurut bentuk yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud “hubungan sosial”. Bentuk-bentuk interaksi sosial (Soleman b. Taneko, 1984), adalah terdiri dari :

- a. Kerjasama
Kerjasama merupakan usaha bersama anatara individu atau kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Proses terjadinya kerjasama lahir apabila diantara individu dan berkempok agar tujuan-tujuan mereka tercapai. Begitu pula dengan individu tau kelompok merasa adanya ancaman dan bahaya dari luar, maka proses kerjasama ini akan bertambah kuat diantara mereka.
- b. Persaingan
Persaingan adalah proses sosial, dimana individu atau kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada namun tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.
- c. Konflik
Konflik merupakan proses sosial diman individu ataupun kelompok menyadari perbedaan –perbedaan, misalnya ciri fisik, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, prinsip, politik, ideology maupun kepentingan dengan pihak lain. Perbedaan ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada tinggal menjadi suatu

pertentangan atau pertikaian dimana pertikaian itu sendiri dapat menghasilkan ancaman dan kekerasan fisik

d. Pendamaian

Akomodasi merupakan proses sosial dengan dua makna, pertama adalah proses sosial yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang dalam interaksi sosial dan antar kelompok di dalam masyarakat, terutama yang ada hubungannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Kedua adalah menuju pada suatu proses yang sedang berlangsung. Dimana akomodasi menempatkan pada suatu proses untuk meredakan suatu pertentangan yang terjadi didalam masyarakat, baik pertentangan antara individu, kelompok, masyarakat maupun dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk umum dari interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Suatu interaksi sosial yang asosiatif merupakan suatu proses yang menuju kerjasama, sedangkan bentuk interaksi disosiatif dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan seorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian mengenai interaksi sosial yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjalin di dalam kelompok PKL tambaksari adalah hubungan timbal balik antara orang-perorang, orang dengan kelompok dan kelompok-kelompok. Dalam interaksi sosial terdapat dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial mempunyai dua bentuk yaitu asosiatif dan disosiatif.

2.5.2 Partisipasi Masyarakat

Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai

kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Nelson menyebutkan dua macam partisipasi, yaitu partisipasi horizontal dan partisipasi vertikal. Partisipasi horizontal yaitu partisipasi antar sesama warga atau suatu perkumpulan, sedangkan partisipasi vertikal adalah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan ataupun antara warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah (Taliziduhu Ndaha, 1987). Partisipasi dalam kelompok PKL tambaksari adalah keterlibatan individu yang tergabung di dalam kelompok paguyuban PKL baik secara vertikal maupun horizontal dalam pembangunan masyarakat dalam hal ini adalah membangun kemandirian sosial untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Pada dasarnya partisipasi mencakup dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas paguyuban PKL, dalam hal ini komunitas terfragmentasi dalam *labeling and identity*. Partisipasi eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (seperti hubungan dengan pemerintah ataupun komunitas masyarakat lain), (Suparjan H. Suyanto, 2003).

Hoofsteede (Khairudin H, 1992) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. Partisipasi inisiasi adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu program, yang nantinya program tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat.
- b. Partisipasi legitimasi adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang program atau proyek.
- c. Partisipasi eksekusi adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Partisipasi pedagang dalam paguyuban PKL tambaksari sangat diperlukan. Partisipasi ini menggambarkan kesadaran nilai dan norma di dalam masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mendukung kemandirian sosial pedagang. Partisipasi merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. Hubungan timbal balik dalam bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial. Relasi sosial bisa berdampak negatif ataupun positif terhadap pembentukan modal sosial tergantung apakah relasi sosial itu dianggap sinergi atau kompetisi. Dalam hal ini tinjauan modal sosial, partisipasi masyarakat dan interaksi sosial dikelompokkan menjadi Aspek Sosial. Berikut adalah tinjauan yang mempengaruhi modal sosial yaitu adanya organisasi pedagang, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pedagang, kompetisi atau persaingan antar pedagang, adanya komunikasi antar pedagang, adanya program dari pemerintah untuk PKL. Berdasarkan tinjauan pustaka tentang modal sosial maka dapat dibentuk tinjauan yang akan membentuk variabel penelitian kemudian dikelompokkan menjadi aspek sosial Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Modal Sosial

Aspek	Indikator	Variabel
Modal Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya organisasi pedagang • Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan • Kompetisi dan persaingan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan tentang tempat, waktu dan sarana usaha • Komunikasi antar stakeholder • Kerjasama kemitraan dengan
Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya 	

Sosial	komunikasi antar pedagang	PKL
Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program dari pemerintah terhadap PKL 	

Sumber : Hasil kajian teori, 2014

Berdasarkan tabel indikator diatas, didapatkan variabel dari indikator dari aspek sosial dari aspek modal sosial dengan indikator adanya organisasi pedagang serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan maka didapatkan variabel penyuluhan tempat, waktu dan sarana usaha, alasan pemilihan variabel tersebut adalah adanya organisasi diperlukan untuk manajemen dari pedagang oleh karena itu perlu adanya penyuluhan tentang tempat, waktu dan sarana usaha hal ini juga berkaitan dengan adanya program pemerintah terhadap PKL. Dari indikator kompetisi dan persaingan usaha maka pedagang perlu melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain guna melangsungkan kegiatan usahanya serta dari indikator adanya komunikasi antar pedagang dimaksudkan untuk dalam mengorganisir PKL dapat mudah ditata dan diatur, Hal ini hanya bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik antar stakeholder.

2.6 Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya Pedagang Kaki Lima

Sektor formal yang tumbuh dan berkembang di perkotaan dapat menarik minat para pedagang sektor informal untuk ikut andil dalam keteraturan kota yang ada, sebagai contoh, kegiatan industri, perdagangan dan jasa formal serta perumahan, selain itu, dilengkapi dengan prasarana lingkungan perkotaan berupa jalan dan berbagai sarana lainnya, menarik berbagai kegiatan lain yang saling terkait dengan kegiatan perkotaan tersebut. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya sektor informal terutama pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan pendukung kegiatan sektor formal tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima yang selalu menempati ruang publik, terutama di trotoar jalan,

bahu jalan, taman, dan tempat parkir telah mengakibatkan konflik kepentingan di ruang publik tersebut.

Sebagai aktivitas pendukung, keberadaan pedagang kaki lima tidak terlepas dari keberadaan sektor formal. Hal ini dapat dilihat dari interaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli yang terjadi. Menurut Hamid (1994: 90-91), dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di kota Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan bahwa di setiap berdirinya gedung bertingkat dan taman-taman kota, dapat dipastikan sejumlah pedagang kaki lima berderetan di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan kantor tersebut dan orang-orang yang melewati jalan-jalan kota.

Akibat dari kondisi diatas adalah semakin banyak munculnya masalah-masalah di perkotaan, terutama masalah pemanfaatan dan penataan ruang yang disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima. Masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Menciptakan kawasan-kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai karena terdapat tempat tinggal para pedagang sektor informal;
2. Kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan karena banyaknya limbah dan sisa pembuangan dari sampah pedagang kaki lima;
3. Secara tidak langsung menghambat proses penataan kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, mengingat banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
4. Kemacetan lalu lintas kota yang disebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang melebar ke bahu jalan dan jalan raya yang menyebabkan pengurangan kapasitas jalan yang ada.
5. Estetika dan keindahan kota yang terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik, baik di taman kota, *pedestrian ways*, maupun tempat-tempat publik lainnya.

Kondisi tersebut sangat tidak sesuai dengan tatanan fisik lingkungan perkotaan, sehingga perlu penataan elemen-elemen

yang serasi dan sesuai serta persyaratan perencanaan sehingga akan tercipta ruang kota yang sesuai dan serasi dengan lingkungan perkotaan.

2.7 Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pengendalian kegiatan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, pemberian izin, perlakuan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan untuk menciptakan tertib tata ruang (Rahmi, 2004). Arahan perizinan dalam pemanfaatan ruang berfungsi untuk :

- a. Sebagai dasar pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- c. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d. Menghindari dampak negatif dari penataan kota dan melindungi kepentingan umum;

Dalam mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang, diperlukan instrumen pengendalian yang mencakup seluruh aspek penataan ruang. Dalam hal ini, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang wilayah/daerah untuk mengarahkan pemanfaatan zona, terutama terkait erat dengan aktivitas kota yang berkembang yang seringkali memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum. Pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal penataan ruang, dimana daerah mempunyai hak penuh untuk melaksanakan penataan ruang di daerahnya. Pergantian sistem pemerintahan berdampak positif terhadap penataan ruang diantaranya adalah Pemerintah Daerah dapat mengawasi pembangunan di daerahnya masing-masing secara bertanggung jawab penuh sehingga pembangunan sesuai dengan aspirasi

masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan zona (*zone regulation*). Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikaji di atas tentang penataan ruang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat dua aspek yang mempengaruhi yaitu aspek pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang dan aspek dampak penataan ruang terhadap adanya pedagang kaki lima. Untuk lebih jelasnya kajian pustaka tentang penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Penataan Ruang

Aspek	Indikator	Variabel
Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkotaan menjadi kumuh • Penurunan kualitas lingkungan • PKL menghambat penataan kota • PKL menyebabkan kemacetan dan memakan badan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas lingkungan sekitar • Tingkat kemacetan
Pengendalian kegiatan Pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif kepada PKL dalam mendukung penataan kota • Sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan perizinan dan pemberian biaya dampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan operasional • Jenis alat peraga • Jarak yang diperbolehkan berdagang antar PKL • Perizinan lokasi

	pembangunan • Kriteria jenis PKL yang diijinkan berdagang • Lokasi berdagang PKL • Jam operasional PKL • Luas persebaran operasional PKL • Jenis alat peraga PKL	
--	---	--

Sumber : Hasil kajian teori, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari aspek dampak penataan ruang terhadap adanya PKL dengan indikator yang cenderung berkenaan dengan lingkungan maka variabel yang didapatkan yaitu tingkat kualitas lingkungan sekitar jadi dengan adanya PKL yang menempati suatu ruang kebersihan dan kualitas lingkungan juga harus diperhatikan. Kebanyakan PKL yang menempati ruang publik tidak bertempat dengan peruntukan lahannya akibatnya banyak PKL yang berada diruang-ruang publik, ditrotoar dan melube sampai ke badan-badan jalan. Hal ini akan berakibat pada lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan.

Untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang digunakan PKL makan perizinan lokasi harus diterapkan dalam pembahasan ini varibel luas kawasan operasional, jarak yang diperbolehkan berdagang antar PKL yang digunakan dengan memperhatikan indikator yang termasuk dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang.

2.7.1 Kewajiban dan Kewenangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan,

mengurangi konflik, dan dampak negatif pemanfaatan ruang serta menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif, serta sesuai dengan fungsi dan konsisten dengan rencana tata ruang (Kwanda, 2004). Oleh karenanya, pemerintah wajib menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses dan pelaksanaannya, pemerintah menjalankan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ini. Dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah mempunyai beberapa kewenangan dengan azas-azas sebagai berikut :

- Hak atas lahan (*Bundles of Right*), kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan
- Kewenangan pengaturan dan pengendalian (*Policy Power*). *Policy power* merupakan kewenangan dalam menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya.
- Penguasaan tertinggi atas lahan (*Eminent Domain*). Penguasaan tertinggi atas lahan dimungkinkan untuk diberlakukan apabila masyarakat menghendaki dan dengan alasan untuk kepentingan umum, pemanfaatan lahan yang telah ada dapat dilakukan tindakan pengambilalihan atau pencabutan hak atas tanah.
- Pajak dan Retribusi (*Taxation*). Pajak merupakan beban/pungutan/ pengenaan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/ kelompok, namun pengenaan tersebut hanya untuk masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak dinikmati langsung, bersifat paksaan, dan tidak diskriminasi.

2.8 Penelitian Sebelumnya Mengenai Upaya Penataan PKL

Pada Tabel 2.7 di bawah ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang menghasilkan rekomendasi mengenai konsep penataan PKL.

Tabel 2.7
Rangkuman Hasil Penelitian Studi kasus

No	Sumber	Aspek Penataan	Rekomendasi
1	Siti Azizah	Ketentuan tempat usaha PKL diwilayah Kota Surabaya yang diijinkan	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota • Telah terdaftar dipemerintah Kota Surabaya • Dapat ditampung dipasar lingkungan perkotaan, pusat perbelanjaan dan tempat yang ditetapkan • PKL yang tidak sesuai penempatannya akan di relokasi • Berada pada tempat-tempat atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan kepala daerah
2	Surtinevly	Alternatif konsep strategi	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat peraturan mana tempat yang dilarang dan mana tempat yang diperbolehkan • Menerapkan kebijakan PKL dan meningkatkan keprofesionalisme PKL • Melakukan pembinaan terhadap PKL • Menetapkan Bambu Kuning Plaza sebagai priorotas rencana penataan PKL • Melakukan penertiban PKL

			dan memindahkan pedagang ke bangunan Bambu Kuning Plaza
3	Hetty Oktaviana	Konsep penataan PKL berdasarkan karakteristik kegiatan dan karakteristik fisik (kawasan Ampel, Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Lokasi : <ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan Lokasi PKL di satu tempat dengan ciri-ciri tempat yang layak, strategis, aman tentram, tertata rapi dan bersih, dapat dijangkau konsumen, dan tidak lagi di gusur oleh aparat • Aspek Penataan : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan yang jelas, resmi/legal dan tidak berubah-ubah - Penataan harus dapat meningkatkan daya tarik kawasan • Aspek Alat Peraga : <ul style="list-style-type: none"> - Alat peraga yang dibuat sama dalam hal ukuran dan pemilihan tempat • Aspek Jalur Pejalan Kaki : <ul style="list-style-type: none"> - Diarahkan untuk memperlebar jalur pejalan kaki • Aspek Aturan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya kontinuitas petugas dalam mengatur PKL • Aspek lain : <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penertiban pengemis - Perlu bantuan modal - Adanya jaminan kemanusiaan

4	Bambang Wahyu Sudarmuji dan Sri Lestari Munajati 2005	Klasifikasi dan kajian special kawasan PKL di Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pembinaan : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan koperasi yang anggotanya para PKL - Pertumbuhan modal - Pemberian intensif retribusi - Penyerasian lapak - Penyediaan bantuan sarana usaha • Aspek Penataan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan jam operasi - Pembatasan kawasan usaha - Pembatasan luas usaha - Pengenaan disinsentif retribusi maupun -pajak bagi kawasan yang telah mengarah kepada penciptaan gangguan estetika • Aspek Penertiban: <ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan tempat usaha bagi pedagang yang mengganggu lalu lintas - Pengenaan disintensif retribusi maupun pajak untuk mencegah pengembangan - Penutupan usaha bagi PKL yang ternyata mengganggu
---	---	--	--

Sumber : Dirangkum dari berbagai hasil rekomendasi penelitian studi kasus terdahulu, (2014)

Dari tabel rangkuman hasil penelitian studi kasus mengenai penataan kawasan PKL, dapat dijelaskan bahwa penataan kawasan PKL mencakup di dalamnya adalah penataan mengenai lokasi PKL dan prinsip-prinsip penataan PKL yang berdasarkan atas karakteristik PKL. Keunggulan dari penelitian

yang telah dijelaskan pada tabek tersebut adalah secara spesifik telah membahas mengenai prioritas prinsip-prinsip penataan PKL kedalam aspek-aspek didalam penataan suatu kawasan.

2.9 Sintesa Tinjauan Teori

Dari hasil kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui indikator penelitian untuk menentukan variabel yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian. Adapun hasil sintesa tersebut adalah sebagai berikut :

2.9.1 Indikator dan Variabel Karakteristik PKL

Berdasarkan definisi dan karakteristik PKL seperti yang dijelaskan pada tinjauan teori, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik PKL di kawasan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sintesa Variabel Karakteristik PKL

Aspek	Indikator	Variabel
Aspek fisik	Menjual barang yang kecil	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang
	Usaha bermodal kecil	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Modal usaha
	Bentuk tempat berdagang	<ul style="list-style-type: none"> Sarana yang digunakan
	Keterbatasan cara berdagang	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pendidikan Tingkat keterampilan
	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Sumber tenaga kerja
	Kebutuhan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Luas lapak Status lapak
Aspek kegiatan	Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	<ul style="list-style-type: none"> Sifat berdagang Waktu berdagang Fungsi berdagang
	Interaksi pedagang	<ul style="list-style-type: none"> Adanya tawar menawar

Aspek psikologi PKL	Adanya penertiban dari Satpol PP	• Suasana psikologis
	Kondisi ekonomi	• Latar belakang menjadi PKL

Sumber : Hasil sintesa kajian pustaka, Penulis, 2014

2.9.2 Indikator dan Variabel Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan PKL

Berdasarkan hasil dari tinjauan teoritis maka dapat dirumuskan beberapa variabel yang dapat digunakan dalam penataan PKL Gelora sepuluh Nopember Tambaksari. Berikut beberapa variabel yang di sajikan pada tabel 2.9 :

Tabel 2.9
Penentuan Variabel

No	Aspek	Indikator	Variabel
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian suatu lahan • Kondisi lahan yang digunakan • Hasil yang diperoleh dari berdagang dilokasi yang strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga lahan • Status lahan • Tingkat pendapatan pedagang

2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya komunikasi antara stakeholder • Organisasi pedagang • Penigkatan taraf hidup dan kesejahteraan • Kompetisi dan persaingan usaha • Adanya Program pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan tentang tempat, waktu dan Sarana usaha • Komunikasi antar Stakeholder • Kerjasama Kemitraan dengan PKL
3	Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> • PKL menciptakan kawasan kumuh perkotaan • kualitas lingkungan kawasan mengalami penurunan • PKL menghambat proses penataan kota • Konflik kepentingan di ruang public • PKL menyebabkan kemacetan dan pengurangan kapasitas jalan lalu lintas kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas lingkungan sekitar • Tingkat kemacetan
4	Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak yang diperbolehkan berdagang antar PKL satu dengan yang lain • Ketentuan KDB, KLB, dan KDH untuk tata bangunan PKL • Insentif kepada PKL dalam mendukung penataan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan operasiaonal • Jenis alat peraga yang diijinkan • Jarak yang diperbolehkan berdagang antar PKL • Perizinan

		<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan perizinan dan pemberian biaya dampak pembangunan • Besaran pajak/retribusi kepada PKL • Kriteria jenis PKL yang diijinkan berdagang • Lokasi berdagang PKL • Jam operasional PKL • Besaran luas kawasan operasional PKL • Jenis alat yang diijinkan sebagai peraga PKL 	lokasi
--	--	--	--------

Sumber : Hasil sintesa kajian pustaka, Penulis, 2014

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalisme untuk menganalisa data yang ada. Pendekatan rasionalisme ini mengedepankan fakta empirik dengan kemampuan intelektual, yakni memakai fakta yang ada. Penelitian ini mencoba membuka realita yang digunakan berdasarkan empiri sensual, empiri logik, empiri teoritik, dan empiri etik. Pendekatan ini memandang ilmu yang valid dan terbukti koheren dengan sistem logikanya (Muhadjir, 1990).

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dengan model penelitian studi kasus (case study). Penelitian dilaksanakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau isu-isu baru yang ditunjukkan untuk kepentingan pendalaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang akan dijawab dalam penelitian.

Selain dengan eksploratif, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan penelitian prespektif yang digunakan untuk merumuskan tindakan dalam memecahkan masalah. Dalam studi ini, dilakukan pada waktu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember, sehingga pada akhirnya dapat merumuskan arahan penataan pedagang Kaki Lima (PKL) di Gelora Sepuluh Nopember.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel merupakan operasionalisasi sebuah konsep supaya dapat diteliti secara empiris (Wardiyanta, 2006). Sedangkan variabel penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam kelompok tersebut.

Variabel penelitian adalah hal yang diteliti dan memiliki ukuran, baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Variabel penelitian didapat dari hasil sintesa kajian pustaka pada Bab II dan pengorganisasian hasil sintesa tersebut akan menjadi variabel dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sasaran	Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Mengidentifikasi karakteristik PKL	Aspek Fisik PKL		
	Menjual barang berskala kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Barang 	Jenis komoditi barang yang diperdagangkan oleh PKL
	Usaha yang bermodal kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan 	Besarnya pendapatan yang diterima selama sebulan dalam berdagang
		<ul style="list-style-type: none"> • Modal usaha 	Sumber materi yang diperoleh untuk kegiatan berdagang
	Bentuk tempat berdagang	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana yang digunakan 	Media atau alat yang digunakan oleh PKL
	Keterbatasan cara berdagang	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan 	Tingkat pendidikan yang dimiliki PKL dalam menjalankan usahanya
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keterampilan 	Tingkat keterampilan yang dimiliki

			PKL dalam menjalankan usahanya
	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Tenaga kerja 	Sumber tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PKL untuk membantu menjalankan kegiatan usahanya
	Kebutuhan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lapak 	Ukuran ruang yang dibutuhkan untuk menampung barang dagangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Status lapak 	Keadaan tempat usaha pedangan dengan status kepemilikan
Aspek Kegiatan PKL			
	Pedagang yang menetap dan berpindah-pindah	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat berdagang 	- Cara yang digunakan oleh PKL untuk menjual barang dagangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Waktu berdagang 	- Waktu yang digunakan dalam menjalankan aktivitas usahanya
		<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi berdagang 	- Fungsi kegiatan PKL dalam menjalankan

			kegiatan usahanya
	Interaksi pedagang	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tawar menawar 	Hubungan yang terbentuk antara PKL dan konsumen dari aktivitas jual beli
Aspek Psikologi PKL			
	Adanya penertiban dari Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Suasana Psikologis 	Amenitas PKL dalam menempati lokasi PKL saat ini
	Kondisi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang menjadi PKL 	Alasan/motivasi yang melatarbelakangi menjadi PKL

Sumber : Penulis, 2014

Tabel 3.2
Variabel dan Definisi Operasional
dalam Menentukan Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan PKL

Sasaran	Aspek	Indikator	Variabel	Definisi Operasioanal
Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan Lokasi PKL di Gelora Sepuluh Nopember	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian suatu lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh harga lahan terhadap penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember
		<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lahan yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Status lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi lahan yang digunakan pedagang untuk berjualan
		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil yang diperoleh dari berdagang dilokasi yang strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran tingkat pendapatan Pedagang terhadap penataan PKL
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi pedagang • Adanya program pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan Tentang tempat, waktu, dan sarana usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh penyuluhan tentang tempat , waktu dan sarana usaha
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya komunikasi antar stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antar stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Komunikasi antar stkeholder terdap penataan PKL

		<ul style="list-style-type: none"> • Kompetisi dan persaingan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama kemitraan dengan PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh kerjasama kemitraan dengan PKL
	Dampak Penataan Ruang Terhadap Adanya Pedagang Kaki Lima	<ul style="list-style-type: none"> • PKL menciptakan kawasan kumuh perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualitas lingkungan sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan yang bebas dari sampah
		<ul style="list-style-type: none"> • kualitas lingkungan mengalami penurunan • PKL menghambat proses penataan kota • Konflik kepentingan di ruang publik • PKL menyebabkan kemacetan dan pengurangan kapasitas jalan lalu lintas kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemacetan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari adanya PKL
	Pengendalian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif kepada PKL dalam mendukung penataan kota • Sanksi terhadap PKL yang melanggar aturan perizinan dan pemberian biaya dampak pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas kawasan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Batasan luasan PKL yang berada di Gelora Sepuluh Nopember
			<ul style="list-style-type: none"> • Jenis alat peraga yang diijinkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis atau macam alat berdagang penjual
			<ul style="list-style-type: none"> • Jarak yang diperbolehkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan batasan lapak antar pedagang

		<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria jenis PKL yang diijinkan berdagang • Lokasi berdagang PKL • Jam operasional PKL • Besaran luas kawasan operasional PKL • Jenis alat yang diijinkan sebagai peraga PKL 	berdagang antar PKL <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya izin berdagang dari regulator
Merumuskan arahan penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember		Input dari sasaran 1 dan 2	Input dari sasaran 1 dan 2	

Sumber : Hasil Sintesa Kajian Pustaka, Penulis, 2014

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Gelora Sepuluh Nopember yang berkaitan dengan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam penelitian ini digunakan 2 macam Proses pengambilan sampel, untuk proses analisa pertama dengan sasaran mengidentifikasi karakteristik PKL yaitu dengan menggunakan random sampling para PKL yang berada di Gelora Sepuluh Nopember sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel.

Dimana : $n = N/(1+N \cdot e^2)$

n = jumlah responden

N = Jumlah Populasi

E = besar toleransi (0,1)

Sehingga, sampel total responden adalah :

$$n = 149/(1+149 \cdot (0,1)^2) = 100 \text{ responden}$$

$N = 149$ didapatkan dari jumlah PKL Gelora Sepuluh Nopember

Untuk sasaran kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Gelora Sepuluh Nopember digunakan teknik sampling *Purposive sampling*, dimana pemilihan sampel dipilih secara sengaja dan dengan tujuan tertentu. Patton (1990) menyebutkan bahwa terminology yang digunakan *purposive sampling* memiliki kelebihan berupa kemampuan dalam memiliki kasus kaya informasi (*information-rich cases*). Dengan kata lain melalui *purposive sampling*, sampel yang digunakan merupakan representasi dari kelompoknya dan dapat memberikan informasi yang spesifik berdasarkan pandangan kepentingan kelompok

tersebut sebanyak dan seakurat mungkin. Dimana dalam metode ini langsung menunjuk responden yang berkompeten atau berpengaruh dalam pencapaian sasaran akhir penelitian dengan menggunakan alat analisa stakeholder. Analisis stakeholder merupakan alat yang penting dalam memahami konteks sosial dan institusional dari suatu program, proyek, ataupun kebijaksanaan. Alat ini dapat menyediakan informasi awal dan mendasar tentang :

1. Siapa yang akan terkena dampak dari suatu program (dampak positif maupun negatif)
2. Siapa yang dapat mempengaruhi program tersebut (positif maupun negatif)
3. Individu atau kelompok mana yang perlu dilibatkan dalam program tersebut.
4. Bagaimana cara serta kapasitas siapa yang perlu dibangun untuk memberdayakan mereka berpartisipasi dalam program tersebut.

Tabel 3.3
Pemetaan Stakeholder

	Pengaruh rendah	Pengaruh tinggi
Kepentingan rendah	Kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya	Kelompok yg bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan tinggi	Kelompok stakeholder yang penting namun perlu pemberdayaan	Kelompok stakeholder yang paling kritis

Sumber : UNCHS Habitat, 2001

Objek *purposive sampling* untuk mencari faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember merupakan para stakeholder yang mewakili pemerintah, praktisi dan akademisi serta stakeholder lainnya yang terlibat dalam merumuskan arahan penataan PKL, stakeholder tersebut antara lain adalah :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Surabaya
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kota Surabaya
3. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya
4. Satpol PP
5. Akademisi atau pakar
6. Tokoh masyarakat sekitar PKL berdagang
7. Pengelola PKL binaan Gelora Sepuluh Nopember
8. Pengusaha PKL

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian (Bungin, 2001). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Survey Primer

Survey primer merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung (observasi lapangan), wawancara serta pengukuran-pengukuran langsung dikawasan studi. Survey primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi terjadi dengan melihat dan mendengar fakta yang ada tanpa harus mengambil sampel ataupun dengan mengambil sampel. Teknik pengumpulan data dari metode ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan langsung atau observasi lapangan

Pengamatan lapangan atau observasi kondisi eksisting juga dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan PKL Gelora Sepuluh Nopember secara spasial, sehingga dapat diketahui

karakteristik PKL yang saat ini cenderung diminati oleh para pedagang kaki lima.

b. Kuisioner

Penyebaran kuisioner kepada para responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Responden diminta untuk mengisi pertanyaan dengan salah satu jawaban yang telah disusun oleh peneliti. Adapun penyebaran kuisioner ini untuk mengidentifikasi karakteristik dari responden, yaitu PKL.

2. Survey Sekunder

Pengumpulan data sekunder oleh peneliti dilakukan secara tidak langsung ke obyek studi melalui penelitian tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi. survey sekunder dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu data dari sumber lain, berupa dokumen atau data-data yang dibukukan. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Survey instansi, yang didapatkan yaitu data yang berhubungan dengan kebijakan tata ruang (dokumen perencanaan wilayah), kebijakan perijinan usaha, data statistik demografi penduduk, data fasilitas perdagangan, dan data infrastruktur pendukung kawasan perdagangan. Data-data ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi eksisting kota Surabaya terkait pengalokasian ruang untuk PKL
- b. Survey literatur, eksplorasi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian, tugas akhir, tesis, serta artikel di internet dan media masa. Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL Gelora Sepuluh Nopember.

Tabel 3.4

Data Dari Perolehan Data Sekunder

No	Data	Sumber Data	Instansi Penyedia Data
1	Kebijakan penataan ruang, khususnya mengenai perdagangan, PKL, dan data pendukung lainnya	RTRW Surabaya 2013 dan sumber data pendukung	BAPPEKO dan Dinas Tata Kota Surabaya
2	Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kota, Rencana Transportasi Kota Surabaya dan prasarana pelengkap lainnya	RTRW Surabaya 2013 dan sumber data pendukung	BAPPEKO Surabaya
3	Kebijakan Perizinan pusat perdagangan khususnya sentra PKL	Peraturan Daerah Tentang kawasan perdagangan skala kecil	Disperindag Surabaya dan dan Dinas Koperasi dan UMKM
4	Demografi penduduk terutama jumlah PKL Tambaksari	Kecamatan Tambaksari dalam angka wilayah yang ada PKL dan sumber data pendukung atau UP terkait	BPS Kota Surabaya

Sumber: Hasil Analisis, 2014

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mengenerelasi suatu kondisi dari hasil responden yang diteliti. Analisis ini

bersifat memaparkan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari pengolahan data statistik deskriptif.

3.6.1 Identifikasi Karakteristik PKL sekitar Gelora Sepuluh Nopember

Analisis karakteristik PKL dilakukan untuk mengetahui karakteristik PKL di lokasi eksistingnya di kawasan penelitian. Dalam menganalisis karakteristik PKL di Gelora Sepuluh Nopember digunakan teknik analisis yaitu analisis statistic deskriptif. Analisis ini menjelaskan atau memaparkan data hasil pengamatan tanpa melakukan pengujian statistik. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel atau populasi yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel atau gambar. Sebagaimana diketahui bahwa analisis ini tidak dilakukan perhitungan dan uji statistik sehingga tidak bisa dilakukan inferensia terhadap hasil analisis ini. Statistik deskriptif merupakan prosedur-prosedur mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam satu bentuk bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti.

3.6.2 Menganalisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penataan PKL di sekitar Gelora Sepuluh Nopember

Untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL dilakukan dengan teknik analisis Delphi. Teknik analisis Delphi adalah teknik suatu usaha untuk memperoleh konsesnsus *group* yang dilakukan secara kontinyu sehingga diperoleh konvergensi opini Responden yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL yang dihasilkan dari analisa stakeholder.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah metode analisis Delphi akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara stakeholder

Stakeholder yang dimaksudkan disini ialah stakeholder yang telah ditentukan dalam sampel penelitian. Wawancara yang

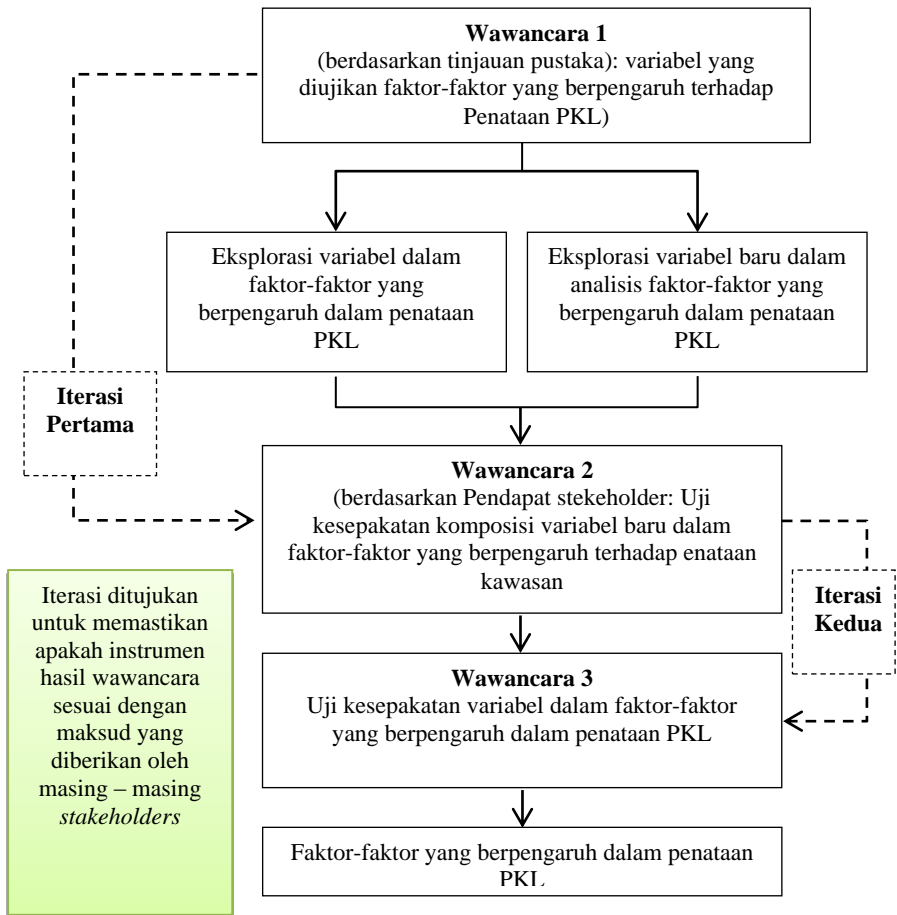
dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang telah dirumuskan pada studi literatur dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL .

2. Reduksi dan Tampilan Data Hasil Wawancara

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data dari transkrip hasil wawancara eksplorasi dengan stakeholder. Dari ringkasan hasil wawancara dan proses reduksi maka didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL berdasarkan pendapat para ahli

3. Iterasi dan Penarikan Kesimpulan

Iterasi ditujukan untuk memastikan apakah instrument hasil wawancara sesuai dengan maksud yang diberikan oleh masing-masing stakeholder. Dari hasil identifikasi instrument berdasarkan opini tiap-tiap stakeholder tersebut kemudian disederhanakan atau dikelompokkan secara substansial. Terhadap instrument lain yang belum disebutkan oleh semua stakeholder akan dilakukan *cross check* terhadap responden lainnya. Berikut adalah tahapan-tahapannya dalam melakukan analisa delphi :



Gambar 3.1
Tahapan Analisa Delphi

i. Merumuskan Arahkan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Setelah melakukan analisis untuk menentukan faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh

Nopember dengan menggunakan teknik analisa Delphi, langkah selanjutnya adalah merumuskan arahan penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember menggunakan alat analisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis ini menggunakan hasil inputan sasaran sebelumnya dengan 4 sumber pembandingan yaitu fakta empiri, studi literatur mengenai penataan PKL serta studi kasus mengenai penataan PKL dengan tambahan pendapat responden hasil wawancara sebagai pembandingan dalam merumuskan arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember

b. Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

1) Perumusan masalah

Dalam penelitian ini, langkah awalnya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang akan diangkat/ isu strategis dan urgensi dari tema yang akan kita ambil. Selanjutnya, isu strategis yang sudah di temukan akan dirumuskan ke dalam permasalahan-permasalahan secara lebih rinci yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima, dimulai dari mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima, dan arahan penataan PKL yang tepat untuk kawasan Gelora Sepuluh Nopember

2) Studi literatur

Studi literatur merupakan tahapan kedua dalam penelitian ini, pada tahap ini akan dikumpulkan segala informasi berupa suatu dokumen, artikel, jurnal, strategi dan konsep, dan hal-hal yang relevan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di mana setelah informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, setelah itu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan instrumen-instrumen atau variabel-variabel yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima (PKL) Tahapan ini akan berlangsung dari awal penelitian sampai ahkhir penelitian, hal

ini karena studi literatur akan sangat dibutuhkan dalam setiap analisa dan perumusan arahan penataan.

3) Pengumpulan data

Setelah adanya studi literatur dan adanya tema yang kita peroleh, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pengumpulan data, di mana pada tahapan ini sangat mempunyai peran penting hal ini karena data merupakan input awal yang akan di proses dalam analisa sebuah penelitian. Dalam pengumpulan data ini, kita akan dipandu denan instrumen – instrumen pengumpulan data, sehingga kita akan dengan mudah dalam melakukan pengumpulan data yang kita butuhkan. Sehingga sangat perlu untuk memperhatikan instrumen pengumpulan data yang digunakan dan validitas instrumen tersebut. Selain itu, kebutuhan data juga harus disesuaikan dengan proses analisis dan variabel yang digunakan dalam penelitian.

4) Analisa dan perumusan konsep

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh, analisa adalah tahapan yang menentukan bagaimana konsep dari penelitian kita. Analisa yang dilakukan mengacu kepada teori yang dihasilkan dari studi literatur sehingga tetap sesuai dengan *grand design* penelitian. Dari hasil analisa ini, kita akan mendapatkan sebuah arahan yang akan digunakan dalam penelitian tersebut

5) Penarikan Kesimpulan

Hasil dari proses analisa yang telah dilakukan akan menghasilkan kesimpulan jawaban berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada awal penelitian yang kemudian dikaji dalam analisa yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisa kemudian diusulkan rumusan arahan Penataan Pedagang kaki Lima di kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Tabel 3.5
Desain Penelitian

No	Sasaran	Tujuan	Teknik Analisa Data	Output
1	Identifikasi karakteristik PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Mengetahui karakteristik PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	<i>Statistic Descriptive</i>	Karakteristik PKL kawasan Gelora Sepuluh Nopember
2	Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Mengetahui faktor apa saja yang dapat digunakan sebagai Penataan PKL berdasarkan responden dari stakeholder terkait	<i>Analisis Delphi</i>	Faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL
3	Merumuskan Arahan Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Mengetahui arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Analisis Deskriptif Kualitatif	Arahan Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Sumber : Penulis, 2014

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Kondisi Eksisting Kelurahan Tambaksari

a. Keadaan Geografis

Kelurahan Tambaksari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tambaksari dan termasuk dalam wilayah Surabaya Timur. Luas dari Kelurahan Tambaksari kurang lebih ialah 65 ha. Luasan tersebut bisa dikatakan adalah luas yang paling sempit dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lainnya. Adapun batas administratif wilayah studi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Kapasari
Sebelah Timur	: Kelurahan Ploso
Sebelah Selatan	: Kelurahan Pacar Keling
Sebelah Barat	: Kelurahan Ketabang

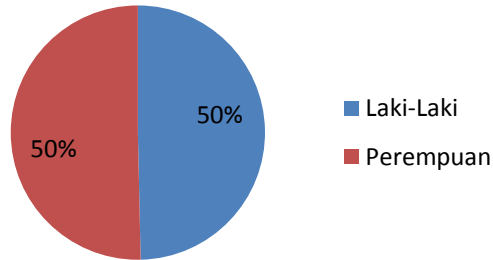
Kelurahan Tambaksari memiliki 9 RW dan 77 RT yang tersebar di dalam kawasan tersebut. Sedangkan jarak Kelurahan Tambaksari menuju ke kecamatan kurang lebih ialah sejauh 1 km.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kelurahan Tambaksari pada tahun 2013 adalah 22.090 jiwa, dengan jumlah penduduk yang berjenis laki-laki adalah sebanyak 10.968 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 11.122 jiwa.

c. Sarana dan Prasarana

untuk sarana dan prasarana yang berada di Kelurahan Tambaksari terdapat masjid dengan jumlah 6 unit, rumah sakit bersalin 1 unit, puskesmas pembantu 3 unit, lapangan sepakbola ada 2 unit. Untuk sarana pendidikan formal taman Kanak-Kanak ada 1 unit untuk negeri dan 7 unit untuk swasta, Sekolah Dasar 3 unit untuk negeri dan 1 unit untuk swasta. Keberadaan SMP dan SMU masing-masing satu unit.



Gambar 4.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Tambaksari
Berdasarkan Jenis Kelamin

4.1.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Studi

Secara umum wilayah penelitian merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Dalam kawasan penelitian terdapat sarana umum atau publik yang cukup membuat kawasan tersebut menjadi ramai. Keberadaan Stadion Gelora Sepuluh Nopember, Gelanggang Remaja serta taman Mundhu menjadi daya tarik sendiri di kawasan ini. Dari tingginya aktivitas yang timbul di kawasan penelitian ini menimbulkan berbagai permasalahan kota diantaranya kemacetan dan penurunan estetika kota yang disebabkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan penelitian. PKL dalam kawasan penelitian ini umumnya tersebar di depan Gelora Sepuluh Nopember, sekitaran taman Mundhu serta sepanjang jalan Tambaksari, dimana dalam melakukan aktivitasnya para PKL umumnya menempati badan jalan dan trotoar dengan sarana yang digunakan adalah beragam, mulai dari bangunan permanen, gerobak, maupun gelaran atau alas.

Pada awalnya PKL Gelora Sepuluh Nopember identik dengan pedagang kaos bolanya karena para pedagang ini biasanya berjualan ketika ada pertandingan sepakbola yang di selenggarakan di stadion tersebut. karena melihat adanya sebuah peluang usaha yang besar dengan letak yang strategis maka tak heran jika sekarang banyak pedagang yang berjualan di sekitaran Gelora Sepuluh Nopember. PKL yang berada di wilayah ini termasuk dalam PKL binaan dengan paguyuban PKL “ Mawar Merah”. Aktivitas para pedagang umumnya di batasi jam berjualanya yaitu PKL hanya boleh berjualan pagi-siang antara jam 6 sampai pukul sebelas siang kemudian boleh berjualan lagi antara jam 4 sore sampai pukul sebelas malam. Pedagang yang berada di sisi utara stadion kebanyakan berjualan kaos bola kemudian disisi tengah di buat perparkiran dan dilanjutkan disisi selatan berjualan aneka makanan dan minuman

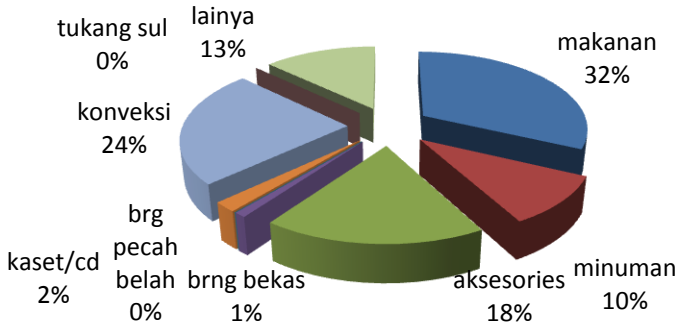
Di depan Gelora Sepuluh Nopember terdapat sebuah taman baru yaitu Taman Mundhu. Di taman ini terdapat air mancur yang jika pada malam hari terlihat bagus karena dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Banyak masyarakat yang memanfaatkan taman ini, untuk hari biasa pada malam hari biasanya dibuat sebagai tempat bersantai keluarga serta muda-mudi yang berkumpul. Pada waktu weekend di Taman Mundhu selalu ramai pengunjung hal ini yang membuat banyak pedagang yang tertarik untuk berjualan di sekitaran taman. Hal ini juga yang menjadi permasalahan karena banyak pedagang yang menempati trotoar jalan sehingga mengganggu para pengunjung taman serta kondisi perparkiran yang tidak dikelola dengan baik membuat para pengguna jalan yang melintas di depannya menjadi terhambat.

4.2. Karakteristik Aspek Fisik PKL di Kawasan Penelitian

A. Jenis Barang Dagangan

Karakteristik jenis barang dagangan di setiap lokasi eksistingnya di Kawasan penelitian dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :

Jenis Barang Dagangan

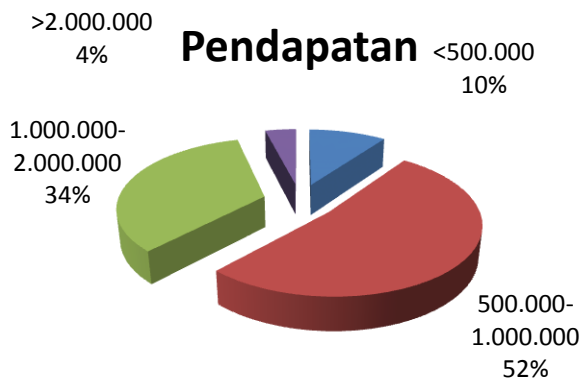


Gambar 4.2
Diagram Jenis Barang Dagangan

Dari gambar 4.2 dapat dijelaskan bahwa pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Gelora Sepuluh Nopember didominasi oleh dua jenis barang yang diperdagangkan yaitu penjual makanan dengan prosentase sebesar 32% kemudian penjual baju atau konveksi sebesar 24%. Penjual makanan sangat beragam pada wilayah penelitian karena waktu kegiatan pedagang beraktivitas. pada pagi dan malam hari cukup banyak pedagang menjual makanan. Pedagang yang menjual konveksi atau baju juga cukup banyak tetapi jumlahnya masih kurang banyak di bandingkan penjual makanan hal ini dikarenakan jumlah pedagang yang menjual kaos sudah dibatasi jumlahnya karena persaingan usaha. Akibatnya jumlah pedagang kaos tidak bertambah. Selanjutnya jenis barang aksesoris merupakan jumlah terbanyak ketiga yang dijual oleh pedagang di wilayah penelitian, jenis barang aksesoris termasuk penjual gelang, sabuk topi dan lainnya. Jenis barang ini cukup banyak diminati masyarakat untuk menambah gaya penampilan.

B. Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan nominal pendapatan yang diterima pedagang dalam kurun waktu satu bulan. Karakteristik tingkat pendapatan pedagang dikelompokkan menjadi empat (4), yaitu < Rp.500.000, Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000, dan >Rp 2.000.000. karakteristik tingkat di kawasan peneliiian dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini :



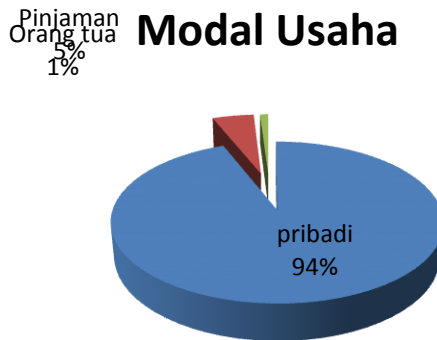
Gambar 4.3
Diagram Tingkat Pendapatan

Dari gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pedagang di kawasan Gelora Sepuluh Nopember memiliki tingkat pendapatan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, dengan prosentase sebesar 52%. Untuk pendapatan PKL > Rp. 2.000.000 memiliki prosentase 4% dari total responden.jumlah pendapatan pedagang juga dipengaruhi oleh barang yang didagangkan jika pedagang menjual barang dengan kualitas bagus dan jumlah banyak maka pendapatan pedagang akan bertambah banyak dan juga sebaliknya..Untuk pedagang yang berpendapatan Rp.1000.000-2.000.000 kebanyakan berdagang makanan dan konveksi yang menjual baju bola. Untuk pedagang yang berpendapatan Rp. 500.000-1.000.000 kebanyakan pedagang

tersebut menjual barang dalam jumlah sedang dan hanya pada waktu tertentu.

C. Modal Usaha

Sumber modal merupakan dana yang digunakan pedagang untuk membuka usahanya sebagai PKL. Sumber modal PKL umumnya dapat dikelompokkan menjadi sumber modal pribadi, pinjaman serta orang tua. Karakteristik sumber modal PKL dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :



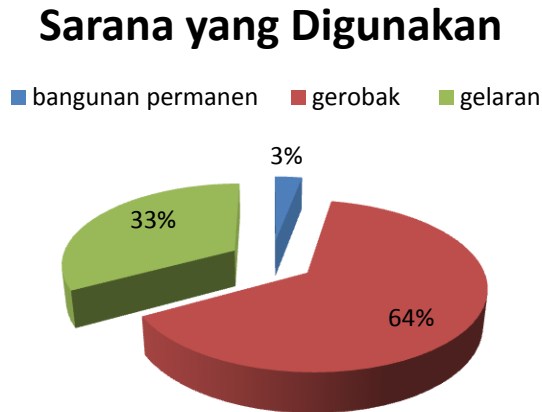
Gambar 4.4
Diagram Modal Usaha

Dari gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian memiliki karakteristik sumber modal berupa modal pribadi. Dimana prosentase untuk modal usaha pribadi sebesar 94%. Modal pribadi cukup mendominasi dalam sumber dana pedagang hal ini dikarenakan pedagang lebih memilih memodali sendiri kegiatan usahanya dari pada harus meminjam dari orang lain karena dirasa lebih menguntungkan

pedagang dari pada harus meminjam modal usaha karena selalu terpikir untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut.

D. Sarana Yang Digunakan

Sarana merupakan alat atau perlengkapan yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan aktivitasnya sebagai PKL. Umumnya sarana yang digunakan oleh pedagang berupa bangunan permanen, gerobak/rombong, dan gelaran/alas. Karakteristik sarana yang digunakan pedagang di kawasan penelitian dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :



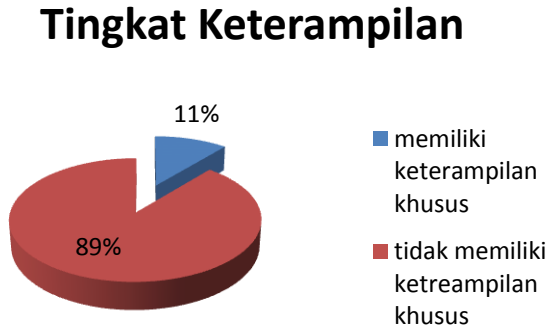
Gambar 4.5
Diagram Sarana Yang digunakan

Dari hasil diagram 4.5 dapat dijelaskan bahwa di kawasan penelitian pedagang umumnya menggunakan sarana berupa gerobak dengan prosentase sebesar 64%. Sedangkan bangunan permanen pada wilayah penelitian hanya mempunyai prosentase sebesar 3%. Di dalam kawasan penelitian ini pedagang yang banyak yang menggunakan gerobak karena pembatasan waktu kegiatan, oleh karena itu gerobak dipilih para pedagang sebagai

sarana berdagang karena dianggap lebih praktis untuk menjalankan kegiatan usahanya.

E. Tingkat Keterampilan

Tingkat keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki setiap pedagang untuk mendukung aktivitasnya sebagai PKL. Tingkat keterampilan PKL dapat di kelompokkan berupa pedagang yang memiliki keterampilan khusus dan pedagang yang tidak memiliki keterampilan khusus dalam menjalankan aktivitasnya sebagai PKL. Karakteristik tingkat keterampilan dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada diagram berikut ini :



Gambar 4.6
Diagram Tingkat Keterampilan

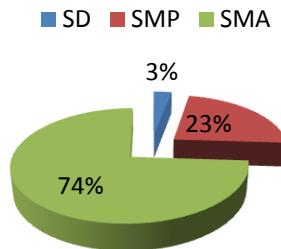
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian tidak memiliki keterampilan khusus.hal ini dapat dilihat dengan prosentase sebesar 89% sedangkan yang pedagang yang memiliki keterampilan khusus hanya mempunyai prosentase 11%. Kebanyakan pedagang yang berada dikawasan penelitian menggunakan kemampuan seadanya untuk menjalankan usahanya

sehingga tidak mempunyai strategi khusus (kreatifitas) dalam menjalankan usahanya. Hal ini nantinya akan berdampak pada pendapatan para pedagang. Untuk pedagang yang memiliki keterampilan khusus dilihat dari fungsi kegiatannya pedagang tersebut menawarkan pelayanan jasa, seperti tukang service kunci ,penjual stiker dan lainnya.

F. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan latar belakang pendidikan yang dimiliki setiap pedagang untuk mendukung aktivitasnya sebagai PKL. Tingkat pendidikan ini dikelompokkan menjadi SD, SMP, dan SMA. Karakteristik tingkat pendidikan ini dapat dijelaskan pada gambar berikut :

Tingkat Pendidikan



Gambar 4.7
Diagram Tingkat Pendidikan

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian memiliki tingkat pendidikan SMA dengan prosentase 74% serta pedagang yang memiliki tingkat pendidikan SD mempunyai prosentase sebesar 3%. Kebanyakan pedagang yang berada di wilayah penelitian hanya mampu bersekolah pada tingkat SMA. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan pedagang mulai dari faktor

ekonomi yang terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga tingkat kemauan pedagang sendiri untuk menuntut ilmu.

G. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan tenaga yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjalankan aktivitas berdagangnya. Lebih jelasnya sumber tenaga yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini sumber tenaga kerja dibedakan menjadi tiga yaitu sumber tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga, sumber tenaga kerja yang berasal dari kerabat serta sumber tenaga kerja yang berasal dari orang lain. Karakteristik tenaga kerja ini dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini :



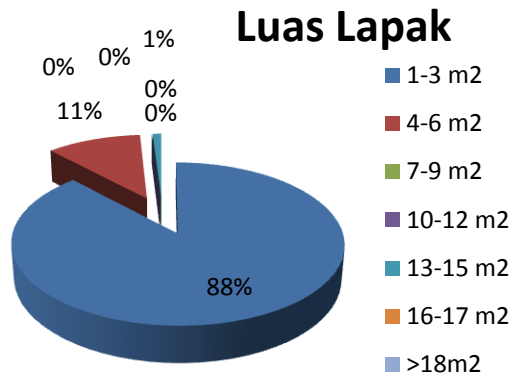
Gambar 4.8
Diagram Sumber Tenaga Kerja

Berdasarkan pada gambar diatas umumnya karakteristik sumber tenaga kerja yang digunakan oleh pedagang yaitu berasal dari anggota keluarga dengan prosentase sebesar 99%. Untuk

sumber tenaga kerja umumnya para pedagang menggunakan jasa anggota sendiri karena para pedagang tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membayar jasa orang dalam menjalankan usahanya.

H. Luas Lapak

PKL dalam menjual barang dagangnya tentunya harus memiliki lapak untuk menunjang aktivitas jual beli terhadap barang dagangan. Ukuran lapak antara pedagang satu dengan lainnya tidak sama. Pada penelitian ini luas lapak dibedakan menjadi menjadi tujuh klasifikasi. Yang pertama yaitu luas lapak pedagang antara 1-3 m², 4-6 m², 7-9 m², 10-12 m², 13-15 m², 16-17 m², dan > 18m². Untuk lebih jelasnya luas lapak dapat dijelaskan pada diagram berikut :



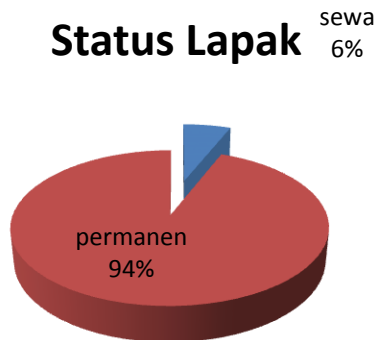
Gambar 4.9
Diagram Luas Lapak

Berdasarkan gambar diatas umumnya karakteristik pedagang di kawasan penelitian menggunakan lapak yang berukuran 1-3 m². Penggunaan lapak ini mempunyai prosentase sebesar 88%, sedangkan yang lainya pedagang mempunyai luasan

lapak antara 4-6m² dengan prosentase 11%. Luas lapak pedagang yang berada di Gelora Sepuluh Nopember kebanyakan berkisar antara 1-3 m² hal ini dikarenakan adanya pembangunan pedestrian di depan gedung Gelora yang mengakibatkan para pedagang harus berbagi luasan agar sama rata dan sama besar agar para pedagang bisa menjalankan usahanya.

I. Status Lapak

Status lapak merupakan hak kepemilikan pedagang atas lapak yang digunakan untuk kegiatan berdagang. Status lapak dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu status lapak hak sewa atas orang lain serta status lapak hak milik sendiri (permanen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 4.10
Diagram Status Lapak

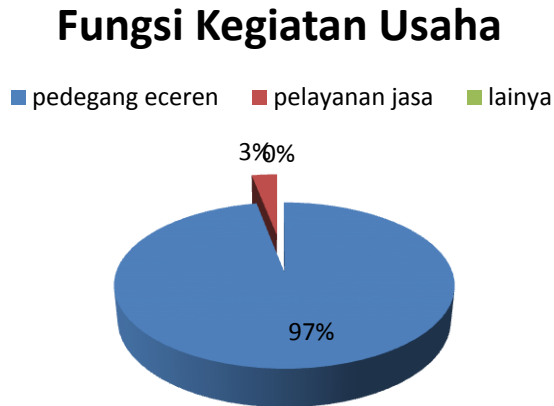
Berdasarkan gambar diatas PKL yang berada dikawasan studi umumnya menggunakan lapak atas hak milik sendiri atau permanen hal ini dapat dilihat dengan prosentase 94% sedangkan penggunaan lapak yang atas hak milik orang lain atau sewa hanya menunjukan prosentase sebesar 4%. Para pedagang dilokasi

penelitian umumnya menggunakan lapak yang sudah menjadi miliknya sendiri atau permanen hal ini dipilih pedagang agar tidak mengurangi pendapatan dalam berdagang terhadap biaya sewa yang dikeluarkan atas lapaknya.

4.2.1 Karakteristik Aspek Kegiatan PKL di Kawasan Penelitian

A. Fungsi Kegiatan

Fungsi kegiatan PKL dikawasan PKL dikawasan penelitian dibedakan menjadi fungsi pedagang eceran, pelayanan jasa, dan fungsi lainnya (hiburan dan sosial). Karakteristik fungsi kegiatan PKL dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada gambar berikut ini:



Gambar 4.11
Diagram Fungsi Kegiatan Usaha

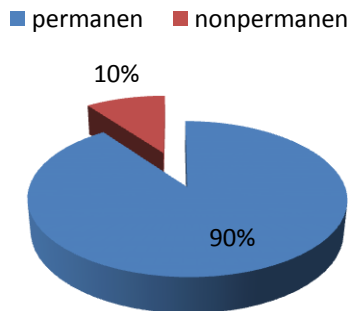
Dari gambar 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa umumnya penelitian berfungsi sebagai pedagang eceran, dimana prosentase untuk pedagang eceran sebesar 97%.sedangkan fungsi pelayanan jasa hanya sebesar 3%. Pedagang kaki lima yang

berada di lokasi penelitian mempunyai fungsi kegiatan usaha sebagai pedagang eceran hal ini dikarenakan kebanyakan pedagang juga mengambil barang dagangannya dari pedagang grosir yang berada di Pasar Kapasan dan PGS Surabaya.

B. Sifat kegiatan Usaha

Sifat kegiatan usaha PKL umumnya dibedakan menjadi permanen (menetap) dan non permanen (berpindah-pindah). Dimana karakteristik dari sifat PKL di kawasan penelitian dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :

Sifat Kegiatan Usaha



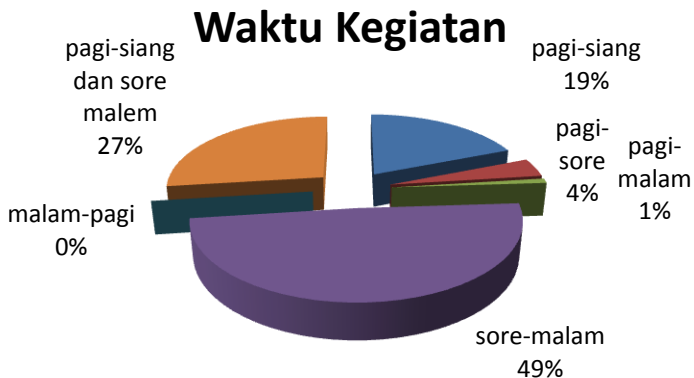
Gambar 4.12
Diagram Sifat Kegiatan Usaha

Dari gambar 4.12 dapat dijelaskan bahwa umumnya PKL di kawasan penelitian memiliki Karakteristik kegiatan usaha yang bersifat permanen atau menetap pada suatu tempat. Untuk sifat kegiatan usaha menetap memiliki prosentase 90%. Sedangkan untuk sifat kegiatan usaha yang berpindah-pindah atau non permanen memiliki prosentase sebesar 10%. Umumnya pedagang yang berada di lokasi penelitian merupakan pedagang permanen

karena pedagang permanen biasanya sudah menjadi anggota paguyuban PKL Gelora Sepuluh Nopember. Baik pedagang yang berjualan pagi-sore atau sore-malam kebanyakan pedagang yang menetap yang berjualan di lokasi penelitian. Ada juga pedagang yang berpindah-pindah berdasarkan survey lapangan pedagang yang berpindah-pindah umumnya bukan menjadi anggota dari paguyuban PKL, para pedagang tersebut tidak memiliki tempat berdagang yang resmi dan memiliki waktu terbatas dibandingkan pedagang yang menjadi anggota paguyuban PKL.

C. Waktu Kegiatan Usaha

Waktu kegiatan usaha PKL di kawasan penelitian dikelompokkan menjadi pagi-siang, pagi- sore, pagi – malam, sore-malam, dan malam - pagi. Sedangkan karakteristik untuk waktu kegiatan usaha PKL di kawasan penelitian dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 4.13
Diagram Waktu Kegiatan Usaha

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik waktu kegiatan PKL dikawasan penelitian pada umumnya melakukan aktivitas pada waktu sore – malam dengan prosentase

49%. Diwilayah penelitian ada juga pedagang yang berjualan pada waktu pagi-siang dan sore- malem, hal ini dikarenakan kebijakan dari paguyuban PKL yang membatasi waktu berjualan hanya sampai sianga dan boleh berjualan lagi pada waktu sore hari. Pedagang yang dengan waktu berjualan tersebut mempunyai prosentase sebesar 27%. Para pedagang kebanyakan berjualan pada waktu sore- malam berdasarkan survey dilapangan pedagang yang berdagang pada waktu tersebut lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan waktu lainnya hal ini disebabkan pengunjung ataupun pembeli pada malam hari lebih banyak dibandingkan pada waktu lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari waktu kegiatan pedagang ini yaitu tingkat pedapatan. Pedagang yang berjualan pada waktu pagi-siang dan sore-malem memiliki pendapatan yang lebih banyak daripada pedagang yang berdagang antara sore-malam.

D. Interaksi Pedagang

Karakteristik PKL berdasarkan interaksi dengan konsumen dapat dibedakan menjadi adanya tawar menawar dan tidak adanya tawar menawar. Dimana karakteristik PKL dikawasan penelitian berdasarkan interaksi yang terbentuk dengan konsumennya dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :

Interaksi Pedagang

■ adanya tawa menawar ■ tidak ada tawar menawar



Gambar 4.14
Diagram Interaksi Pedagang

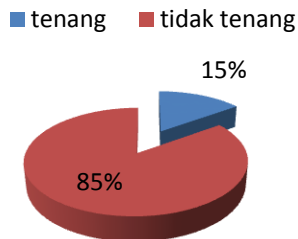
Dari gambar 4.14 dapat dijelaskan bahwa PKL dikawasan penelitian memiliki karakteristik interaksi yang terbentuk dengan konsumennya dengan cara tawar menawar, dengan prosentase sebesar 54%. Sedangkan prosentase sebesar 46% interaksi yang terbentuk tidak ada tawar menawar , interaksi yang seperti ini bisanya pedaganganya berjualan makanan. Pada aktivitas jual beli anantara pedagang dan konsumen umumnya terdapat tawar menawar antara pedagang dan pembeli begitu juga yang terjadi diwilayah penelitian interaksi tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang sesuai merupakan hal yang biasa terjadi diantara para pedagang dan konsumennya.

4.2.2 Karakteristik Aspek Psikologis PKL dikawasan Penelitian

A. Suasana Psikologis

Karakteristik suasana Psikologis PKL dapat dikelompokkan menjadi PKL dengan suasana Psikologis tenang dan PKL dengan suasana Psikologis tidak tenang, dimana untuk karakteristik suasana psikologis PKL di kawasan penelitian dapat dijelaskan pada gambar berikut :

Suasana Psikologis



Gambar 4.15
Diagram Suasana Psikologis

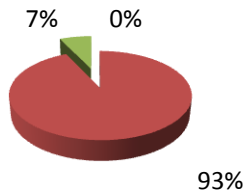
Dari gambar dapat dijelaskan bahwa pada umumnya suasana psikologis PKL di kawasan penelitian adalah tidak tenang, dengan prosentase 85%. Suasana yang tidak tenang ini muncul karena sewaktu-waktu PKL ditertibkan sehingga tidak diperbolehkan berjualan dilokasi penelitian. PKL yang kondisinya tenang dengan prosentase 15% biasanya PKL tersebut memiliki bangunan permanen sehingga tidak khawatir akan penertiban oleh pihak regulator. Suasana psikologis yang di hadapi para pedagang berbeda-beda. berdasarkan survey dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa pedagang yang tidak menetap dan memiliki bangunan permanen untuk berdagang mempunyai suasana psikologis yang tenang. Hal ini terjadi karena pedagang merasa tidak menetap di lokasi penelitian dan bangunan permanen yang milik beberapa pedagang sudah dianggap legal. Sehingga bila ada penertiban dari reglator dilokasi penelitian pedagang dengan karakteritik diatas mempunyai rasa aman dan tenang.

B. Latar Belakang Ekonomi Menjadi PKL

Karakteristik latar belakang ekonomi menjadi PKL dapat dikelompokkan menjadi pedagang yang terpaksa berprofesi sebagai PKL karena kesulitan hidup dan tidak memiliki tempat tinggal, pedagang yang berprofesi sebagai PKL karena masalah ekonomi, tetapi masih memiliki tempat tinggal, dan pedagang yang berprofesi sebagai PKL karena melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan. Karakteristik PKL berdasarkan latar belakang ekonomi menjadi PKL dikawasan penelitian dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Latar Belakang Menjadi PKL

- terpaksa krn memiliki kesulitan hidup dan tidak memiliki tmpat tinggal
- masalah ekonomi tapi memiliki tempat tinggal
- melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan



Gambar 4.15
Diagram Latar Belakang Menjadi PKL

Dari gambar 4.15 dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pedagang dikawasan penelitian memilih profesi sebagai PKL karena masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal dengan prosentase sebesar 93%. Untuk pedagang yang melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan memiliki prosentase sebesar 7 %. Kebanyakan PKL yang berada di lokasi penelitian memiliki latar belakang masalah ekonomi tetapi masih mempunyai tempat tinggal. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, kebanyakan pedagang hanya lulusan SMA sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup masih kekurangan sehingga emunculkan masalah ekonomi bagi pedagang. Adapun pedagang yang melihat potensi kawasan Gelora Sepuluh Nopember yang strategis sehingga membuat beberapa pedagang menganggap bahwa dikawasan penelitian merupakan kawasan yang menguntungkan untuk berjualan.

4.3 Pembahasan Mengenai Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Berdasarkan analisa yang dilakukan mengenai karakteristik PKL Gelora Sepuluh Nopember telah diketahui bahwa karakteristik pedagang yang dibedakan kedalam tiga aspek yaitu aspek fisik , aspek kegiatan dan aspek psikologis. Untuk karakteristik aspek fisik terdiri dari jenis barang, pendapatan, modal usaha, sarana yang digunakan, tingkat keterampilan, tingkat pendidikan, tenaga kerja, luas lapak dan status lapak. Pembahasan pertama mengenai

a. Jenis barang

jenis barang bahwa kebanyakan PKL menjual makanan hal tersebut dikarenakan kawasan Gelora Sepuluh Nopember mempunyai lokasi yang strategis dan berada dipinggir jalan kolektor sekunder. Konsumen yang datang cukup beragam ada yang bertempat tinggal di sekitaran kawasan penelitian ada juga pengendara yang lewat di depan stadion. Untuk pedagang yang menjual barang konveksi dimana pada kawasan ini identik dengan penjual kaos bola. Pedagang yang berjualan kaos bola ini akan bertambah jumlahnya ketika pada kawasan penelitian stadion diadakan pertandingan bola. Jenis barang mempunyai pengaruh terhadap penataan PKL dilihat dari faktor kebersihan lingkungan pedagnag yang menjual makanan dan minuman apabila pengelolaan limbahnya tidak diatur akan menimbulkan kesan kotor dan bau dibandingkan dengan penjual yang menjual aksesoris atau konveksi.

b. Pendapatan

Pendapatan pedagang di wilayah tergantung dari jenis barang yang diperdagangkan. Umumnya penjual makanan mempunyai pendapatan yang lebih besar , demikian juga dengan penjual konveksi seperti baju bola. Kedua pedagang yang menjual jenis barang tersebut mempunyai pendapatan yang lebih dibandingkan

pedagang yang menjual jenis barang lain. Selain itu waktu kegiatan berdagang pedagang juga mempengaruhi pendapatan pedagang. Karena pedagang yang memanfaatkan waktu berdagang lebih banyak pendapatannya akan semakin banyak pula. . Penataan PKL bisa dilihat dari tingkat pendapatan pedagang semakin kecil pendapatannya semakin mudah diatur karena para pedagang merasa lokasi yang ditempati kurang strategis

c. Modal Usaha

Kebanyakan pedagang menggunakan modal usaha sendiri untuk menjalankan kegiatan usahanya hal ini dipilih pedagang karena pedagang merasa dalam memakai modal sendirilebih menguntungkan daripada menjalankan usaha dari modal pinjaman. Dengan kata lain pikiran beban terhadap modal pinjaman lebih besar daripada modal sendiri. modal usaha bisa dijadikan arahan dalam penataan PKL di gelora sepuluh Nopember dengan pemberian modal usaha dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain. Untuk pengembalian modal usaha pedagang memiliki banyak opsi karena bantuan modal yang diberikan tidak terikat waktu dan tempat. Sehingga pedagang dengan mudah diarahkan.

d. Sarana Yang digunakan

Pedagang umumnya menggunakan gerobak dalam menjalankan usahanya hal ini dikarenakan adanya batasan waktu berdagang. Gerobak dipilih oleh pedagang karena dianggap lebih efisien dan praktis dalam hal bongkar pasang barang dagangan untuk kegiatan usaha. Pemilihan jenis sarana yang digunakan untuk penataan PKL mejadikan PKL terlihat dengan mudah ditata rapid an tidak menimbulkan kesan kmuh. Diharapkan penggunaan jenis sarana yang digunakan yang bisa dibongkar pasang dan efisien.

e. Tingkat Keterampilan

Pedagang yang berada dilokasi penelitian umumnya tidak memiliki tingkat keterampilan yang cukup. Hal ini akan berdampak pada cara pedagang dalam hal menjalankan kegiatan usahanya untuk menarik para pembeli.

f. Tingkat Pendidikan

Kebanyakan pedagang yang berada pada kawasan Gelora Sepuluh Nopember hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA. Hal ini akan berkaitan dengan latar belakang menjadi PKL karena masalah ekonomi. Melihat sulitnya mencari pekerjaan dengan jenjang lulusan SMA. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi penataan PKL dikawasan Gelora sepuluh Nopember, semakin tinggi tinngkat pendidikan seseorang maka orang tersebut akan semakin mudah memahami tentang peraturan yang berlaku dan dapat dengan mudah diarahkan untuk penataan para pedagang sendiri.

g. Tenaga Kerja

Sumber tenaga kerja yang digunakan oleh para pedagang di kawasan Gelora Sepuluh Nopember umumnya menggunakan sumber tenaga dari anggota keluarganya sendiri. Anggota keluarga lebih dipercaya pedagang untuk menjalankan usahanya. Hal lain yang berpengaruh yaitu para pedagang tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membayar orang dalam menjalankan usahanya sehingga tidak mempengaruhi pendapatan.

h. Luas lapak

Luas lapak yang digunakan pedagang pada kawasan penelitian berkisar antara 1-3 m². Pengaturan luas lapak ada karena lahan yang digunakan untuk berdagang semakin sempit hal ini disebabkan Karen a adanya pendestrian dikawasan penelitian yang melarang pedagang untuk berdagang diatas jalur pendestrian tersebut. pembatasan luas lapak juga memudahkan para pedagang untuk ditata karena masyarakat yang melihat

akan merasa pedagang tertata rapi dengan luasan lokasi yang ada terhadap pembatasan luas lapak yang digunakan.

i. Status Lapak

Dalam melakukan aktivitasnya pedagang memiliki lapak yang digunakan untuk berjualan . kebanyakan lapak dari para pedagang tersebut merupakan hak milik mereka sendiri atau permanen. hal ini akan berdampak pada pendapatan pedagang apabila lapak yang digunakan masih sewa, akibatnya pedagang mengeluarkan uang lebih untuk membayar sewa tersebut.

Dalam penjelasan mengenai karakteristik aspek fisik PKL, jenis barang dan sarana yang digunakan dapat dikaitkan dengan arahan penataan PKL karena dari jenis barang tersebut dapat dilihat dari segi kebersihan lingkungan. Penjual makanan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kebersihan karena sisa-sisa dari makanan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sampah basah dan bau tidak sedap. Untuk sarana yang digunakan pemilihan gerobak yang digunakan PKL untuk sarana berdagang membuat praktis dan efisiensi pedagang dalam bongkar pasar lapak daganganya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa PKL tidak kumuh dan mudah ditata.

Karakteristik Aspek Kegiatan PKL meliputi fungsi kegiatan usaha, sifat kegiatan usaha, dan waktu kegiatan usaha. Dalam hal ini waktu kegiatan usaha dapat dikaitkan dengan penataan PKL karena dilokasi penelitian PKL dibatasi oleh waktu dalam menjalankan aktivitas berdagangnya. Pembatasan waktu PKL pagi-siang antara pukul 06.00-12.00 dan boleh buka lagi pada waktu sore-malam antara pukul 16.00-23.00. pembatasan kegiatan waktu PKL ini dapat mengurangi kesan kumuh dan semerawut pada kawasan penelitian.

Karakteristik Aspek Psikologi PKL meliputi suasana psikologis PKL yaitu tenang dan tidak tenang dengan adanya penertiban oleh regulator karena keberadaanya menimbulkan

sejumlah masalah. Dengan suasana psikologis yang seperti ini maka pihak regulator seharusnya dapat dengan mudah dalam menata PKL. Pedagang cenderung akan menuruti aturan selama usaha mereka masih tetap bisa berjalan.

4.3.1 Analisa Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya

Dalam penentuan faktor-faktor yang berpengaruh digunakan analisa Delphi. Melalui analisa Delphi memungkinkan peneliti untuk dapat mengeksplorasi pendapat masing-masing responden terhadap setiap variabel yang diajukan dalam kuisioner. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di dapat dari studi literature yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Responden dalam analisis delphi ini didapatkan dari hasil analisis stakeholder dimana dijelaskan tugas dan posisi responden, sehingga responden mengerti dan memahami wilayah dan objek penelitian. Selanjutnya responden berperan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan PKL

Tabel 4.1
Responden Analisa Delphi

No	Nama Responden	Pekerjaan/Profesi
1	Bu Ema	Staff Dinas PU dan Cipta Karya Surabaya
2	Devri Novianto	Staff bidang ekonomi BAPPEKO Surabaya
3	Pak Hadi	Tim teknis lapangan Dinas Koperasi dan UMKM
4	Pak Nyoto	Kepala Satpol PP Kecamatan Tambaksari
5	Pak Eddy	Pengusaha PKL
6	Bu Suning	Dosen TataKota Unipa

7	Pak Mat	Ketua paguyuban PKL
8	Pak Iwan	Tokoh masyarakat

Sumber : Hasil Analisa , 2014

Kemudian setelah menentukan responden tersebut diatas, dalam mengeksplorasi pendapat responden peneliti menggunakan kuesioner wawancara dan panduan diskusi untuk membantu peneliti dalam proses wawancara. Penggunaan kuesioner wawancara tersebut memungkinkan responden untuk dapat mengungkapkan pendapatnya secara langsung dan lebih mendalam. Hal tersebut membantu peneliti dalam menentukan kecenderungan pendapat responden terhadap suatu faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya.

a. Wawancara Eksplorasi Analisis Delphi

Pada tahap ini yang dilakukan adalah penggalian (eksplorasi) pendapat dari para responden tentang faktor-faktor yang mendukung penataan PKL dapat dilihat pada lampiran. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan faktor tersebut adalah melalui wawancara. Dalam tahap ini responden boleh menambahkan faktor-faktor yang ditawarkan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Eksplorasi Delphi

No	Variabel yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Responden						R7	R8
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
1	Harga lahan	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	S
2	Status Lahan	S	S	S	S	S	S	S	S
3	Tingkat pendapatan pedagang	S	S	S	S	S	S	S	S
4	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Variabel yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Responden						R7	R8
		R1	R2	R3	R4	R5	R6		
5	Komunikasi antar stakeholder	S	S	S	S	S	S	S	S
6	Kerjasama kemitraan dengan PKL	S	S	S	S	S	S	S	S
7	Kualitas lingkungan sekitar	S	S	S	S	S	S	S	S
8	Kemacetan	S	S	S	S	S	S	S	S
9	Luas kawasan operasional	S	S	S	S	S	S	S	S
10	jenis alat peraga yang digunakan	S	S	S	S	S	S	S	S
11	Jarak yang digunakan berdagang PKL	TS	S	S	S	S	S	TS	S
12	Perizinan lokasi	S	S	S	S	S	S	S	S

Sumber : Analisa, 2014

Keterangan:

- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- R1 : Dinas Cipta Karya
- R2 : BAPPEKO Kota Surabaya
- R3 : Dinas Koperasi dan UMKM
- R4 : Satpol PP
- R5 : Pengusaha PKL
- R6 : Akademisi
- R7 : Ketua Paguyuban
- R8 : Tokoh Masyarakat

Dari hasil eksplorasi Delphi tahap 1 diperoleh pendapat dari responden mengenai faktor yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Untuk lebih jelasnya berikut berupa uraian mengenai hasil eksplorasi para responden.

1. Analisis Terhadap Variabel Harga Lahan

Terdapat 4 responden yang tidak menyetujui. Responden 1,2 dan 4 menyebutkan harga lahan tidak seberapa berpengaruh karena lahan yang ditempati merupakan bukan lahan milik PKL. Responden 6 dan 7 menyatakan harga lahan untuk keberlangsungan PKL tidak menjadi variabel yang berpengaruh karena seluruh PKL yang menempati kawasan tersebut merupakan bukan hak milik mereka dengan kata lain sewa lahan.

Responden yang menyetujui variabel ini menyebutkan harga lahan yang tinggi menyebabkan para pedagang enggan berjualan, pedagang cenderung lebih memilih harga lahan yang rendah dan murah untuk melangsungkan kegiatan.

2. Analisis Terhadap Variabel Status Lahan

Semua responden setuju bahwa variabel status lahan mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden 1,2,3,4,6 menyebutkan lahan yang digunakan para pedagang kebanyakan lahan bukan milik pribadi, lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah dan Bekas Tanah Kas Desa (BKTD). Responden lain juga menyebutkan kebanyakan PKL yang menempati suatu lahan mempunyai kecenderungan bahwa mereka menyewa lahan tersebut untuk berjualan.

3. Analisis Terhadap Variabel Tingkat Pendapatan Pedagang

Semua responden setuju bahwa variabel tingkat pendapatan pedagang mempengaruhi penataan PKL, responden 7,5 dan 3 menyebutkan bahwa para pedagang akan mempertimbangkan lokasi yang mempengaruhi pendapatan mereka. Jika pada lokasi awal pendapatan mereka mencukupi maka pedagang cenderung bertahan dengan lokasi yang ada. Responden lain menyebutkan bila pendapatan pedagang tinggi maka kebanyakan pedagang tidak mau dengan adanya pemindahan lokasi mereka dalam berjualan, responden 3 menyebutkan pedagang seharusnya lebih berani mengambil resiko terhadap pemindahan lokasi banyaknya

para pedagang yang beranggapan bahwa lokasi baru nantinya akan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka.

4. Analisis Terhadap Penyuluhan Tentang Waktu, Tempat, dan Sarana Usaha.

Semua responden menyetujui bahwa penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha mempengaruhi penataan PKL. Responden 2,3,4,5,7, dan 8 menyatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan bekal atau pengetahuan dalam melakukan kegiatan berdagang. Responden lain juga menyatakan pembinaan pedagang dilakukan dengan cara tersebut bisa membuka pandangan pedagang tentang cara berdagang yang efektif. Tujuan lain diharapkan nantinya PKL akan dengan mudah ditata dan diarahkan. Responden 5,6 dan 7 menambahkan bahwa pedagang yang telah mengikuti penyuluhan dapat dilihat dari sarana yang digunakan untuk berjualan yang menggunakan sarana yang mudah dan efisien.

Berdasarkan keterangan para responden, pembinaan pedagang dengan melakukan penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana berdagang membuat PKL dapat diarahkan dengan mudah, dengan bertambahnya pengetahuan akan cara berdagang PKL maka diharapkan PKL yang ada akan tertata dengan rapi.

5. Analisis Komunikasi Antar Stakeholder

Semua responden menyetujui bahwa komunikasi antar stakeholder mempengaruhi penataan PKL. Responden 3,4,dan 7 menyatakan perlunya komunikasi antar stakeholder dibutuhkan agar penyampaian tentang kebijakan di ketahui oleh semua stakeholder. Responden lain juga menambahkan dengan adanya komunikasi yang terjalin diharapkan PKL menjadi mudah diarahkan karena sebelumnya ia telah mengetahui tentang rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di okasi PKL bertempat tinggal. Responden 5 dan 6 menambahkan tidak adanya komunikasi antar stakeholder akan mengakibatkan kesulitan untuk menerapkan kebijakan yang telah diambil.

Berdasarkan keterangan para responden komunikasi perlu dilakukan guna memberikan pemahaman bersama supaya tidak ada kesulitan dalam penataan PKL, alur informasi yang tersampaikan akan mempermudah pemerintah untuk menjalankan program-program kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin sering melakukan komunikasi maka penerapan kebijakan untuk melaksanakan program-program penataan PKL dengan mudah dijalankan.

6. Analisis Terhadap Variabel Kerjasama Kemitraan Dengan PKL

Semua responden setuju bahwa kerjasama kemitraan dengan PKL mempunyai pengaruh terhadap penataan PKL. Responden 3,4, 5,dan 7 menyatakan dengan adanya kerjasama yang terjalin diharapkan akan dapat membantu PKL dalam melangsungkan usahanya. Responden lain menambahkan pedagang akan kesulitan jika usahanya tidak mendapatkan kerjasama kemitraan dalam hal ini bisa berupa pembentukan koperasi simpan pinjam untuk bantuan modal usaha.

Berdasarkan keterangan semua responden, kerjasama kemitraan dengan PKL dapat membantu kelangsungan usaha pedagang di gelora sepuluh nopember. Bagi para pedagang dan ketua paguyuban pembentukan koperasi merupakan solusi yang tepat untuk membantu modal usaha pedagang.

7. Analisis terhadap variabel kualitas lingkungan sekitar

Semua responden setuju bahwa kualitas lingkungan sekitar mempengaruhi penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember. Responden 2,4,5,6, dan 7 menyatakan bahwa kualitas lingkungan yang bersih menjadikan PKL terlihat tertata dan rapi sehingga apabila masyarakat melihat ,tidak menimbulkan kesan bahwa PKL kumuh. Responden lain juga menambahkan kualitas lingkungan menentukan respon masyarakat. Kebanyakan PKL makanan dan minuman perlu diperhatikan untuk pengelolaan limbahnya karena hasil limbah bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah

Berdasarkan keterangan semua responden, variabel kualitas lingkungan sekitar menyebabkan penataan PKL lebih mudah diarahkan dan ditata rapi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin bersih tempat berdagang maka respon masyarakat akan semakin besar dan baik.

8. Analisis Terhadap Variabel Kemacetan

Semua responden setuju bahwa kemacetan mempunyai pengaruh terhadap penataan PKL. Kebanyakan responden menyatakan para pedagang yang tidak tertata dengan rapi dan tidak menggunakan tempat yang semestinya akan menimbulkan dampak kemacetan. Responden 2,4,6 menambahkan banyaknya PKL yang menempati badan jalan dan trotoar menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas di sekitar wilayah PKL berjualan. Responden akademisi menambahkan pemerintah harus mengawal kebijakan tentang PKL lokasi PKL yang bertempat di badan jalan harus diperhatikan biasanya perparkiran yang tidak tertata dengan baik akan menimbulkan dampak penataan ruang bagi jalan

9. Analisis Terhadap Variabel Luas Kawasan Operasional

Semua responden setuju terhadap luas kawasan operasional mempengaruhi penataan PKL di kawasan gelora Sepuluh Nopember responden 1,4, dan 6 menyatakan bahwa luas kawasan operasional PKL harus dibatasi agar dalam mengarahkan PKL ada pembatasan jumlah PKL dengan kawasan yang ditempati. Responden 2 menambahkan kesan kumuh akan berkurang apabila para pedagang diatur dengan pembatasan lokasi terhadap jumlah PKL yang ada.

Berdasarkan keterangan para responden, luas kawasan operasional harus diatur dengan perbandingan antara jumlah PKL dengan lokasi yang ditempati PKL. Apabila dalam kegiatan berdagang luas kawasan berdagang PKL tidak diwasai, dampak yang terjadi membuat kesan PKL menjadi kumuh.

10. Analisis Terhadap Variabel Jenis Alat Peraga Yang Digunakan

Semua responden setuju bahwa jenis alat peraga yang digunakan mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Penggunaan alat peraga yang digunakan berdagang harus ditentukan. Responden 2,3,dan 4 menambahkan penggunaan alat peraga yang mudah dibongkar dan dipasang kembali, merupakan salah satu upaya penataan dalam bentuk fisik. Responden 6 juga menyatakan kebersihan PKL juga dapat dilihat dari jenis alat peraga yang digunakan.

Berdasarkan keterangan semua responden, jenis alat peraga yang digunakan harus diatur karena pemilihan jenis alat yang digunakan untuk berdagang bisa berdampak pada kesan dan kualitas lingkungan.

11. Analisis Terhadap Variabel Jarak Yang Digunakan Berdagang antar PKL

Terdapat dua responden yang tidak menyetujui variabel ini. Responden 1 menyebutkan jarak antar PKL yang digunakan antar berdagang bukan menjadi variabel yang berpengaruh dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember hal ini dikarenakan menurut Dinas Cipta Karya pengaturan jarak antar PKL untuk berdagang tergantung dari luasan lokasi PKL dalam hal ini luas PKL satu dengan yang lain berbeda. Responden 7 juga menyatakan PKL akan dengan sendirinya akan menyesuaikan jarak dan berbagi tempat dengan pedagang lain. Untuk responden yang setuju menyatakan dengan luasan lokasi PKL yang berbeda jarak antar PKL perlu diatur agar tidak menimbulkan kesan kumuh dan tidak tertata rapi.

12. Analisis Terhadap Variabel Perizinan Lokasi

Semua responden setuju bahwa variabel perizinan Lokasi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden dari pemerintah terkait menyatakan bahwa ijin yang digunakan untuk berdagang PKL harus jelas dan pasti, karena kebanyakan PKL banyak yang

tidak memiliki izin kepada pihak yang berwenang. Sedangkan dari pihak swasta dan masyarakat menyatakan bahwa pedagang mengeluarkan biaya tambahan untuk perizinan menempati suatu lokasi dalam berdagang. Responden 2 dan 3 juga menambahkan bahwa perijinan pedagang dalam menempati suatu lokasi sekarang dikembalikan pada aparat pemerintahan daerah setempat hal ini yang kemudian banyak menimbulkan pelanggaran tentang PKL.

A. Faktor Temuan Baru

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara dengan responden, ditemukan variabel baru yang didapatkan dari responden. Beberapa variabel baru tersebut adalah :

1. Respon Masyarakat Sekitar

Beberapa responden menambahkan variabel respon masyarakat sekitar. Menurut responden dari bappeko lokasi baru yang ditawarkan dari penataan PKL nantinya harus mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitar karena apabila mendapat respon yang baik maka masyarakat akan banyak mendatangi para pedagang. Dari Satpol PP juga menambahkan respon masyarakat sekitar juga harus dipertimbangkan karena kebanyakan PKL yang menempati suatu lokasi yang dekat dengan masyarakat diharapkan bisa menjaga kualitas lingkungan sekitar terkait kebersihan dan estetika kawasan.

2. Kesesuaian Dengan Peruntukan Lahan

Beberapa responden menambahkan variabel kesesuaian dengan peruntukan lahan. Responden 1 dan 2 berpendapat bahwa pedagang harus menempati lokasi berdagangnya yang sesuai dengan peruntukannya seperti penempatan pedagang di tanah asset Negara serta Bekas Tanah kas Desa (BTKD). Responden lain juga menambahkan harusnya pedagang menempati lahan yang bukan semestinya seperti contoh : ruang publik seperti trotoar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Biaya operasional

Responden dari pihak BAPPEKO dan Satpol PP menyatakan bahwa biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan pedagang untuk memperoleh sarana dan prasana atas kelangsungan berdagang mereka seperti kebutuhan listrik untuk penerangan, pmpberin toilet maupun air. Biaya operasional dikeluarkan pedagang untuk menunjang aktivitas mereka, kebanyakan pedagang menyewa lahan yang dimana di lahan tersebut buth biaya operasional untuk kebutuhan akan listrik aei dan toilet.

Agar terjadi kesepakatan dari semua responden terhadap faktor-faktor yang berpengaruh di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember dilakukan analisis Delphi tahap 2 atau iterasi 1. Pada Delphi tahap 2 ini terdiri dari variabel-variabel yang belum disetujui pada tahap 1 dan variabel temuan baru yang di dapat pada eksplorasi.

Tabel 4.3
Variabel Temuan Baru

Variabel	Keterangan
Harga Lahan	Belum Konsensus
Jarak yang digunakan Berdagang PKL	
Respon Masyarakat Sekitar	Faktor Baru
Kesesuain dengan peruntukan lahan	
Biaya Operasional	

Sumber : Hasil Analisa, 2014

B. Tahap II (Wawancara Iterasi I Analisis Delphi)

Setelah didapatkan hasil eksplorasi analisis Delphi, maka dilakukan pengembangan kuesioner pada tahap selanjutnya. Faktor yang belum mencapai konsensus dan penambahan faktor berupa faktor baru yang didapatkan dari tahap eksplorasi sebelumnya yang dijadikan basis dalam penyusunan kuesioner wawancara di tahap iterasi. Kuesioner wawancara Delphi pada

tahap iterasi ini pada dasarnya sama dengan kuesioner tahap 1, namun faktor yang ditanyakan merupakan faktor yang belum mencapai konsensus dan faktor baru yang didapatkan dari pendapat para responden.

Responden dalam tahap ini sama dengan responden dalam tahap sebelumnya. Pada tahap ini diperlukan penggalan pendapat responden terhadap faktor-faktor yang belum mencapai konsensus dan faktor tambahan. Pendapat masing-masing responden dalam tahap iterasi ini dapat dilihat pada lampiran, sedangkan hasil iterasi pendapat responden secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Delphi Tahap II

No	Variabel yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Responden							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1	Harga lahan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
2	Biaya operasional	S	S	S	S	S	S	S	S
3	Respon masyarakat sekitar	S	S	TS	TS	S	S	S	S
4	Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	S	S	S	S	S	S	S	S
5	Kesesuain dengan peruntukan lahan	S	S	S	S	S	S	S	S

Sumber : Analisa, 2014

Keterangan:

- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- R1 : Dinas Cipta Karya
- R2 : BAPPEKO Kota Surabaya
- R3 : Dinas Koperasi dan UMKM
- R4 : Satpol PP
- R5 : Pengusaha PKL
- R6 : Akademisi
- R7 : Ketua Paguyuban PKL
- R8 : Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara iterasi I diatas, Analisis Delphi terkait variabel yang berpengaruh dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember masih belum terdapat consensus dari para responden. Berikut adalah penjelasan dari variabel-variabel dalam kuisioner tahap kedua.

1. Analisis Variabel Harga Lahan

Dari hasil wawancara iterasi 1 akhirnya dicapai konsensus atau kesepakatan bahwa harga lahan yang berada di kawasan Gelora sepuluh Nopember bukan menjadi variabel yang berpengaruh terhadap penataan PKL. Semua responden sepakat bahwa harga lahan tidak mempengaruhi penataan PKL yang ditinjau dari aspek ekonomi. Responden 1,2,4,6,dan 7 pada tahap eksplorasi menyatakan harga lahan tidak berpengaruh terhadap penataan PKL karena para pedagang berdagang diatas lahan yang bukan menjadi lahan permanen milik mereka. Responden 3,5dan 8 yang pada tahap eksplorasi setuju merubah pendapatnya menjadi tidak setuju karena menurut mereka lahan tempat berjualan pedagang berada di ruanng-ruang public dan tidak mungkin untuk pedagang membeli lahan disana maka dari itu variabel harga lahan dianggap tidak memiliki pengaruh dalam penataan PKL.

2. Analisis Variabel Biaya Operasional

Semua responden setuju bahwa biaya operasional menjadi variabel yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan gelora Sepuluh Nopember. Responden 2 dan 3 menyebutkan bahwa pedagang memerlukan penerangan untuk menlangsungkan aktivitas mereka. Dalam hal ini pedagang membutuhkan listrik yang disuplai dari pengelola sekitar dengan dikenakan biaya listrik. Responden lain menambahkan untuk kebersihan lokasi para pedagang juga dikenakan biaya kebersihan. Dilihat dari aspek ekonomi responden dari akademisi menambahkan bahwa pengelolaan PKL memerlukan biaya lebih untuk membantu kegiatan mereka dalam hal ini pengeluaran biaya tersebut juga akan mempengaruhi pendapatan mereka.

3. Analisis Variabel Respon Masyarakat Sekitar

Semua responden setuju bahwa respon masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL di Kawasan gelora sepuluh Nopember. Responden 2,6,7 dan 8 menyatakan bahwa keberadaan PKL harus melihat kegiatan serta aktivitas masyarakat sekitar, selama keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar PKL boleh beraktivitas di kawasan Gelora Tambaksari dan apabila sebaliknya PKL yang ada mengganggu masyarakat sekitar seperti melubernya PKL akibat tidak adanya pengawasan dari pengelola yang mengakibatkan kemacetan karena para pedagang sampai kebadan jalan. Contoh lain yang ditambahkan responden adalah aspek kebersihan PKL apabila tidak diawasi dengan baik maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena mengganggu ketertiban umum maka masyarakat sekitar bisa saja mengusulkan untuk mengusir PKL karena dianggap telah mengganggu.

Responden 3 dan 4 tidak setuju respon masyarakat mempengaruhi penataan PKL. responden tersebut menyatakan bahwa pengetahuan akan pengambilan tindakan atas keberadaan PKL yang mengganggu dianggap kurang. Kebanyakan masyarakat tidak tahu kemana mereka akan mengadakan

permasalahan PKL. Responden 4 menambahkan musyawarah yang telah dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat sekitar belum mampu untuk menampung respon masyarakat. Hal ini dianggap bahwa tokoh masyarakat belum bisa mewakili keinginan masyarakat sekitar.

4. Analisis Variabel Jarak yang Digunakan Berdagang Antar PKL

Responden 1 dan 7 pada awalnya tidak setuju kemudian mengubah pernyataanya menjadi setuju bahwa jarak yang digunakan berdagang antar PKL mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden 1 menyatakan pengaturan jarak yang digunakan untuk berdagang diperlukan untuk menata PKL agar para pedagang terlihat tertata rapi. Responden 7 juga menambahkan bahwa jarak yang digunakan antar PKL berdagang harus disesuaikan dengan luasan lokasi PKL yang mereka tempati. Responden 3 dan 6 mengatakan bahwa pembatasan jumlah PKL terkait dengan jarak yang disesuaikan antar PKL berdagang dengan pemanfaatan lokasi yang ada. Maka dari itu menurut responden lainnya pengaturan jarak PKL berdampak pada kesan PKL yang tertata dan rapi.

5. Analisis Variabel Kesesuaian Dengan Peruntukan Lahan

Semua responden setuju bahwa kesesuaian dengan peruntukan lahan menjadi variabel yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden yang berasal dari pemerintahan menyatakan bahwa keberadaan PKL harus mempertimbangan kesesuaian dengan peruntukan lahan. Responden 3 menambahkan bahwa pada tahun ini penataan PKL lebih terfokus pada sentra-sentra PKL. Responden 2 juga membenarkan bahwa lokasi sentra-sentra PKL yang telah dikaji oleh pemerintah telah ditetapkan kebijakannya untuk penataan PKL. Responden 6 juga menyatakan keberadaan PKL yang menempati lahan sesuai dengan peruntukannya akan meminimalkan konflik penataan ruang.

Berdasarkan penjelasan tentang hasil iterasi pertama terdapat variabel yang belum disetujui dengan semua responden. Agar terjadi kesepakatan dengan semua responden terhadap penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh nopember perlu dilakukan analisis Delphi tahap 3 atau iterasi 2

C. Wawancara Tahap III (Iterasi II)

Wawancara iterasi II ini dilakukan untuk mendapatkan hasil consensus dari para responden, terkait variabel harga lahan semua responden tidak setuju bahwa harga lahan mempengaruhi penataan PKL dalam hal ini variabel harga lahan telah mencapai consensus dan dihilangkan. Variabel respon masyarakat sekitar belum mencapai kesepakatan pada saat wawancara iterasi 1. Pada dasarnya, kuesioner wawancara Delphi pada tahap iterasi II sama dengan kuesioner tahap 1 dan tahap 2, namun faktor yang ditanyakan merupakan faktor yang belum mencapai konsensus saja. Responden dalam tahap ini pun sama dengan responden dalam tahap sebelumnya.

Berikut merupakan hasil wawancara iterasi II terhadap para responden. Pendapat masing-masing responden dalam tahap iterasi ini dapat dilihat pada Lampiran, sedangkan hasil iterasi pendapat responden secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Hasil Analisa Delphi Tahap III

No	Variabel yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember	Responden							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1	Respon Masyarakat Sekitar	S	S	S	S	S	S	S	S

Sumber: Hasil analisa, 2014

Keterangan:

- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- R1 : Dinas Cipta Karya
- R2 : BAPPEKO Kota Surabaya
- R3 : Dinas Koperasi dan UMKM
- R4 : Satpol PP
- R5 : Pengusaha PKL
- R6 : Akademisi
- R7 : Ketua Paguyuban PKL
- R8 : Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara iterasi II, akhirnya didapatkan kesepakatan dari para responden mengenai Variabel respon masyarakat sekitar. Dari 8 responden terdapat 6 responden yang setuju dengan karena respon masyarakat dianggap berpengaruh. Dua responden yang pada iterasi I tidak setuju akhirnya merubah pendapatnya menjadi setuju. Responden tersebut berpendapat bahwa respon masyarakat sangat tergantung dari faktor kebersihan PKL serta kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar terhdap keberadaan PKL.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Penataan PKL

Pada pembahasan diatas didapatkan variabel yang berpengaruh terhadap penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember dengan menggunakan analisis delphi. Setelah mendapatkan variabel yang consensus maka akan ditarik menjadi beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL.

1. Analisis Variabel Biaya Operasional

Semua responden setuju bahwa biaya operasional menjadi variabel yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan gelora Sepuluh Nopember. Responden 2 dan 3 menyebutkan bahwa pedagang memerlukan penerangan untuk melangsungkan aktivitas mereka. Dalam hal ini pedagang membutuhkan listrik yang disuplai dari pengelola sekitar dengan dikenakan biaya

listrik. Responden lain menambahkan untuk kebersihan lokasi para pedagang juga dikenakan biaya kebersihan. Dilihat dari aspek ekonomi responden dari akademisi menambahkan bahwa pengelolaan PKL memerlukan biaya lebih untuk membantu kegiatan mereka dalam hal ini pengeluaran biaya tersebut juga dapat mempengaruhi pendapatan mereka. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor besaran biaya operasional**.

2. Analisis Terhadap Variabel Status Lahan

Semua responden setuju bahwa variabel status lahan mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden 1,2,3,4,6 menyebutkan lahan yang digunakan para pedagang kebanyakan lahan bukan milik pribadi, lahan yang digunakan merupakan aset pemerintah dan Bekas Tanah Kas Desa (BKTD). Responden lain juga menyebutkan kebanyakan PKL yang menempati suatu lahan mempunyai kecenderungan bahwa mereka menyewa lahan tersebut untuk berjualan. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor Status lahan yang digunakan PKL**

3. Analisis Terhadap Variabel Tingkat Pendapatan Pedagang

Semua responden setuju bahwa variabel tingkat pendapatan pedagang mempengaruhi penataan PKL, responden 7,5 dan 3 menyebutkan bahwa para pedagang akan mempertimbangkan lokasi yang mempengaruhi pendapatan mereka. Jika pada lokasi awal pendapatan mereka mencukupi maka pedagang cenderung bertahan dengan lokasi yang ada. Responden lain menyebutkan bila pendapatan pedagang tinggi maka kebanyakan pedagang tidak mau dengan adanya pemindahan lokasi mereka dalam berjualan, responden 3 menyebutkan pedagang seharusnya lebih berani mengambil resiko terhadap pemindahan lokasi banyaknya

para pedagang yang beranggapan bahwa lokasi baru nantinya akan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor besaran tingkat pendapatan pedagang.**

4. Analisis Terhadap Penyuluhan Tentang Waktu, Tempat, dan Sarana Usaha

semua responden menyetujui bahwa penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha mempengaruhi penataan PKL. Responden 2,3,4,5,7, dan 8 menyatakan bahwa penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan bekal atau pengetahuan dalam melakukan kegiatan berdagang. Responden lain juga menyatakan pembinaan pedagang dilakukan dengan cara tersebut bisa membuka pandangan pedagang tentang cara berdagang yang efektif. Tujuan lain diharapkan nantinya PKL akan dengan mudah ditata dan diarahkan. Responden 5,6 dan 7 menambahkan bahwa pedagang yang telah mengikuti penyuluhan dapat dilihat dari sarana yang digunakan untuk berjualan yang menggunakan sarana yang mudah dan efisien

Berdasarkan keterangan para responden, pembinaan pedagang dengan melakukan penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana berdagang membuat PKL dapat diarahkan dengan mudah, dengan bertambahnya pengetahuan akan cara berdagang PKL maka diharapkan PKL yang ada akan tertata dengan rapi. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **Faktor Adanya Pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha.**

5. Analisis Komunikasi Antar Stakeholder

Semua responden menyetujui bahwa komunikasi antar stakeholder mempengaruhi penataan PKL. Responden 3,4,dan 7 menyatakan perlunya komunikasi antar stakeholder dibutuhkan agar penyampaian tentang kebijakan di ketahui oleh semua stakeholder. Responden lain juga menambahkan dengan adanya

komunikasi yang terjalin diharapkan PKL menjadi mudah diarahkan karena sebelumnya ia telah mengetahui tentang rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di okasi PKL bertempat tinggal. Responden 5 dan 6 menambahkan tidak adanya komunikasi antar stakeholder akan mengakibatkan kesulitan untuk menerapkan kebijakan yang telah diambil.

Berdasarkan keterangan para responden komunikasi perlu dilakukan guna memberikan pemahaman bersama supaya tidak ada kesulitan dalam penataan PKL, alur informasi yang tersampaikan akan mempermudah pemerintah untuk menjalankan program-program kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin sering melakukan komunikasi maka penerapan kebijakan untuk melaksanakan program-program penataan PKL dengan mudah dijalankan. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **Faktor Terjalinya Komunikasi antar stakeholder**

6. Analisis Terhadap variabel Kerjasama Kemitraan Dengan PKL

Semua responden setuju bahwa kerjasama kemitraan dengan PKL mempunyai pengaruh terhadap penataan PKL. Responden 3,4, 5,dan 7 menyatakan dengan adanya kerjasama yang terjalin diharapkan akan dapat membantu PKL dalam melangsungkan usahanya. Responden lain menambahkan pedagang akan kesulitan jika usahanya tidak mendapatkan kerjasama kemitraan dalam hal ini bisa berupa pembentukan koperasi simpan pinjam untuk bantuan modal usaha.

Berdasarkan keterangan semua responden, kerjasama kemitraan dengan PKL dapat membantu kelangsungan usaha pedagang di gelora sepuluh nopember. Bagi para pedagang dan ketua paguyuban pembentukan koperasi merupakan solusi yang tepat untuk membantu modal usaha pedagang. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor adanya kerjasama antar stakeholder**

7. Analisis Terhadap Variabel Kualitas Lingkungan Sekitar

Semua responden setuju bahwa kualitas lingkungan sekitar mempengaruhi penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember. Responden 2,4,5,6, dan 7 menyatakan bahwa kualitas lingkungan yang bersih menjadikan PKL terlihat tertata dan rapi sehingga apabila masyarakat melihat ,tidak menimbulkan kesan bahwa PKL kumuh. Responden lain juga menambahkan kualitas lingkungan menentukan respon masyarakat. Kebanyakan PKL makanan dan minuman perlu diperhatikan untuk pengelolaan limbahnya karena hasil limbah bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah

Berdasarkan keterangan semua responden, variabel kualitas lingkungan sekitar menyebabkan penataan PKL lebih mudah diarahkan dan ditata rapi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin bersih tempat berdagang maka respon masyarakat akan semakin besar dan baik. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor pengaruh lingkungan sekitar terhadap adanya PKL**

8. Analisis Terhadap Variabel Kemacetan

Semua responden setuju bahwa kemacetan mempunyai pengaruh terhadap penataan PKL. Kebanyakan responden menyatakan para pedagang yang tidak tertata dengan rapi dan tidak menggunakan tempat yang semestinya akan menimbulkan dampak kemacetan. Responden 2,4,6 menambahkan banyaknya PKL yang menempati badan jalan dan trotoar menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas di sekitar wilayah PKL berjualan. Responden akademisi menambahkan pemerintah harus mengawal kebijakan tentang PKL lokasi PKL yang bertempat di badan jalan harus diperhatikan biasanya perparkiran yang tidak tertata dengan baik akan menimbulkan dampak penataan ruang bagi jalan. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **timbulnya kemacetan akibat adanya PKL**

9. Analisis Terhadap Variabel Luas Kawasan Operasional

Semua responden setuju terhadap luas kawasan operasional mempengaruhi penataan PKL dikawasan gelora Sepuluh Nopember responden 1,,4, dan 6 menyatakan bahwa luas kawasan operasional PKL harus dibatasi agar dalam mengarahkan PKL ada pembatasan jumlah PKL dengan kawasan yang ditempati. Responden 2 menambahkan kesan kumuh akan berkurang apabila para pedagang diatur dengan pembatasan lokasi terhadap jumlah PKL yang ada.

Berdasarkan keterangan para responden, luas kawasan operasional harus diatur dengan perbandingan antara jumlah PKL dengan lokasi yang ditempati PKL. Apabila dalam kegiatan berdagang luas kawasan berdagang PKL tidak diwasai, dampak yang terjadi membuat kesan PKL menjadi kumuh. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **Faktorluasan kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL.**

10. Analisis terhadap Variabel Jenis Alat Peraga yang Digunakan

Semua responden setuju bahwa jenis alat peraga yang digunakan mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Penggunaan alat peraga yang digunakan berdagang harus d tentukan. Responden 2,3,dan 4 menambahkan penggunaan alat peraga yang mudah dibongkar dan dipasang kembali, merupakan salah satu upaya penataan dalm bentuk fisik. Responden 6 juga menyatakan kebersihan PKL juga dapat dilihat dari jenis alat peraga yang digunakan.

Berdasarkan keterangan semua responden, jenis alat peraga yang digunakan harus diatur karena pemilihan jenis alat yang digunakan untuk berdagang bisa berdampak pada kesan dan kualitas lingkungan. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan

Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor penggunaan jenis alat peraga.**

11. Analisis Terhadap Jarak yang Digunakan Berdagang antar PKL

Semua responden setuju bahwa jarak yang digunakan antar PKL berdagang harus diatur, hal ini dikarenakan pengaturan jarak berdagang antar PKL dapat membuat PKL terkesan rapi dan tertata. Responden 2,3,5 menambahkan bahwa PKL dapat diatur dengan pengaturan jarak berdagang antar PKL karena jumlah pedagang dapat dibatasi dengan area berdagang PKL yang ada.

Berdasarkan keterangan semua responden, jarak antar pedagang PKL harus diatur untuk memberi kesan rapi dan tertata antar pedagang, dengan pengaturan tersebut maka akan berdampak pada jumlah PKL yang berada di Gelora Sepuluh Nopember. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **pengaruh jarak yang digunakan berdagang PKL.**

12. Analisis Terhadap Variabel Perizinan Lokasi

Semua responden setuju bahwa variabel perizinan Lokasi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden dari pemerinah terkait menyatakan bahwa ijin yang digunakan untuk berdagang PKL harus jelas dan pasti, karena kebanyakan PKL banyak yang tidak memiliki izin kepada pihak yang berwenang. Sedangkan dari pihak swasta dan masyarakat menyatakan bahwa pedagang mengeluarkan biaya tambahan untuk perizinan menempati suatu lokasi dalam berdagang. Responden 2 dan 3 juga menambahkan bahwa perijinan pedagang dalam menempati suatu lokasi sekarang dikembalikan pada aparat pemerintahan daerah setempat hal ini yang kemudian banyak menimbulkan pelanggaran tentang PKL. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora

sepuluh Nopember yaitu **faktor adanya perizinan lokasi yang jelas.**

13. Analisis Variabel Respon Masyarakat sekitar

Semua responden setuju bahwa respon masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penataan PKL di Kawasan gelora sepuluh Nopember. Responden 2,6,7 dan 8 menyatakan bahwa keberadaan PKL harus melihat kegiatan serta aktivitas masyarakat sekitar, selama keberadaan PKL tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar PKL boleh beraktivitas dikawasan Gelora Tambaksari dan apabila sebaliknya PKL yang ada mengganggu masyarakat sekitar seperti melubernya PKL akibat tidak adanya pengawasan dari pengelola yang mengakibatkan kemacetan karena para pedagang sampai kebadan jalan. Contoh lain yang ditambahkan responden adalah aspek kebersihan PKL apabila tidak diawasi dengan baik maka akan menimbulkan keresahan dimasyarakat. Karena mengganggu ketertiban umum maka masarakat sekitar bisa saja mengusulkan untuk menggusur PKL karena dianggap telah mengganggu.

Responden 3 dan 4 tidak setuju respon masyarakat mempengaruhi penataan PKL. responden tersebut menyatakan bahwa pengetahuan akan pengambilan tindakan atas keberadaan PKL yang mengganggu dianggap kurang. Kebanyakan masyarakat tidak tahu kemana mereka akan mengadakan permasalahan PKL. Responden 4 menambahkan musyawarah yang telah dilakukan dengan menggandeng tokoh masyarakat sekitar belum mampu untuk menampung respon masyarakat. Hal ini dianggap bahwa tokoh masyarakat belum bisa mewakili keinginan masyarakat sekitar. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktorrespon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL**

14. Analisis Variabel Kesesuaian Dengan Peruntukan Lahan

Semua responden setuju bahwa kesesuaian dengan peruntukan lahan menjadi variabel yang berpengaruh dalam

penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember. Responden yang berasal dari pemerintahan menyatakan bahwa keberadaan PKL harus mempertimbangan kesesuaian dengan peruntukan lahan. Responden 3 menambahkan bahwa pada tahun ini penataan PKL lebih terfokus pada sentra-sentra PKL. Responden 2 juga membenarkan bahwa lokasi sentra-sentra PKL yang telah dikaji oleh pemerintah telah ditetapkan kebijakannya untuk penataan PKL. Responden 6 juga menyatakan keberadaan PKL yang menempati lahan sesuai dengan peruntukannya akan meminimaisir konflik penataan ruang. Sehingga dari pendapat responden tersebut dapat ditarik faktor yang mempengaruhi penataan di kawasan Gelora sepuluh Nopember yaitu **faktor kesesuaian peruntukan lahan bagi PKL**

Berikut merupakan hasil analisis Delphi terkait faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di Kawasan Gelora sepuluh Nopember.

Tabel 4.6
Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan PKL di
Kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

No	Faktor yang berpengaruh
1	Besaran biaya operasional
2	Status lahan yang digunakan PKL
3	Besaran tingkat pendapatan pedagang
4	Adanya Pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha
5	Terjalinya Komunikasi antar stakeholder
6	Adanya kerjasama kemitraan dengan PKL
7	Pengaruh lingkungan sekitar terhdap adanya PKL
8	Tmbulnya kemacetan akibat adanya PKL
9	Luasan kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL
10	Penggunaan jenis alat peraga.
11	Pengaruh jarak yang digunakan berdagang PKL
12	Adanya perizinan lokasi yang jelas.

13	Respon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL
14	Kesesuaian peruntukan lahan bagi PKL

Sumber: Hasil Analisa, 2014

4.5 Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Dalam perumusan arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember, analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pada tahap ini perumusan arahan penataan PKL diperoleh dengan mengkomparasikan hasil sasaran sebelumnya terkait relevansi penataan PKL berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dengan tinjauan literature dan kebijakan terkait.

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil sasaran sebelumnya diperoleh beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember

2. Tinjauan Literatur

Tinjauan Literatur yang digunakan mencakup hasil penelitian terdahulu terkait penataan PKL dan teori-teori terkait penataan PKL

3. Tinjauan kebijakan

Kebijakan yang digunakan berupa undang-undang peraturan serta kebijakan terkait penataan dan pengelolaan PKL

4. Responden

Pendapat responden digunakan sebagai pembandingan dalam arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember

4.5.1 Arahan Penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember dengan Menggunakan Analisa Deskriptif Kualitatif

Dari sasaran sebelumnya diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Setelah diperoleh hasil dari sasaran 2 maka tahap

selanjutnya adalah merumuskan arahan penataan PKL dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan sumber data yang dipergunakan dalam analisa adalah hasil analisa dari sasaran sebelumnya, tinjauan literature mencakup hasil penelitian terdahulu terkait penataan PKL dan teori-teori terkait penataan PKL, tinjauan kebijakan yang digunakan berupa undang-undang peraturan serta kebijakan terkait penataan dan pengelolaan PKL, serta pendapat responden yang digunakan sebagai masukan dalam merumuskan arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Dengan mengkombinasikan keempat sumber data tersebut, maka akan dihasilkan arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Sebelumnya faktor-faktor dari sasaran berikutnya akan dikelompokkan kedalam beberapa aspek guna meringkas arahan yang sudah ada, pada bab ini akan dijelaskan pengelompokan faktor tersebut sebagai berikut: aspek pembinaan PKL, aspek lingkungan, aspek kebijakan, aspek manajemen lahan, aspek ekonomi.

- **Aspek Pembinaan**

Dalam aspek pembinaan PKL terdapat beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam kelompok kegiatan PKL, faktor-faktor tersebut antara lain : faktor adanya pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha, penggunaan jenis alat peraga, terjalinya komunikasi antar stakeholder dan adanya kerjasama kemitraan dengan PKL

- 1. Faktor adanya pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat, dan sarana usaha.**

Berdasarkan hasil dari analisa dengan adanya penyuluhan membuat pengetahuan pedagang bertambah. Dalam hal ini pedagang mengetahui bagaimana tatacara berdagang yang baik dan tidak mengganggu, dengan penyuluhan juga diharapkan pedagang akan lebih tertib dengan peraturan atau kebijakan yang

dikeluarkan serta dapat terjalin suatu bentuk interaksi dan kerjasama dengan PKL

Dalam pada pembahasan sebelumnya faktor diatas termasuk kedalam aspek sosial tetapi pada bab ini faktor adanya pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat, dan sarana usaha masuk dalam kelompok aspek pembinaan. Hal ini dikarenakan pedagang yang mendapat penyuluhan akan memiliki pengetahuan terkait cara berdagang dalam penggunaan tempat, sarana berdagang serta waktu yang sesuai untuk para pedagang melakukan aktivitasnya. Pembahasan diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pembinaan dari pihak pemerintah diharapkan pedagang nantinya akan dapat diatur dan ditata dengan mudah tanpa menimbulkan konflik.



Gambar 4.17
Tendanisasi PKL

Sumber: Survey Primer, 2014

PKL yang berada pada kawasan Gelora Sepuluh Nopember jika dilihat dari karakteristik jenis barang dagangan yang umumnya terdapat penjual makanan dan konveksi kaos bola dengan penggunaan alat peraga berupa gerobak. Dalam menjalankan aktivitas berdagangnya pemilihan sarana usaha berupa gerobak merupakan alat peraga yang mudah ringkas dan efisien. Dalam hal ini faktor penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha memiliki pengaruh terhadap penataan PKL. Para pedagang yang berada di Gelora Sepuluh Nopember sudah berusaha untuk mau ditata dengan pembatasan waktu berjualan, serta menggunakan sarana gerobak yang mudah dan efisien hal ni

dikarenakan dahulu pedagang pernah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

Berdasarkan tinjauan literatur terkait penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember didapatkan penelitian bahwa tujuan penyuluhan menurut Elastriany (2000) dan Asmaria, 2007 yaitu mengubah mental manusia atau masyarakat secara terperinci. Meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan keterampilan pedagang dan perubahan sosial. Dalam hal ini pedagang yang biasanya berdagang tanpa diberi adanya penyuluhan cenderung menjajakan barang dagangannya secara apa adanya hal ini tentu akan mempengaruhi konsumen yang akan membeli, berbeda dengan pedagang yang sudah di beri penyuluhan, pedagang akan cenderung kreatif dalam menata barang dagang dalam menarik minat pembeli

Berdasarkan kebijakan yang berhubungan dengan penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha terdapat dalam Perda no 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL bab IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain, c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, d. peningkatan kualitas alat peraga. Dalam hal ini penyuluhan yang diberikan sebagai pengetahuan pedagang untuk menarik minat konsumen. Penggunaan jenis alat peraga serta pengemasan barang yang didagangkan juga ikut berpengaruh dalam menarik minat konsumen

Berdasarkan pendapat dari responden untuk penyuluhan tentang, waktu tempat, dan sarana usaha disebutkan bahwa para pedagang harus lebih kreatif dan menarik dalam menjajakan barang dagangannya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan pedagang semata-mata untuk menarik minat konsumen agar mau membeli barang dagangnya. Berbeda dengan pedagang yang minim pengetahuan akan cara berdagang, pedagang seperti ini

biasanya menggunakan alat peraga seadanya, pemilihan letak lapak dan kurangnya penerangan untuk menunjang kegiatan berdagangnya. Dalam implementasinya penyuluhan yang diberikan pihak regulator yang dihadiri oleh perwakilan pedagang biasanya oleh ketua paguyuban, dari hasil pembinaan dan penyuluhan banyak informasi yang kurang tersampaikan pada pedagang karena perwakilan dari pedagang kurang informatif terhadap anggotanya

Dari beberapa sumber diatas dapat diketahui arahan penataan yang sesuai, terkait penyuluhan waktu, tempat dan sarana usaha yaitu **intensitas penyuluhan diatur sebulan sekali, pemilihan wakil PKL yang bertanggungjawab serta pemberian papan pemberitahuan tentang tata cara berdagang.**

2. Faktor penggunaan jenis alat peraga

Berdasarkan hasil analisa terkait faktor penggunaan jenis alat peraga dapat diketahui penggunaan jenis alat peraga perlu diatur dalam penataan lokasi PKL serta pemilihan alat peraga yang efisien dan mudah dibongkar pasang. Dalam hasil analisa tersebut pedagang yang berada di kawasan Gelora Sepuluh Nopember untuk penggunaan alat peraga perlu diatur, kebanyakan penggunaan alat peraga yang berada di kawasan tambaksari menggunakan jenis alat peraga gerobak , Karena pembatasan waktu berdagang PKL, pemilihan gerobak sendiri sebagai alat peraga

Berdasarkan tinjauan penelaian sebelumnya terkait dengan penggunaan jenis alat peraga widjyanti, (2009) menyatakan bahwa masing-masing jenis bentuk sarana berdagang memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi pengaturan dan penataan ruang untuk PKL. Penelitian lain juga menyebutkan sarana fisik berdagang PKL dikelompokkan menjadi Pikulan, gelaran, meja, gerobak , warung semi permanen dan kios. (wawaroentoe,1973). Dalam penelitian tersebut memiliki pengertian penggunaan alat peraga dapat diatur sesuai dengan

luasan kawasan PKL berdagang. Dari luasan tersebut penggunaan alat peraga juga berbeda-beda. Banyak penggunaan jenis alat peraga yang digunakan dalam PKL yang berada di kawasan Gelora Sepuluh Nopember kebanyakan menggunakan gerobak dan gelaran.



Gambar 4.18
Penggunaan Alat Peraga yang Seragam

Sumber: Survey Primer, 2014

Berdasarkan tinjauan terkait penggunaan jenis alat peraga dalam upaya penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember dapat dihubungkan dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi ketentuan perundang-undnagan, b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan bupati atau walikota, c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, d. menempatkan dan menata barang dagangan dan /jasa serta peralatan dagang yang tertib dan teratur, e. tidak mengganggu laulintas dan kepentingan umum, pasal 15 jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak antara lain gelaran lesehan tenda shelter dan bermotor dan tidak bermotor

Perda No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 3 kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : a. Menetapkan dan mengatur waktu

kegiatan, b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL, c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan, d. Mengatur alat peraga. Berdasarkan kebijakan diatas pengaturan alat peraga yang digunakan bertujuan untuk menata PKL agar terlihat rapi dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan pendapat beberapa responden terkait dengan penggunaan jenis alat peraga dalam upaya penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya menyatakan bahwa penggunaan jenis alat peraga berupa gerobak, gelaran dan tenda bisa menjadikan PKL mudah diatur dan tertata rapi. Dalam hal ini penggunaan gerobak atau alat peraga yang efisien sangat diutamakan untuk memudahkan upaya penataan PKL

Berdasarkan dari beberapa sumber diatas terkait penataan PKL dikawasan Gelora sepuluh Nopember, dengan penggunaan jenis alat peraga maka arahan yang didapatkan yaitu **pemilihan jenis alat peraga yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang seperti gerobak serta melakukan tendanisasi untuk memberi kesan tertata rapi.**

3. Faktor terjalannya komunikasi antar stakeholder

Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa dengan adanya komunikasi yang terjalin antar stakeholder, maka informasi yang diterima terkait kebijakan akan mudah dipahami oleh PKL dalam adanya upaya penataan. Dalam hal ini dengan adanya komunikasi yang baik diharapkan pedagang mampu menyadari dan sadar akan kebijakan-kebijakan yang dikelaurkan oleh pihak regulator yang nantinya diharapkan akan ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pihak regulator dan pedagang. Pada PKL Gelora Sepuluh Nopember dengan adanya komunikasi yang baik maka pedagang akan cenderung mematuhi peraturan yang ada. Pelibatan pedagang dalam suatu kebijakan akan mengangkat moril pedagang karena merasa dianggap oleh pemerintah.

Dalam pembahasan sebelumnya faktor terjalanya komunikasi masuk dalam aspek sosial. Dalam bab ini faktor tersebut masuk

kedalam aspek pembinaan karena dengan adanya komunikasi yang baik antara stakeholder dengan pedagang maka dalam upaya penataan pedagang akan cenderung lebih mudah diatur. PKL yang berada di gelora sepuluh nopember mematuhi kebijakan yang ada, karena sebelumnya para pedagang sudah mengetahui upaya penataan yang dilakukan agar kegiatan berdagang mereka tetap berlangsung. Berdasarkan kondisi eksisting terdapat tendanisasai serta penyelarasan penggunaan alat peraga yang digunakan hal ini menunjukkan bahwa denagan komunikasi yang baik maka pedagang akan lebih mudah diatur dan ditata. Pedagang dengan jenis makanan minuman dan konveksi baju bola juga merasakan dampak dari terjalinya komunikasi antar stakeholder dalam upaya pentaan pihak regulator bersama-sama pedagang membuat kebijakan yang berlaku.

Pada tinjauan literatur menyebutkan komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisai yang berbentuk dialog ,aupun sarahsehan (Syafardy, 2012). Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi untuk penanganan pedagang bentuk komunikasi dapat berupa dialog maupun sarahsehan kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pedagang agar pedagang dapat mudah diatur karena sudah diberikan pemahaman terkait upaya penataan.

Berdasarkan kebijakan terkait komunikasi antar stkeholder dapat dihubungkan dalam Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 30 PKL mempunyai hak anantara lain; a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL, b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan, c. mendapatkan informasi sosialisasi ,pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan., d. mendapatkan pengaturan penataan , pembinaan dan supervise dan pendampinagan dalam pengembangan usahanya. Dalam upayanya untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan penataan pembinaan dan pendampingan pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik

antar stakeholder agar dalam upaya pemenuhan hak para pedagang dapat tercapai dan selaras. Dengan komunikasi yang baik kebijakan-kebijakan akan dapat diterapkan dengan sesuai dengan peraturanya

Berdasarkan pendapat responden dalam faktor komunikasi antar stakeholder. Beberapa responden menyatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi terkait kebijakan, pemerintah selaku regulator melakukan dialog dengan perwakilan pedagang dalam upaya penataan PKL. Responden lain juga menyatakan bahwa komunikasi dapat dilakukan secara lisan dan tulisan untuk secara lisan biasanya dilakukan pada saat dialog dan secara tulisan biasanya dilakukan dengan memberikan surat edaran terkait kebijakan pengaturan dan penataan PKL

Dari beberapa sumber diatas didapatkan arahan penataan PKL berdasarkan faktor komunikasi antar stakeholder. Berikut arahan yang dijadikan dalam upaya penataan PKL digelora sepuuh nopember yaitu **membuat acara sarahsehan dengan pertimbangan sebulan sekali serta pemberian papan pengumuman tentang informasi-informasi yang telah dikoordinasikan**

4. Adanya kerjasama stakeholder dengan PKL

Berdasarkan hasil analisa dari faktor kerjasama kemitraan dengan PKL memiliki pemahaman untuk melnngsungkan kegiatan PKL, para pedagang yang diwakilkan oleh ketua paguyuban bekerjasama dengan pemerintah dalam bentuan bantuan dana lunak dan membentuk koperasi simpan pinjam. Dalam bantuan dana lunak pemerintah memberikan pinjaman kepada pedagang untuk membantu berlangsungnya kegiatan berdagang

Berdasarkan tinjauan literatur terkait kerjasama kemitraan dengan PKL, Syafardi berpendapat bahwa kemitraan adalah oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Kerjasama dalam hal ini memiliki pemahaman bahwa dalam melakukan kerjasama pada pedagang dan pemerintah memiliki keuntungan tersendiri. Untuk pedagang

bantuan dana cukup membantu dalam melangsungkan kegiatan usaha. Untuk pemerintah pemberian bantuan dapat dijadikan salah satu tahap dalam upaya penataan sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dana pedagang bisa dengan mudah ditata

Berdasarkan kebijakan yang ada kerjasama kemitraan dengan PKL dapat dihubungkan dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 2 ayat 1 pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud meliputi a. pendataan, b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, c. fasilitas akses permodalan, d. penguatan kelembagaan, e. pembinaan dan pembimbingan teknis, f. fasilitasi kerja sama antar daerah, g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Pasal 30 PKL mempunyai hak huruf e mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank serta Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa : a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain, c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, d. peningkatan kualitas alat peraga. Dalam hal ini berdasarkan perda dan pemendagri dapat diketahui bahwa dalam memberdayakan PKL pemerintah juga bekerjasama dengan pihak lain untuk bantuan modal.



Gambar 4.19
PKL Binaan Merupakan Bentuk Adanya Kerja Sama
dengan Stakeholder

Sumber: Survey Primer, 2014

Berdasarkan pendapat responden terkait faktor kerjasama kemitraan dengan PKL beberapa responden berpendapat bahwa kerjasama yang dilakukan hanya pada pemberian dana bantuan lunak dimana PKL diberi dan peminjaman yang pengembalianya tidak terbatas waktu dan tempat. Beberapa responden lain juga berpendapat kerjasama yang dilakukan sebaiknya menguntungkan kedua belah pihak

Dari beberapa sumber yang terdapat diatas maka dalam upaya penataan PKL di Kawasan gelora Sepuluh Nopember terkait faktor kerjasama kemitraan dnegan PKL maka didapatkan arahan sebagai berikut : **diberikan kemudahan untuk para pedagang dalam bantuan modal usaha serta pembentukan koperasi smpan pinjam.**

- **Aspek Lingkungan**

Dalam aspek lingkungan terdapat beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam aspek lingkungan, faktor-faktor tersebut antara lain : faktor pengaruh lingkungan sekitar terhadap adanya PKL, faktor timbulnya kemacetan akibat adanya PKL serta faktor respon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL.

1. Pengaruh lingkungan sekitar terhadap adanya PKL

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya kualitas lingkungan sekitar, menentukan respon masyarakat terhadap PKL. Lingkungan yang bersih akan menjauhkan PKL dari kesan kumuh. Kualitas lingkungan terkait dengan kebersihan lingkungan atau tempat yang digunakan berdagang PKL. Semakin bersih dan nyaman tempat PKL berjualan makan masyarakat akan semakin banyak yang mengunjungi tempat PKL tersebut. PKL pada kawasan Gelora Sepuluh Nopember aktivitas pedagang terlihat rapi dan pedagangnya dapat diatur dalam hal menjaga lingkungan sekitar. Untuk jenis pedagang makanan dan minuman yang berada di lokasi, para pedagangnya cukup tertib dengan memberikan tempat untuk pembuangan limbah. Berdasarkan hasil observasi biasanya pedagang membuang limbah pada saluran-saluran air. Untuk pedagang jenis lain selesai berjualan pedagang dengan sendirinya membersihkan tempat dagangannya.

Berdasarkan hasil pengamatan pedagang yang berada di pinggir taman mundhu masih belum sadar akan kebersihan lingkungan dengan menempati ruang publik harusnya pedagang sadar dengan menjaga kebersihan. Keberadaan tempat sampah juga kurang terlihat di wilayah ini. Petugas kebersihan biasanya membersihkan sisa-sisa berdagang PKL pada pagi hari.

Berdasarkan tinjauan literatur terkait dengan kualitas lingkungan sekitar Firdausy (1995) menyatakan karakteristik dan permasalahan PKL relatif masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota serta keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kebanyakan PKL memang menempati lahan atau ruang publik, PKL pada kawasan Gelora Sepuluh Nopember sendiri merupakan PKL yang menempati ruang publik dan mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan oleh karena itu PKL tersebut perlu diatur supaya tidak berdampak buruk bagi kualitas lingkungan sekitar.



Gambar 4.20
Pengaruh Lingkungan Sekitar Terhadap Adanya PKL
Sumber: Survey Primer, 2014

Dalam kebijakan yang terkait dengan kualitas lingkungan sekitar dapat dihubungkan dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Kemudian Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 3 Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. BAB III bagian kedua tentang kewajiban dan larangan pemegang TDU PKL a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Pada perda tersebut para pedagang dihimbau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan saling menjaga lingkungan maka pedagang dengan masyarakat akan berdampak dalam

menjalankan aktivitas kesehariannya karena tidak merasa terganggu.

Berdasarkan beberapa responden yang berpendapat terkait kualitas lingkungan sekitar menyatakan bahwa kebersihan harus menjadi prioritas utama untuk kenyamanan bersama, responden dari bappeko berpendapat bahwa pengaturan tempat sampah dilokasi PKL harus diperhatikan serta perlu diadakan petugas khusus kebersihan yang ditugaskan untuk menjaga kebersihan lingkungan PKL

Dari beberapa sumber diatas maka didapatkan arahan terkait kualitas lingkungan sekitar dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember **yaitu pemberian tempat sampah yang cukup dilokasi berdagang PKL, penggunaan tenda untuk pedagang agar terlihat rapi serta pembentukan petugas khusus kebersihan yang ada di kawasan Gelora Sepuluh Nopember**

2. Faktor timbulnya kemacetan akibat adanya PKL

Dalam faktor ini masuk kedalam aspek lingkungan karena dampak yang timbulkan dengan keberadaan PKL cukup beragam. Manajemen lokasi yang kurang koordinasi dan tidak memperhatikan pemanfaatan ruang akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. berdasarkan hasil observasi PKL yang berada pada Gelora Sepuluh Nopember tidak tertata dengan baik, hal ini diikuti dengan manajemen perparkiran yang kurang diakomodir menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas. Kondisi perparkiran sudah memakan badan jalan ditambah lagi dengan lalu lintas konsumen yang ada. Kondisi pedagang yang berada di Gelora Sepuluh Nopember kurang tertata karena tidak ada pengawasan berlanjut dari pihak pemerintah. Kondisi perparkiran pengelolaannya tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan tersendatnya arus lalu lintas apalagi bila pada akhir minggu serta waktu sore hari.



Gambar 4.21
Timbulnya Kemacetan Akibat Adanya PKL

Sumber: Survey Primer, 2014

Berdasarkan tinjauan literatur Firdausy (1995) menyatakan bahwa karakteristik dan permasalahan PKL relatif masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota serta keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dari tinjauan literature tersebut dapat diketahui pedagang yang menempati lahan pada umumnya menempati lahan ruang public yang apabila tidak ditata dengan baik bisa mengganggu ketertiban umum

Berdasarkan tinjauan kebijakan tentang penataan PKL dikawasan gelora sepuluh nopember terkait dengan timbulnya kemacetan akibat adanya PKL dapat dihubungkan dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain huruf e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum serta 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL bagian kedua b menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur. Dari kebijakan diatas terlihat bahwa pedagang yang berada digelora sepuluh nopember harus diatur sarana usaha serta penataan barang dagangan dengan penataan jenis alat peraga agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada didepanya

Berdasarkan pendapat dari beberapa responden terkait timbulnya kemacetan akibat adanya PKL, beberapa responden berpendapat “*pengelolaan perparkiran harus diperhatikan agar tidak mengganggu lalu lintas*” dan ada juga pendapat lain yang menambahkan “*pembatasan jumlah PKL dengan luasan lokasi*”. Kondisi perparkiran yang baik dan tidak memakan badan jalan tidak akan menimbulkan kemacetan atau tersendatnya arus lalu lintas. Pembatasan jumlah PKL dapat dijadikan juga solusi untuk membatasi pedagang agar tidak meluber sampai ke badan jalan dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas

Dari beberapa sumber yang ada diatas, dalam upaya penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember berdasarkan faktor timbulnya kemacetan akibat adanya PKL maka arahan yang didapatkan berupa **pengelolaan perparkiran yang baik serta pembatasan jam operasional berdagang PKL**

3. Respon Masyarakat Sekitar Terhadap Adanya PKL

Berdasarkan hasil analisa terkait respon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL, dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember didapatkan hasil analisa keberadaan PKL pada suatu lokasi yang dekat dengan masyarakat dapat menimbulkan kesan dari masyarakat yang beragam pula. Respon yang beragam tersebut tergantung dari bagaimana para pedagang menjaga lingkungan sekitar. Dalam hal ini kebersihan lingkungan dan ketertiban umum menjadi parameter untuk respon masyarakat sekitar. apabila dalam melakukan kegiatan berdagang pedagang dapat menjaga kebersihan lingkungan maka masyarakat tidak merasa terganggu dan apabila dalam melakukan kegiatannya pedagang tidak menjaga ketertiban umum dalam hal ini bisa saja pedagang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar maka masyarakat ada melakukan protes terkait dengan keberadaan PKL yang aktivitasnya mengganggu

Berdasarkan tinjauan literatur terkait dengan adanya respon masyarakat sekitar terhadap PKL dalam upaya penataan PKL

dikawasan Gelora Sepuluh Nopember, sikap masyarakat dibagi dalam 3 kategori 1. Masyarakat yang menginginkan PKL tetap ada; 2 masyarakat yang menentang PKL atas dasar kebersihan lingkungan; 3 masyarakat yang abstain mengatakan bahwa sikap masyarakat dibagi dalam 3 kategori 1. Masyarakat yang menginginkan PKL tetap ada; 2 masyarakat yang menentang PKL atas dasar kebersihan lingkungan; 3 masyarakat yang abstain. Dalam hal ini dalam wilayah kecamatan Tambaksari ada beberapa tipe masyarakat yang beragam seperti yang dijelaskan pada tinjauan literature tersebut, yang perlu ditekankan hanyalah informasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan yang muncul akibat PKL

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait respon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember dapat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 31 dan 32 tentang hak dan kewajiban PKL. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini hak dan kewajiban PKL apabila terpenuhi maka ketertiban umum yang ada dimasyarakat akan terjaga sehingga masyarakat merespon baik dengan adanya PKL dilingkunganya. Demikian juga dengan perda no 17 tahun 2003 pedagang yang mengerti dan sadar bahwa merka berada dalam lingkungan masyarakat cenderung akan menjaga kebersihan lingkungan degan memperhatikan kepentingan sosial dan ketertiban umum

Berdasarkan pendapat beberapa responden terkait dengan respon masyarakat sekitar dengan adanya PKL, beberapa responden berpendapat bahwa kondisi PKL yang rapi dan tertata akan memberikan penilaian tersendiri bagi masyarakat serta para pedagang yang menjaga lingkungan kebersihan akan mendapat

respon yang baik dari masyarakat sekitar karena turu bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih

Dari beberapa sumber diatas terkait respon masyarakat sekitar, dalam upaya penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Maka didapatkan arahan sebagai **berikut terdapat cukup tempat sampah dilokasi berdagang PKL, Pengelolaan parkir yang baik agar tidak mengambat lalulintas, Pemberian tenda agar PKL terlihat rapi**

- **Aspek Kebijakan**

Dalam aspek kebijakan terdapat beberapa faktor yang dapat dikelompokkan terkait dengan kebijakan PKL yang dilihat dari lagalitas lokasi PKL. Dalam aspek kebijakan ini faktor status lahan yang digunakan PKL serta adanya perizinan lokasi yang jelas.

1. Faktor status lahan yang digunakan PKL

Pada pembahasan sebelumnya status lahan yang digunakan PKL masuk dalam aspek ekonomi, namum pada bab kali ini faktor tersebut masuk dalam aspek kebijakan karena Berdasarkan hasil analisa yang didapat bahwa kebanyakan para pedagang menyewa tempat yang digunakan untuk berdagang. Karena sektor informal umumnya tidak memiliki lahan yang sesuai dengan peruntukanya. Kondisi lahan bersifat permanen dan sementara mempunyai pemahaman bahwa lahan yang digunakan untuk berdagang PKL sehari-hari adalah lahan yang ditempati pedagang berjualan yang dimana lahan tersebut bersifat sementara dengan pengertian bahwa lahan tersebut sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan lain. Dalam faktor status lahan dapat dikaitkan dengan karakteristik PKL terkait sifat kegiatan usahanya kebanyakan pedagang di Gelora Sepuluh Nopember mempunyai sifat usaha yang permanen dalam artian pedagang yang keseharian berjualan tetap dilokasi tersebut. pedagang tersebut mengeluarkan biaya sewa terhadap hak atas lahan yang ditempatinya dengan membayar sewa 150 ribu perbulan.

Berdasarkan tinjauan literatur terdapat teori terkait yang berhubungan dengan status lahan yang digunakan PKL. Dilihat dari aspek kegiatannya ada pedagang yang menetap dan berpindah-pindah dari suatu lokasi tertentu ketempat lain. (Kartono, dkk.1980). dalam teori tersebut pedagang yang berpindah-pindah disebabkan dari status lahan yang mereka tempati, karena pedagang tersebut bukan pedagang yang permanen dan tidak membayar sewa atas lahan yang mereka tempati. Berbeda dengan pedagang yang permanen mereka tidak berpindah-pindah karena para pedagang tersebut telah membayar biaya sewa atas lahan yang mereka tempati

Kebijakan yang mengatur tentang penataan PKL terkait status lahan adalah Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 12 lokasi PKL sesuai peruntukannya a. lokasi PKL yang bersifat permanen, b. lokasi yang bersifat sementara serta Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya 4. Kepala daerah berweangan melarrang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai loaksi PKL. Untuk kebijakan yang mengatur status lahan bagi PKL mempunyai pengertian bahwa status lahan yang ditempati PKL bersifat permanen dan sementara serta peruntukan lokasi PKL dapat sewaktu-waktu dihapuskan dan dipindahkan. Hal ini yang membuat PKL berpindah-pindah tempat karena PKL sendiri merupakan sektor formal yang tidak mempunyai tempat yang legal.

Berdasarkan pendapat beberapa responden mengatakan bahwa status lahan yang ada kebanyakan bersifat permanen dengan sistem sewa lahan. Hal ini memiliki pengertian bahwa

lahan yang ditempati untuk berdagang PKL merupakan lahan yang digunakan PKL dalam kesehariannya untuk berdagang. PKL di Gelora Sepuluh Nopember mempunyai tempat permanen tetapi tempat tersebut hanya sementara karena sewaktu-waktu pemerintah dapat memindahkan bahkan menghapuskan tempat berdagang PKL karena PKL menempati lahan milik pemerintah atau ruang yang peruntukannya untuk public

Dari beberapa sumber diatas didapatkan arahan penataan PKL yang sesuai terkait dengan status lahan yang digunakan PKL yaitu **pengaturan biaya sewa lahan untuk pedagang serta pengaturan jenis pedagang yang mempunyai lokasi lahan permanen dan sementara**

2. Adanya perizinan lokasi yang jelas

Pada pembahasan sebelumnya faktor perizinan lokasi masuk kedalam aspek pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang, namun pada bab kali ini faktor tersebut masuk kedalam aspek kebijakan hal ini dikarenakan ijin lokasi pedagang yang berada dikawasan Gelora Sepuluh Nopember berkaitan dengan kebijakan pihak regulator.

Berdasarkan hasil analisa terkait dengan adanya perizinan lokasi yang jelas dalam upaya penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember didapatkan hasil analisa yaitu keberadaan PKL yang menempati lokasi harusnya mempunyai izin untuk berdagang. Dalam hal ini lokasi yang ditempati pedagang sudah mengantongi izin dari pemerintahan setempat yaitu kecamatan. Kecamatan memberikan izin berdagang PKL dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya membatasi jumlah PKL dan pedagang tidak mengganggu ketertiban umum. Perizinan lokasi dalam hal ini PKL boleh menempati lokasi di depan Gelora sepuluh Nopember tetapi bersifat sementara yang berarti sewaktu-waktu para pedagang tersebut tidak mempunyai lokasi atau lokasinya dihapuskan dan ditertibkan dengan mengembalikan fungsi gelora sepuluh Nopember sebagai ruang publik.

Berdasarkan tinjauan literatur terkait perixinan lokasi dalam upaya penataan PKL. Abbot menyatakan bahwa legalisasi pedagang termasuk izin berdagang dan lokasi yang digunakan berdasarkan pemerintah setempat. Dalam hal ini pemeberian izin berdagang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu kecamatan. Seperti yang dibahas pada sebelumnya bahwa kecamatan mempunyai syarat-syarat tertentu untuk PKL berdagang dilokasi tersebut

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait perizinan lokasi dalam upaya penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember dapat dihubungkan dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukanya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya 4. Kepala daerah berweangan melarrang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai loaksi PKL. Dalam hal ini PKL Gelora Sepuluh Nopember telah menempati lokasi permanen untuk aktivitas kegiatan berdagang tetapi lokasi tersebut bersifat sementara. Karena lokasi yang diberikan menempati ruang publik. Sebelum perda diberlakukan lagi, untuk menata PKL pemerintah pengelurkan perwali dimana dalam perwali tersebut berisi titik-titik konsentarsi PKL yang

boleh ditempati untuk berdagang walupun menempati ruang-ruang publik

Berdasarkan pendapat beberapa responden terkait dengan faktor adanya perizinan lokasi yang jelas, beberapa responden berpendapat bahwa izin lokasi yang diberikan pemerintah setempat harus jelas karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada kegiatan berdagang. Responden lain juga menambahkan “ *kebijakan pemerintah yang berubah-ubah akan membuat lokasi yang ditempati PKL ikut berubah pula* “. Dalam hal ini pedagang memerlukan terkait izin lokasi yang jelas. Agar dalam melakukan aktivitas berdagang sehari-sehari pedagang tidak gelisah karena sewaktu-waktu dapat ditertibkan dengan pengusuran lokasi.

Dari beberapa sumber diatas terkait adanya perizinan lokasi yang jelas, dalam upaya penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember, maka didapatkan arahan sebagai berikut : **diberikan kemudahan terhadap pengurusan izin daftar usaha dan diberikan kemudahan akses informasi terhadap lokasi yang ditempati pedagang**

- **Aspek Manajemen Lahan**

Dalam aspek manajemen lahan terdapat beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam aspek manajemen lahan, beberapa faktor tersebut adalah faktor kesesuaian peruntukan lahan bagi PKL, luasan kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL serta pengaruh jarak yang digunakan berdagang antar PKL.

1. **Faktor Kesesuaian peruntukan lahan bagi PKL**

Dalam pembahasan sebelumnya faktor kesesuaian lahan termasuk didapatkan dari faktor temuan baru dari analisis delphi. Berdasarkan hasil analisa yang didapatkan terkait kesesuaian lahan dalam upaya penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember yaitu PKL yang menempati lokasi hendaknya harus memperhatikan pola pemanfaatan ruang yang ada agar

dalam menjalankan aktivitasnya pedagang tidak terganggu dengan upaya penertiban yang dilakukan oleh regulator. Dalam hal ini kesesuaian dengan peruntukan lahan merupakan pola ruang yang benar-benar sesuai peruntukannya untuk kegiatan berdagang PKL.

Berdasarkan tinjauan literatur terkait kesesuaian dengan peruntukan lahan dalam upaya penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember dapat dihubungkan dengan kewajiban dan kewenangan pengendalian ruang, dalam menjalankannya pemerintah mempunyai kewenangan azas-azas sebagai berikut ; .Hak atas lahan (*Bundles of Right*), kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kewenangan pengaturan dan pengendalian (*Policy Power*) *Policy power* merupakan kewenangan dalam menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya (Kwanda 2004). Dalam hal ini masyarakat berhak untuk menempati suatu ruang seama ruang tersebut sesuai dengan peruntukannya. Lokasi PKL yang berada di wilayah penelitian merupakan ruang publik yang digunakan untuk berdagang dengan memperoleh izin dari pemerintah setempat. pedagang tidak mempunyai hak milik atas tempat dalam hal ini aktivitas kegiatan bersifat permanen tetapi lahan yang digunakan untuk berdagang PKL bersifat sementara.

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait dengan kesesuaian dengan peruntukan lahan , dalam upaya penataan PKL dapat dihubungkan dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro

yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan dan pasal 12 ayat 1 tentang lokasi PKL yang bersifat permanen huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL serta Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan. Dalam hal ini diupayakan kepada pedagang agar menempati lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Di kota Surabaya lahan lahan sesuai untuk peruntukannya terdapat pada sentra-sentra lokasi yang dimana pada lokasi tersebut telah dikaji untuk kesesuaiannya ditempati pedagang

Berdasarkan pendapat dari beberapa responden terkait kesesuaian dengan peruntukan lahan. Beberapa responden berpendapat bahwa lokasi yang ditinggali PKL kebanyakan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah serta beberapa responden berpendapat sentra PKL merupakan lokasi yang jelas buat PKL. Dalam hal ini dapat diketahui pedagang yang menempati lokasi di wilayah penelitian menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan peruntukannya

Dari beberapa sumber diatas terkait kesesuaian dengan peruntukan lahan dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember maka didapatkan arahan sebagai berikut **Pemberian penyuluhan untuk para pedagang agar sadar akan hukum dan selalu menaati peraturan perundangan yang berlaku, Pemberian reward untuk pedagang yang menempati lokasi usaha sesuai dengan peraturan, Melakukan sentralisasi PKL untuk kesesuaian dengan peruntukan lahan**

2. Luasan kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya faktor luasan kawasan operasional masuk ke dalam aspek pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang tetapi pada bab ini faktor tersebut masuk kedalam aspek manajemen lahan. Hal ini dikarenakan dalam pemanfaatan ruang dalam hal ini lokasi berdagang PKL juga harus memperhatikan luasan kawasan operasional. Faktor tersebut berkaitan dengan pembatasan jumlah PKL yang berada di Kawasan Gelora sepuluh Nopember. Dengan adanya luasan batasan yang diperbolehkan PL berdagang akan berdampak pada kuantitas PKL. PKL pada Sekitaran kawasan Gelora Sepuh Nopember berjumlah 149 pedagang dengan luasan lapak antar pedagang 2x2 m, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang agar PKL tertata dengan baik dan tidak menimbulkan kesan semerawut.

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap luas kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL Rahmi (2004) menyatakan Arahana Perizinan dalam pemanfaatan ruang berfungsi untuk sebagai dasar pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun ketentuan perizinan, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal dan kualitas minimum yang ditetapkan. Dalam hal ini luasan kawasan operasional yang digunakan berdagang harus sesuai dengan peruntukan lahan yang ada agar dalam upaya penataan PKL, para pedagang dengan mudah diatur

Berdasarkan tinjauan kebijakan terkait penataan PKL digelora Sepuluh Nopember yang berhubungan dengan faktor luasan kawasan operasional PKL dapat dihubungkan dengan Permendagri nomor 41 tahun 2012 bagian keempat penetapan lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa lokasi digunakan

berdagang PKL harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Dalam permendagri tersebut batasan jumlah PKL dibatasi jumlahnya sesuai dengan luasan kawasan operasional dengan tujuan agar PKL nantinya dapat tertata dengan rapi

Berdasarkan pendapat responden terkait dengan luasan kawasan operasional PKL dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember beberapa responden berpendapat bahwa luasan lokasi PKL perlu pembatasan terhadap jumlah PKL hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penataan PKL. Dalam pernyataan responden tersebut dapat diejelaskan untuk luasan kawasan operasional yang digunakan PKL berdagang perlu adanya pembatasan jumlah PKL karena apabila upaya pembatasan tidak dilakukan maka pedagang akan terlihat kumuh dan tidak tertat dengan baik.

Berdasarkan beberapa sumber diatas terkait penataan PKL di kawasan Gelora sepuluh Nopember yang dihubungkan dengan faktor luas kawasan operasional bagi PKL adalah **pembatasan jumlah PKL yang disesuaikan dengan luasan lahan**

3. Pengaruh jarak yang digunakan berdagang antar PKL

Dalam pembahasan sebelumnya pengaruh jarak yang digunakan berdagang PKL masuk dalam aspek pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang. Faktor tersebut masuk kedalam manajemen lahan karena membahas tentang pemanfaatan ruang terkait dengan luasan lahan yang ada. Dalam faktor ini dapat dihubungkan dengan karakteristik PKL dengan variabel luasan lapak, sarana yang digunakan serta jenis barang yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil observasi umumnya pedagang makanan minuman dan konveksi baju bola menggunakan alat peraga berupa gerobak. Panjang gerobak umumnya 2x1 m dengan luasan lapak 2x2 m.

Berdasarkan hasil analisa terkait faktor pengaruh jarak yang digunakan berdagang antar PKL dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember. Di dapatkan pengertian

pembatasan jarak antar PKL dilakukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ruang dengan jumlah PKL. Pembatasan jarak antar PKL ini dimaksudkan untuk menjaga kegiatan per lapak antar pedagang dalam melakukan kegiatan berdagang serta untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ruang dengan jumlah PKL. Dalam hal ini pembatasan dilakukan agar PKL yang berada di kawasan Gelora Sepuluh Nopember tidak meluber dan berdesakan dalam memanfaatkan luasan kawasan operasional

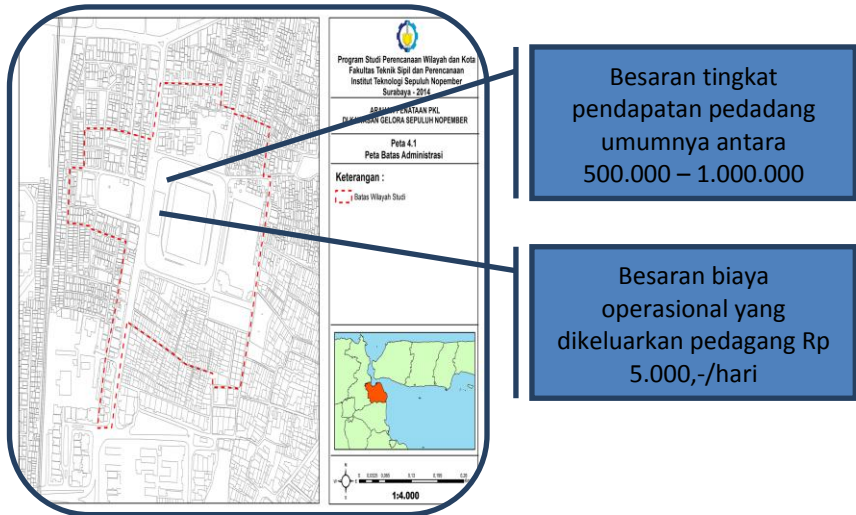
Berdasarkan tinjauan literatur terkait penelitian terdahulu, dalam upaya penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember yang berhubungan dengan faktor pengaruh jarak yang digunakan berdagang antar PKL Widjayanti, (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan luas banunan atau tempat berdagang (space use) terdiri dari 2 kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m (Rahmi) 2004 dalam hal ini PKL yang berada di kawasan Gelora Sepuluh Nopember memiliki jarak antar berdagang PKL antara 1-2m tergantung pada luasan lapak yang digunakan berdasarkan jenis pedagang dalam menjual barang dagangannya. Untuk pedagang kaos bola atau konveksi memiliki luasan lapak yang besar antara 1-3m sehingga jarak dengan PKL yang berada disebalahnya dapat disesuaikan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa responden terkait dengan pengaruh jarak yang digunakan berdagang PKL dalam upaya penataan Kawasan Gelora Sepuluh Nopember menyatakan bahwa penataan jarak diharapkan bisa mengarahkan pedagang agar tertata rapi dan tidak meluber. Responden lain juga menambahkan dengan penataan jarak PKL akan terlihat rapi, dari jenis alat peraga sudah ditata kemudian jaraknya juga sudah ditata maka PKL akan terlihat rapi

Berdasarkan dari beberapa sumber diatas didapatkan arahan terkait dengan pengaruh jarak berdagang antar PKL. Maka arahnya adalah **penetapan luasan lapak yang digunakan dengan luas 2x2 m serta pembatasan jarak antar lapak maksimal 1m**

- **Aspek Ekonomi**

Dalam aspek ekonomi terdapat beberapa faktor yang dapat dimasukkan dalam kelompok aspek ekonomi, faktor-faktor tersebut antara lain faktor besaran biaya operasional dan faktor besaran tingkat pendapatan pedagang.



Gambar 4.22
Gambaran Aspek Ekonomi

1. Faktor besaran biaya operasional

Dalam pembahasan sebelumnya faktor besaran biaya operasional merupakan faktor tambahan baru yang didapatkan dari analisa delphi. berdasarkan hasil analisa mempunyai pengertian bahwa setiap pedagang mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan pedagang yang menunjang aktivitasnya dalam berdagang dengan pengenaan biaya akan listrik, air dan sarana prasarana lainnya. Para pedagang yang berada di gelora sepuluh nopember dikenakan biaya operasional sebesar Rp 5.000 per hari dengan demikian dalam waktu sebulan pedagang

mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp150.000. bila di jumlahkan dengan pedagang yang ada maka besaran biaya operasional cukup banyak. Karakteristik pedagang yang umumnya berjualan makanan, minuman dan konveksi baju bola dengan pendapatn sekitar Rp 1.000.000-2.000.000 tidak sebearapa keberatan, berbeda dengan pedagang yang pedagang yang memiliki pendapatan anatra Rp.500.000 serta kurang dari Rp 1.000.000 tentu akan merasa terbebankan.

Berdasarkan teori terkait penataan PKL terdapat teori yang menyebutkan bahwa pedagang dalam sektor ekonomi merupakan pedagang kecil dengan ciri-ciri rendahnya biaya operasional.(Kemala Chandra Kirana dan Isono Sadoko). Dalam hal biaya operasional diusahakan pedagang tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar karena besaran biaya operasional akan berpengaruh pada pendapatan pedagang yang umunya memperoleh penghasilan yang tidak terlalu besar

Berdasarkan kebijakan terkait penataan PKL, dalam permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 34 ayat 2 lokasi PKL bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, sarana dan prasarana antara lain fasilitas listrik, air , tempat sampah dan toilet. Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa kelengkapan untuk berdagang terkait didalamnya fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet kebanyakan pedagang dikenai biaya operasional untuk pemenuhan kebutuhan berdagang

Besaran biaya opsional berdasarkan pendapat responden pada umumnya pedagang dikenai biaya lebih dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan kebanyakan PKL tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya tesebut selama para pedagang merasakan manfaatnya. hal ini dapat dilihat dari pendapat responden yang menyatakan “ *kebanyakan pengelola PKL meminta pungutan dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan PKL*”, serta “ *PKL tidak keberatan jika mengelurkan biaya tambhan untuk penerangan, listrik dan air*”.

Dari beberapa sumber diatas maka arahan yang digunakan dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember terkait faktor besaran biaya operasional berupa **pembatasan besaran biaya operasional yang dikeluarkan pedagang tidak boleh terlalu tinggi**

2. Besaran tingkat pendapatan pedagang

Pada pembahasan ini faktor besaran tingkat pendapatan pedagang masuk kedalam aspek ekonomi hal ini dikarenakan besaran tingkat pedagang mempengaruhi pendapatan ekonomi yang diterima pedagang. Pedagang yang Berada diwilayah Gelora Sepuluh Nopember jika dikaitkan dengan karakteristik PKL, umumnya berdagang makanan, minuman setra konveksi baju bola dengan berpendapatan Rp.1000.000 – Rp2.000.000, dan pedagang tersebut berjualan pada lebih dari satu waktu pembatasan jam operasional maka pendapatan yang diterima pedagang akan lebih banyak lagi. Besaran tingkat pendapatan pedagang berhubungan dengan tempat berdagang pedagang.

Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa bila tempat pedagang di pindahkan pemerintah harus memperhatikan besaran pendapatan pedagang dengan tempat semula. Apabila berpengaruh dengan besaran pendapatan yang diterima pedagang maka kebanyakan pedagang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Pedagang yang berada diwilayah tambaksari pernah merasakan hal tersebut ketika ada pemindahan lokasi berdagang di KAZA, karena lokasi yang baru mempengaruhi besaran tingkat pendapatan pedagang maka banyak pedagang yang meninggalkan KAZA dengan kembali ke lokasi semula.

Berdasarkan hasil tinjauan literatur didapatkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan besaran tingkat pendapatan pedagang. PKL tergolong sektor informal yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal yang memiliki ciri-ciri modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil dan berdasarkan hitungan harian (Wirosandjoyo, 1985). Pengaturan maupun pengarahannya PKL harus mempertimbangkan karakteristik

PKL dan karakteristik konsumen. Indikasi terhadap tingkat pendapatan PKL memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL disuatu lokasi maka kecenderungan kawasan tersebut menjadi sasaran PKL biasanya berdekatan dengan lokasi formal. (Rustianingsih, 2004). Dari penelitian diatas memiliki pemahaman bahwa pedagang cenderung akan mencari tempat yang ramai untuk berdagang. Bila ditempat yang sudah menjadi keseharian pedagang untuk berjualan pedagang merasakan adanya pemasukan yang lumayan maka pedagang cenderung enggan menempati lokasi lain karena pedagang takut dilokasi lain besaran pendapatan yang diterima tidak seperti ditempat yang semula.

Berdasarkan kebijakan yang berhubungan dengan besaran tingkat pendapatan pedagang terdapat pada Perpres no 125 tahun 2012 tentang koordinasi, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 3 ayat 5 peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai peruntukannya. Pemahaman dari kebijakan diatas dapat dihubungkan dengan besaran tingkat pendapatan pedagang. Dengan perbaikan kualitas lingkungan cenderung masyarakat sekitar Gelora Sepuluh Nopember selaku konsumen akan banyak mengunjungi tempat berdagang PKL karena lokasi PKL memiliki lingkungan yang bersih dan aman. Dengan banyaknya konsumen yang datang maka akan mempengaruhi besaran tingkat pendapatan pedagang.

Dari hasil beberapa pendapat responden terkait besaran tingkat pendapatan pedagang di Gelora Sepuluh Nopember diketahui bahwa para pedagang akan cenderung memilih tempat yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi hal ini dikarenakan kecenderungan pedagang untuk menempati lokasi dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Gelora Sepuluh Nopember merupakan kawasan strategis karena sudah terkenal sejak dulu akan penjual kaos bola dan olahraganya. Lokasinya yang dekat dengan dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran membuat daya tarik lokasi ini menjadi primadona bagi pedagang

Berdasarkan faktor besaran tingkat pendapatan pedagang maka arahan yang didapatkan terkait beberapa sumber diatas untuk penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember adalah **penempatan pedagang pada lokasi dengan letak yang strategis serta aksesibilitas yang tinggi untuk menunjang aksesibilitas.**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas setelah faktor-faktor tersebut dikelompokkan kedalam beberapa aspek, untuk selanjutnya pengelompokan arahan berdasarkan kecenderungan kesamaan. Pengelompokan arahan digunakan untuk memperoleh arahan yang jelas terkait penataan PKL di Gelora Sepuluh Nopember.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 4.7
Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif Arahan Penataan PKL
Di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

No	Faktor	Hasil Analisa	Tinjauan Literatur (Penelitian Terdahulu/Teori)	Kebijakan	Pendapat Responden	Arahan Penataan PKL
ASPEK PEMBINAAN PKL						
1	Faktor adanya penyuluhan tentan waktu, tempat dan sarana usaha	Dengan adanya penyuluhan membuat pengetahuan pedagang bertambah serta terjalinya bentuk interaksi dan kerjasama dengan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan penyuluhan menurut Elastriany (2000) dan Asmaria, 2007 yaitu mengubah mental manusia atau masyarakat secara terperinci. Meningkatkan pengetahuan pedagang, meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 1 menjeaskan tentang pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan 	” Melakukan dialog dengan pimpinan pedagang dan PKL untuk mensosialisasikan peraturan baru serta penertiban PKL” “ Komunikasi secara langsung melalui lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan pada saat	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas penyuluhan diatur sebulan sekali a. Penyuluhan dilakukan di luar jam operasional berdagang / pada hari yang telah disepakati - Pemilihan wakil PKL yang bertanggung jawab a. Pemilihan dilakukan oleh PKL yang berada

			<p>keterampilan pedagang dan perubahan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • McGee dan Young (1977) penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pada perilaku sektor formal 	<p>masyarakat memberikan pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha mandiri yang menengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan 	<p><i>penertiban langsung, sedangkan secara tulisan memberikan surat peringatan kepada PKL”</i></p>	<p>pada ruang lingkup studi dan beberapa stakeholder terkait yang dilakukan melalui musyawarah/ voting</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pemilihan wakil PKL dilakukan minimal 1 tahun sekali - Diberikan papan pemberitahuan tentang tata cara berdagang <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal terdapat 2 buah papan pemberitahuan b. Papan pemberitahuan diletakkan berdekatan dengan lokasi
--	--	--	--	---	---	---

				<p>usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain c. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan 		<p>berdagang PKL, yakni di sekitar Gelora Sepuluh Nopember dan Taman Mundu</p>
--	--	--	--	--	--	--

				d. Peningkatan kualitas alat peraga		
2	Jenis alat peraga yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaa n alat peraga perlu diatur dalam penataan lokasi PKL • Pemilihan alat peraga yang efisien dan mudah dibongkar pasang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing jenis bentuk sarana berdagang memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan penataan ruang utnuk PKL. (widjayanti, 2009) • Sarana fisik berdagang PKL dikelompokan menjadi Pikulan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi ketentuan perundang-undnagan,b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan bupati atau walikota, c. memelihara keindahan,keterti 	<i>"Penggunaan jenis alat peraga seperti gerobak, gerlaran dan tenda bisa menjadikan PKL mudah diatur dan terlihat rapi."</i>	- Penggunaan alat peraga yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang

			gelaran, meja, gerobak , warung semi permanen dan kios. (Wawaroentoe,1 973)	ban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, d. menempatkan dan menata barang dagangan dan /jasa serta peralatan dagang yang tertib dan teratur, e. tidak mengganggu laulintas dan kepentingan umum, pasal 15 jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak antara lain gelaran lesehan tenda shelter dan bermotor dan		
--	--	--	---	---	--	--

				<p>tidak bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perda 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL pasal 3 kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang : <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan 		
--	--	--	--	--	--	--

				d. Mengatur alat peraga		
3	Komunikasi antar Stakeholder	Dengan adanya komunikasi yang terjalin maka informasi yang diterima terkait kebijakan akan mudah dipahami oleh PKL dalam adanya upaya penataan	Komunikasi kebijakan penanganan PKL maupun ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi yang berbentuk dialog maupun sarasehan. (Syafardy, 2012)	Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 30 PKL mempunyai hak anatara lain; a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL, b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan, c. mendapatkan informasi sosialisasi ,pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di	” Melakukan dialog dengan pimpinan pedagang dan PKL untuk mensosialisasikan peraturan baru serta penertiban PKL” “Komunikasi secara langsung melalui lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan pada saat penertiban langsung, sedangkan secara tulisan memberikan surat peringatan kepada PKL”	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat acara sarasehan dengan pertimbangan sebulan sekali - Pemberian papan pengumuman tetntang informasi-informasi yang telah di koordinasikan

				lokasi yang bersangkutan., d. mendapatkan pengaturan penataan , pembinaan dan supervise dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.		
4	Kerjasama kemitraan dengan PKL	Kerjasama dalam bentuk pemberian kebijakan modal pembayaran usaha yang diharapkan dapat melangsungkan kegiatan usaha PKL	Kemitraan adalah oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama.(Syafardi 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 2 ayat 1 pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud 	<i>”Kerjasama kemitraan yang dilakukan hanya pada pemberian dana bantuan lunak dimana PKL diberi dan peminjaman yang pengembalianya tidak terbatas oleh waktu dan tempat.”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kemudahan untuk para pedagang dalam bantuan modal usaha - Pembentukan koperasi simpan pinjam

				<p>meliputi a. pendataan, b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, c. fasilitas akses permodalan, d. penguatan kelembagaan, e. pembinaan dan pembimbingan teknis, f. fasilitasi kerja sama antar daerah, g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Pasal 30 PKL mempunyai hak huruf e mendapatkan pendampingan dalam</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>mendapatkan pinjaman permodalan degan mitra bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL BAB IV pemberdayaan pasal 8 nomor 1 untuk pengembangan usaha PKL, kepala daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen 		
--	--	--	--	--	--	--

				usaha b. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain		
ASPEK LINGKUNGAN						
5	Respon masyarakat sekitar	Keberadaan PKL pada suatu lokasi yang dekat dengan kegiatan masyarakat dapat menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam. Tergantung dari bagaimana	Keberadaan PKL pada suatu lokasi yang dekat dengan kegiatan masyarakat dapat menimbulkan respon dari masyarakat yang beragam. Tergantung dari bagaimana PKL tersebut menjaga lingkungan sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No.32/1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil pasal 31 dan 32 tentang hak dan kewajiban PKL • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan 	<i>“Kondisi PKL yang bagus tertata dan bersih itu yang diinginkan semua orang “</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat cukup tempat sampah di lokasi berdagang PKL <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat minimal 8 tempat sampah yang tersebar pada kawasan berdagang PKL b. Tempat sampah dibedakan menjadi 2 macam, yakni sampah basah dan sampah

		PKL tersebut menjaga lingkungan sekitar.		PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya.		<p>kering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan parkir yang baik agar tidak menghambat lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan bermotor, yakni pada Taman Mundu sisi selatan b. Menetapkan biaya parkir kendaraan - Pemberian tenda agar PKL terlihat rapi <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk tenda disamaratakan simetris segi empat
--	--	--	--	---	--	--

6	Pengaruh PKL terhadap lingkungan sekitar	Kualitas lingkungan yang ada menentukan respon masyarakat terhadap PKL. Lingkungan yang bersih akan menjauhkan PKL dari kesan kumuh	Karakteristik dan permasalahan PKL relative masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu keterbiban dan kelancaran arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota serta kenyamanan dan keamanan lingkungan. Firdausy (1995)	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL 	<p><i>"Kebersihan harus menjadi prioritas utama untuk kenyamanan bersama"</i></p> <p><i>"Pengaturan tempat sampah di lokasi PKL harus diperhatikan"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian tempat sampah yang cukup di lokasi berdagang PKL - Penggunaan tenda untuk berdagang PKL agar terlihat rapi - Memberikan penyuluhan akan kebersihan lingkungan terutama untuk pedagang jenis makanan
---	--	---	--	---	---	---

				<p>menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 3 Penetapan, pemindahan dan 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAB III bagian kedua tentang kewajiban dan larangan pemegang TDU PKL a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan 		
--	--	--	--	--	--	--

				lingkungan tempat usaha.		
7	Timbulnya kemacetan akibat adanya PKL	Keberadaan PKL yang berada dibadan jalan kebanyakan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi PKL, pengelolaan parkir yang buruk juga menambah dampak kemacetan	Karakteristik dan permasalahan PKL relative masih merupakan kegiatan usaha yang mengganggu keterbiban dan kelancaran arus lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota serta kenyamanan dan keamanan lingkungan. (Firdausy ,1995)	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 31 PKL mempunyai kewajiban antara lain huruf e. . tidak mengganggu laulintas dan kepentingan umum • Perda No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL bagian kedua b 	” <i>Pengelolaan perparkiran harus diperhatikan agar tidak mengganggu lalulintas.</i> ” <i>“Pembatasan jumlah PKL dengan luasan lokasi”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perparkiran yang baik - Pembatasan jam operasional berdagang PKL <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi–Siang mulai pukul 06.00–12.00 WIB b. Sore–Malam mulai pukul 17.00–22.00 WIB

				menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.		
ASPEK KEBIJAKAN						
8	Status lahan yang digunakan PKL	Status lahan yang ditempati para pedagang merupakan lahan yang penggunaannya disewakan dengan pengenaan biaya, kondisi lahan yang bersifat permanen dan sementara	Dilihat dari aspek kegiatannya ada pedagang yang menetap dan berpindah-pindah dari suatu lokasi tertentu ke tempat lain.(Karrtono, dkk. 1980).	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 12 lokasi PKL sesuai peruntukannya a. lokasi PKL yang bersifat permanen, b. lokasi yang bersifat sementara • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang 	<i>“Status lahan yang ada kebanyakan bersifat permanen dengan sistem sewa lahan”.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan biaya sewa lahan untuk pedagang - Pengaturan jenis pedagang yang mempunyai lokasi lahan permanen dan sementara

				<p>penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi, ketertiban, dan kebersihan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				lingkungan sekitarnya 4. Kepala daerah berweangan melarrang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.		
9	Adanya perizinan lokasi yang jelas	Keberadaan PKL yang menempati lokasi harusnya mempunyai izin untuk berdagang PKL	Legalisisasi pedagang termasuk izin berdagang dan lokasi yang digunakan berdasarkan pemerintah setempat (Abbot)	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah a. memberikan 	<p><i>“Perizinan lokasi harus jelas karena kebijakan dari pemerintah berubah sewaktu-waktu”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kemudahan terhadap pengurusan izin tanda daftar usaha - Diberikan kemudahan akses informasi terhadap lokasi yang ditempati pedagang

				<p>kesempatan berusaha bagi PKI melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan</p> <p>• Peraturan Daerah</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial,ekonomi,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya 4. Kepala daerah berweangan melarrang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL		
ASPEK MANAJEMEN LAHAN						
10	Kesesuaian dengan peruntukan lahan PKL	PKL yang menempati lokasi hendaknyaharus memperhatikan pola pemanfaatan ruang yang ditempati para	Kewajiban dan kewenangan pengendalian ruang, dalam menjalankannya pemerintah mempunyai kewenangan azas-azas sebagai berikut :	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 5 tentang tujuan penataan dan 	<p><i>“ Lokasi yang ditinggali PKL kebanyakan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.”</i></p> <p><i>“Sentra PKL merupakan lokasi yang jelas buat PKL”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian penyuluhan untuk para pedagang agar sadar akan hukum dan selalu menaati peraturan perundangan yang berlaku - Pemberian reward untuk pedagang yang

		pedagang	Hak atas lahan (<i>Bundles of Right</i>), kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kewenangan pengaturan dan pengendalian (<i>Policy Power</i>) <i>Policy power</i> merupakan kewenangan dalam menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi	pemberdayaan PKL adalah a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai peruntukannya, b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri, c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan	menempati lokasi usaha sesuai dengan peraturan. - Melakukan sentralisasi PKL untuk kesesuaian dengan peruntukan lahan
--	--	----------	---	--	--

			<p>kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya (Kwanda 2004)</p>	<p>lingkungan dan pasal 12 ayat 1 tentang lokasi PKL yang bersifat permanen huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, BAB II Penataan Tempat Usaha pasal 2 nomor 2. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan , memindahkan dan menghapus lokasi PKL, 3. 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekitarnya 4. Kepala daerah berweangan melarrang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL</p>		
--	--	--	--	--	--	--

11	Luas kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL	Pembatasan luas lokasi PKL sangat diperlukan agar PKL tertata rapi.	Arahan Perizinan dalam pemanfaatan ruang berfungsi untuk sebagai dasar pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun ketentuan perizinan,, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal dan kualitas minimum yang ditetapkan .(Rahmi, 2004).	Permendagri nomor 41 tahun 2012 bagian keempat penetapan lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<i>“Luasan lokasi dengan jumlah PKL perlu pembatasan hal tersebut semata-mata untuk kemudahan penataan”</i>	- Pembatasan jumlah PKL yang disesuaikan dengan luasan lahan
12	Pengaruh jarak yang digunakan	Pembatasan jarak antar PKL	Berdasarkan luas bangunan/ tempat berdagang (space	Undang-Undang No.17 tahun 2003 pasal 5 huruf b.	<i>“Penataan jarak diharapkan bisa mengarahkan</i>	- Penetapan luasan lapak yang digunakan dengan

	berdagang antar PKL	dilakukan untuk menyeimbangkan anatara kebutuhan ruang dengan jumlah PKL	use) terdiri dari 7 kelompok yaitu PKL dengan luasan 1-3m.	menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur.	<i>PKL agar tertata rapi dan tidak meluber"</i>	luas 2x2 m - Jarak antar lapak maksimal 1 m
ASPEK EKONOMI						
13	Besaran biaya operasional	Dalam melangsungkan aktivitasnya para pedagang membutuhkan listrik, air dan sarana dan prasarana lainnya, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut pedagang mengeluarkan biaya operasional	Pedagang dalam sektor ekonomi merupakan pedagang kecil dengan ciri-ciri rendahnya biaya operasional (Kemala ChandraKirana dan Isono Sadoko (1994)	Permendagri No.41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 34 ayat 2 lokasi PKL bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana dan prasarana antara lain fasilitas listrik, air tempat sampah	<i>"Kebanyakan pengelola PKL meminta pungutan dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan PKL". "PKL tidak keberatan jika mengeluarkan biaya tambahan untuk penerangan listrik dan air."</i>	- Jumlah biaya yang dikeluarkan pedagang untuk biaya operasional tidak boleh terlalu tinggi

				dan toilet.		
14	Besaran tingkat pendapatan pedagang	Tingkat pendapatan pedagang sangat erat kaitanya dengan lokasi diharapkan upaya penataan dengan lokasi yang baru tidak mempengaruhi tingkat pendatan pedagang	PKL tergolong sektor informal yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi marginal yang memiliki ciri-ciri modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil, dan diusahakan berdasarkan hitungan harian (Wirosandjoyo, 1985). pengaturan maupun pengarahan PKL harus mempertimbangkan karakteristik PKL dan karakteristik konsumen. Indikasi	Perpres No. 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pasal 3 ayat 5 peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud merupakan upaya perbaikankualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai peruntukannya.	<i>“Pendapatan pedagang ditentukan dengan letak lokasi yang strategis dan aksesibilitas yang tinggi, karena banyak masrakat yang melakukan aktivitas.”</i>	- Lokasi dengan letak yang strategis serta aksesibilitas yang tinggi untuk menunjang pendapatan pedagang.

			terhadap tingkat pendapatan PKL indikasi ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan PKL di suatu Lokasi maka terjadi kecendrunagan kawasan tersebut menjadi sasaran PKL yang biasanya berdekatan dengan lokasi Formal. (Rustianingsih, 2004)			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisa, 2014

Berdasarkan hasil arahan diatas maka akan ditentukan deleniasi kawasan PKL di Gelora Sepuluh Nopember dengan berdasarkan karakteristik jenis barang dagangan yang dihubungkan dengan pendapatan pedagang , sarana usaha yang digunakan serta sifat kegiatan usaha. Dimana nantinya akan diketahui batas deleniasi kawasan PKL berdasarkan karekteristik. Dari jenis barang berdasarkan karakteristik aspek fisik PKL terbagi menjadi beberapa kategori yaitu makanan, minuman, aksesoris dan konveksi dengan pembanding berupa sarana yang digunakan, kebutuhan ruang, dan sifat kegiatan usaha. PKL yang berada Kawasan Gelora Sepuluh Nopember didominasi oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman . penjual konveksi baju bola dan aksesoris. Pada sisi utara penjual didominasi oleh pedagang baju bola dengan prosentase 24%. Disi selatan dan barat didominasi oleh pedagang yang berjualan makanan dan minuman dengan prosentase 42% . pada sisi barat merupakan pedagang yang berada disekitaran Taman Mundu. Sedangkan pada sisi tengah depan stadion didominasi oleh pedagang aksesoris. Spesifikasi jenis barang yang didagangkan dipengaruhi oleh sarana berdagang, sifat kegiatan usaha, kebutuhan ruang serta jenis dagangan disekitarnya. Fungsi kegiatan yang berada diman mundhu dapat diarahkan sebgai fungsi pelayanan hiburan dan sosial.

PKL yang berada pada sekitaran Taman Mundhu kebanyakan menjual makanan dan minuman, karena berlokasi disebelang Gelora Sepuluh Nopember sehingga tidak terpengaruh secara lansung terhadap jenis dagangan kawasan sekitarnya yaitu penjual baju bola. Karena pedagang taman mundhu memilih lokasi dekat dengan konsumen maka PKL lebih memilih jenis makanan dan minuman yang memiliki pangsa pasar yang lalu lalang dan sifat dagangan yang cepat laku. Sedangkan disisi utara stadion menjual barang dagangan berdekatan dengan fungsi ruang publik sebagai stdion sepak bola yaitu menjual baju bola. Secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi jenis dagangan yang dijual PKL. Pada

sisi ini pedagang memilih pangsa pasar pengunjung yang khusus datang untuk membeli perlengkapan olahraga atau baju bola.

Pedagang yang menjual barang dagangan secara spesifik menjadi potensi tersendiri dan perlu dipertahankan untuk menjadi suatu identitas kegiatan kawasan. Pedagang pada sisi utara ini memang diarahkan untuk sentra penjual baju bola dengan harga yang relatif terjangkau. Agar identitas tersebut dikenal masyarakat luas maka dapat dilakukan dengan promosi wisata belanja baju bola dengan harga terjangkau. Sedangkan pada sisi selatan dan barat didominasi dengan penjual makanan dan minuman yang bisa diarahkan menjadi alternatif kuliner Surabaya.

Pada sisi tengah dapat diarahkan untuk jenis dagangan berupa aksesoris sebagai oleh-oleh khas Surabaya khususnya yang berhubungan dengan olahraga sepak bola. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Arahan Penataan Zonasi PKL
di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

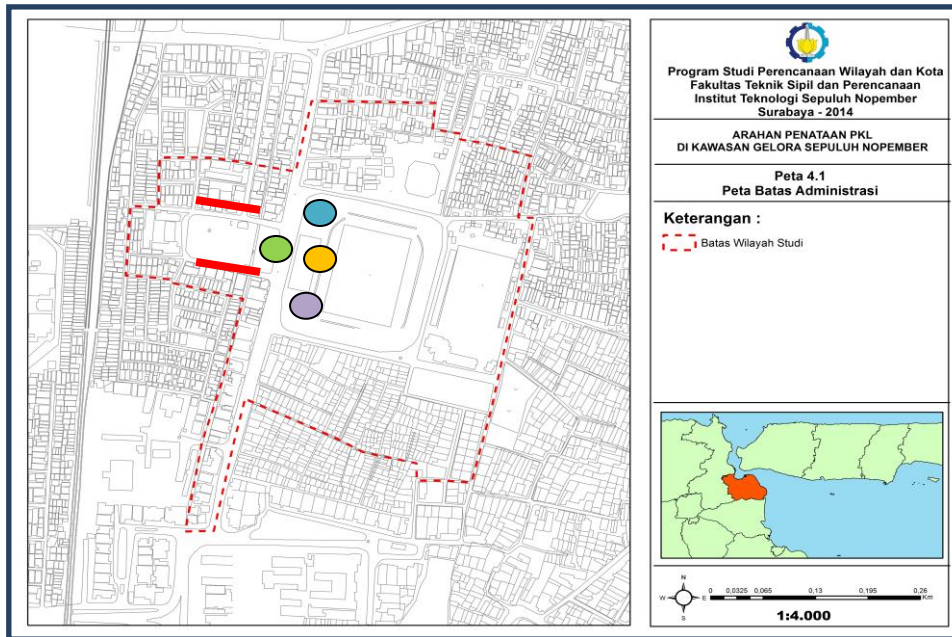
No	Lokasi	Karakteristik Pedagang	Arahan Penataan
1	Pada sisi utara stadion Gelora Sepuluh Nopember	Penjual yang berada pada sisi ini umumnya berjualan baju bola dengan menggunakan gerobak dengan konsumen membeli perlengkapan baju bola. Lapak pedagang memiliki lua 2x3 meter. Waktu berdagang pagi-siang dan sore sampai malam	Dikhususkan jenis dagangan baju bola berciri khas kawasan stadion yang bisa dijadikan sebagai wisata belanja khas surabaya. upaya penunjang yang dapat dilakukan penetapan luasan lapak.dapat dilakukan pembatasan jam operasional

2	Pada sisi tengah stadion Gelora Sepuluh Nopember	Penjual umumnya menjual aksesoris dengan menggunakan gelaran.lapak pedagang memiliki luas 1x3m	Diarahkan untuk menjual aksesoris yang dapat dijadikan saouvenir khas sesuai dengan ciri khas kawasan
3	Pada sisi selatan stadion Gelora Sepuluh Nopember	Penjual umumnya menjual makanan dan minuman dengan menggunakan gerobak. Lapak pedagang memiliki luas 1x3 m. umumnya menempati are parkir dan badan jalan. Waktu berdagang pagi-siang dan sore sampai malam	Diarahkan untuk melayani kebutuhan pengunjung dapat juga diarahkan sebagai alternatif kuliner disurabaya. Upaya penunjang penataan yang dapat dilakukan yaitu perlu adanya fasilitas sanitasi yang baik dan menunjang kesehatan lingkungan serta dapat dilakukan pembatasan jam operasional
4	Pada Taman Mundu sisi selatan	Pedagang dengan fungsi kegiatan sebagai hiburan dan sosial. Sebagian berdagang makanan dan minuman dengan gelaran. Kawasan penunjang dari aktivitas berdagang di stadion Gelora Sepuluh nopember. Luasan lapak lebih dari 2 meter Umumnya menempati trotoar dan mengganggu pejalan kaki	Diarahkan untuk menunjang aktivitas kegiatan berdagang dari stadion Gelora Sepuluh Nopember. Upaya penunjang yang dapat dilakukan adalah penambahan fasilitas penerangan
5	Pada Taman	Pedagang umumnya berjualan makanan dengan	Diarahkan untuk menunjang aktivitas

	Mundu sisi utara	sarana gelaran. Menempati trotoar dan area parkir. Limbah yang dihasilkan secara langsung dibuang pada saluran drainase pinggir jalan.	kegiatan berdagang dari stadion Gelora Sepuluh Nopember. Perlu adanya fasilitas sanitasi yang baik dan menunjang kesehatan lingkungan serta perlu pengaturan terkait dengan manajemen perparkiran
--	------------------	--	---

Sumber : Hasil Analisa, 2014

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Keterangan :

— : pada sisi utara dan selatan

Taman Mundu yang
digunakan sebagai penunjang
kawasan

• : pada sisi utara stadion yang diarahkan untuk
berdagang PKL konveksi dan baju sepak
boladengan gerobak

• : pada sisi tengah stadion yang diarahkan
untuk berdagang aksesoris dengan gelaran

• : pada sisi selatan stadion yang diarahkan
untuk berdagang makanan dan minuman
dengan sarana gerobak

• : pada sisi selatan Taman Mundu yang
diarahkan sebagai penunjang kawasan
dengan fungsi kegiatan hiburan dan sosial

Gambar
Zonasi PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember
Sumber: Hasil Analisa, 2014

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan Pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada lokasi penelitian pedagang mempunyai karakteristik yang dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek kegiatan dan aspek lingkungan. Untuk aspek fisik yang terdiri dari

a. **Jenis barang**

jenis barang bahwa kebanyakan PKL menjual makanan hal tersebut dikarenakan kawasan Gelora Sepuluh Nopember mempunyai lokasi yang strategis dan berada dipinggir jalan kolektor sekunder

b. **Pendapatan**

Pendapatan pedagang di wilayah tergantung dari jenis barang yang diperdagangkan. Umumnya penjual makanan mempunyai pendapatan yang lebih besar , demikian juga dengan penjual konveksi seperti baju bola. Kedua pedagang yang menjual jenis barang tersebut mempunyai pendapatan yang lebih dibandingkan pedagang yang menjual jenis barang lain.

c. **Modal Usaha**

Kebanyakan pedagang menggunakan modal usaha sendiri untuk menjalankan kegiatan usahanya hal ini dipilih pedagang karena pedagang merasa dalam memakai modal sendiri lebih menguntungkan daripada menjalankan usaha dari modal pinjaman

d. **Sarana yang Digunakan**

Pedagang umumnya menggunakan gerobak dalam menjalankan usahanya hal ini dikarenakan adanya batasan waktu berdagang. Gerobak dipilih oleh pedagang karena dianggap lebih efisien dan praktis dalam hal bongkar pasang barang dagangan untuk kegiatan usaha

e. **Tingkat Keterampilan**

Pedagang yang berada dilokasi penelitian umumnya tidak memiliki tingkat keterampilan yang cukup. Hal ini akan berdampak pada cara pedagang dalam hal menjalankan kegiatan usahanya untuk menarik para pembeli

f. **Tingkat Pendidikan**

Kebanyakan pedagang yang berada pada kawasan Gelora Sepuluh Nopember hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA. Hal ini akan berkaitan dengan latar belakang menjadi PKL karena masalah ekonomi. Melihat sulitnya mencari pekerjaan dengan jenjang lulusan SMA

g. **Tenaga Kerja**

Sumber tenaga kerja yang digunakan oleh para pedagang di kawasan Gelora Sepuluh Nopember umumnya menggunakan sumber tenaga dari anggota keluarganya sendiri

h. **Luas Lapak**

Luas lapak yang digunakan pedagang pada kawasan penelitian berkisar antara 1-3 m².

i. **Status Lapak**

Dalam melakukan aktivitasnya pedagang memiliki lapak yang digunakan untuk berjualan . kebanyakan

lapak dari para pedagang tersebut merupakan hak milik mereka sendiri atau permanen

5.1 Karakteristik Aspek Kegiatan PKL di Kawasan Penelitian

a. Fungsi Kegiatan

pada fungsi kegiatan kebanyakan pedagang mempunyai fungsi Kegiatan usaha sebagai pedagang eceran

b. Sifat Kegiatan Usaha

kebanyakan sifat kegiatan usaha pedagang bersifat permanen yaitu pedagang yang menempati pada suatu tempat.

c. Waktu Kegiatan Usaha

kebanyakan waktu kegiatan berdagang dilakukan pada waktu sore sampai malam hari ini dikarenakan pembeli jumlahnya lebih banyak pada waktu ini.

d. Interaksi Sosial

kebanyakan interaksi antar pedagang yang ada di lokasi penelitian tidak melakukan tawar-menawar karena didominasi oleh penjual makanan dan minuman.

5.1.2 Karakteristik Aspek Psikologis PKL di Kawasan Penelitian

Karakteristik Aspek Psikologi PKL meliputi suasana psikologis PKL yaitu tenang dan tidak tenang dengan adanya penertiban oleh regulator karena keberadaannya menimbulkan sejumlah masalah. Dengan suasana psikologis yang seperti ini maka pihak regulator seharusnya dapat dengan mudah dalam

menata PKL. Pedagang cenderung akan menuruti aturan selama usaha mereka masih tetap bisa berjalan

5.2 Analisa Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Surabaya

1. Besaran Biaya operasional
2. Status lahan yang digunakan PKL
3. Besaran tingkat pendapatan pedagang
4. Adanya Pemberian penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha
5. Terjalinya Komunikasi antar stakeholder
6. Adanya kerjasama kemitraan dengan PKL
7. Pengaruh lingkungan sekitar terhadap adanya PKL
8. Tmbulnya kemacetan akibat adanya PKL
9. Luasan kawasan operasional yang digunakan berdagang PKL
10. Penggunaan jenis alat peraga.
11. Pengaruh jarak yang digunakan berdagang PKL
12. Adanya perizinan lokasi yang jelas.
13. Respon masyarakat sekitar terhadap adanya PKL
14. Kesesuaian peruntukan lahan bagi PKL

5.3 Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopemeber

Setelah melaakukan analisis Deplhi dilakukan perumusan arahan Penataan PKL di Gelora sepuluh Nopember

Rumusan Arahann Penataan PKL
Di Gelora Sepuluh Nopember Surabaya

NO	Faktor yang berpengaruh	Rumusan Arahann Penataan PKL
1	Besaran Biaya Operasional	Jumlah yang dikeluarkan pedagang untuk biaya operasional tidak boleh terlalu tinggi
2	Status lahan yang digunakan PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan biaya sewa lahan untuk pedagang - Pengaturan jenis pedagang yang mempunyai lokasi lahan permanen dan sementara
3	Besaran Tingkat pendapatan pedagang	. Lokasi dengan letak yang strategis serta aksesibilitas yang tinggi untuk menunjang pendapatan pedagang.
4	Penyuluhan Tentang waktu, tempat dan sarana usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas penyuluhan diatur sebulan sekali - Pemilihahn wakil PKL yang bertanggung jawab - Diberikan papan pemberitahuan tentang tata cara berdagang
5	Komunikasi Antar Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat acara sarahsehan dengan pertimbangan sebulan sekali - Pemberian papan pengumuman tetntang informasi-informasi yang telah di koordinasikan
6	Kerjasama kemitraan dengan PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kemudahan untuk para pedagang dalam bantuan modal usaha - Pembentukan koperasi simpan pinjam
7	Kualitas lingkungan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian tempat sampah yang cukup di lokasi berdagang pkl - Penggunaan tenda untuk berdsgang PKL agar terlihat rapi
8	Kemacetan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan perparkiran yang baik - Pembatasan jam operasional berdagang PKL

9	<i>Luas kawasan operasional</i>	- Pembatasan jumlah PKL yang disesuaikan dengan luasan lahan
10	Jenis alat peraga yang digunakan	- Penggunaan alat peraga yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang
11	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	- Pentapan luasan lapak yang digunakan dengan luas 2x2 m - Jarak antar lapak maksimal 1 m
12	Perizinan lokasi	- Diberikan kemudahan terhdap pengurusan izin tanda daftar usaha - Diberikan kemudahan akses informasi terhadap lokasi yang ditempati pedagang
13	Respon masyarakat sekitar	- terdapat cukup tempat sampah dilokasi berdagang PKL - Pengelolaan parkir yang baik agar tidak menghambat lalulintas - Pemberian tenda agar PKL terlihat rapi
14	Kesesuaian dengan peruntukan lahan	- Pemberian penyuluahn untuk para pedagang agar sadar akan hukum dan selalu menaati peraturan perundangan yang berlaku - Pemeberian reward untuk pedagang yang menempati loaksi usaha sesuai dengan peraturan.

5.4 Saran Penelitian

Berdasarkan Temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka disarankan beberapa hal, antara lain :

1. Perlu dilakukan studi eksplorasi mengenai Lokasi PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember karena

terkait kebijakan dari pemerintah yang menata PKL dengan cara melakukan stralisasi tempat

2. Dalam Penataan PKL pengambilan kebijakan hendaknya pemerintah melakukan kajian dari sosial ekonomi dan sosial masyarakat setempat
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota Surabaya dalam menyusun kebijakan/ regulasi sehingga dalam pengelolaanya dan penertiban PKL tidak terjadi konflik dan memiliki kejelasan lokasi sebelum melakukan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Alisjahbana, *Urban Hidden Economy* Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan Surabaya, Lembaga Penelitian ITS, 2003

Budi, Ari Sulisty. 2006. Tesis : Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Presepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemasang. Semarang: Universitas Diponegoro

Manning dan Effendi, T.N. Urbanisasi, *Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, Jakarta. Yayasan obor Indonesia, 1985

Neo dan Wing. 2005. *The 4Rs of Asian Shopping Centre Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Rifai, M.A., *Manusia Madura*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007

Sulistyarso, Haryo. Penetapan Kawasan PKL Dalam Tata Ruang Kota dalam Seminar Pemberdayaan PKL Dalam Menunjang Penataan Ruang Kota, 2004

Yamin, Sofyan. 2000. *SPSS Complete Teknik Analisa Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS*. Jakarta. Penerbit: Salemba Indotek

Wirahadikusumah, Miftah. Sektor Informal Sebagai Bumper Masyarakat Kapitalis. Prisma, 1991

Laporan Penelitian

- Firmansyah, Fandy (2009) Penataan Kawasan PKL Berdasarkan Preferensi Pedagang Di Kawasan Pusat Kota Jember : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Oktaviana, Hetty (2006) Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Karakteristik Kegiatan dan Fisik studi kasus : Kawasan Ampel. Kota Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Resty, Annisa Sofyan (2010) Arahan Penentuan Lokasi Sentra PKL Di Kawasan Surabaya Barat Berdasarkan Preferensi PKL, Konsumen, dan Regulator : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

PERATURAN DAN KEBIJAKAN

- Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
- Perwali No. 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Jenis Kegiatan, Jumlah PKL, dan Jenis Barang yang Diperdagangkan Pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya
- Perwali No. 33 Tahun 2008 menandakan bahwa tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur tentang penataan PKL
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

ARTIKEL DARI INTERNET

<http://www.pustakakendee.net/2012/05/analisis-peraturan-daerah-kota-jambi.html>

<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-16742-3607100006-Chapter1.pdf>

<http://mohammadwasil.wordpress.com/>

Athiyyah. 2007. *Persoalan Pedagang Kaki Lima di Surabaya Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya*. (dikutip dari <http://ummuathiyya.blogspot.com/2007/12/persoalan-pedagang-kaki-lima-di.html>, pada tanggal 30 Oktober 2013, pada pukul 14.00 WIB)

Firnandy. 2003. *Studi Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan Ke Depan*, Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas. (dikutip dari <http://mohammadwasil.wordpress.com/> pada tanggal 4 November 2013, pada pukul 21.30 WIB)

Hidayat. 1983. "Definisi, Kreteria dan Evolusi Konsep Sektor Informal : Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV ", ANALISA, Tahun XII, Nomor 7, Fakultas Ekonomi, Universitas Pedjajaran, Bandung. (dikutip dari <http://ssantoso.blogspot.com/2013/06/survivalitas-pedagang-warung-kopi.html>, Pada tanggal 4 November 2013, pada pukul 20.35 WIB)

Lampiran A

DESAIN KUISIONER

KUISIONER PENATAAN PKL DI KAWASAN GELORA SEPULUH NOPEMBER

Dalam penataan kawasan PKL, tentunya anda memiliki pendapat sendiri mengenai penataan kawasan PKL yang mendukung kegiatan usaha anda dan lingkungan sekitar. Kuisisioner ini disusun berdasarkan atas karakteristik anda sebagai seorang PKL.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali karakteristik PKL mengenai prinsip-prinsip penataan kawasan penelitian. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti untuk menyusun arahan penataan PKL di sekitar Stadion Gelora Sepuluh Nopember.

Kuisisioner ini ditujukan semata-mata dalam rangka penelitian Tugas Akhir (skripsi) yang berjudul “ Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember”.

Dengan ini, dimohon kesedian dari bapak/ibu/saudara/saudari untuk dapat menjadi responden dalam penelitian ini. Bapak/ibu/saudara/saudari diharapkan dapat memberi jawaban terhadap beberapa pertanyaan dalam kuisisioner ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat tercapai dan sukses.

Adapun identitas peneliti sebagai berikut :

Nama	: Septian Eko Wibisono
NRP	: 3610100023
Jurusan	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya

Alamat Peneliti : JL. Jagiran 1/ 48 Surabaya

No. HP Peneliti : 087855371779

JAWABAN ANDA TIDAK AKAN BERDAMPAK NEGATIF BAGI ANDA DAN AKAN DILINDUNGI KERAHASIAANYA, ATAS PARTISIPASINYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH BANYAK.

Petunjuk:

ISILAH TITIK-TITIK DI DALAM KOLOM DAN LINGKARILAH JAWABAN YANG DIANGGAP BENAR

PERTANYAAN MENGENAI KARAKTERISTIK PKL

Pertanyaan dibawah ini berkenaan dengan pendapat bapak/ibu tentang karakteristik PKL

Data Pribadi		Keterangan
1	Nama :	
2	Alamat :	
No	Variabel	Kategori
Karakteristik Aspek Fisik PKL		
1	Jenis Barang	a. Makanan
		b. Minuman
		c. Aksesoris
		d. Barang bekas/rombeng
		e. Barang pecah belah
		f. Kaset/CD
		g. Konveksi

		h. Tukang sul/tambal
		i. Lainnya.....
2	Pendapatan	a. < Rp 500.000,-
		b. Rp 500.000 – Rp 1.000.000,-
		c. Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000,-
		d. > Rp 2.000.000,-
3	Modal usaha	a. Pribadi
		b. Pinjaman
		c. Orang tua
4	Sarana yang digunakan	a. Bangunan permanen
		b. Gerobak
		c. Gelaran
5	Tingkat keterampilan	a. Memiliki keterampilan khusus
		b. Tidak memiliki keterampilan khusus
6	Tingkat Pendidikan	a. SD
		b. SMP
		c. SMA
7	Tenaga kerja	a. Anggota keluarga
		b. Kerabat
		c. Orang lain
8	Luas Lapak	a. 1 – 3 m ²
		b. 4 – 6 m ²
		c. 7 – 9 m ²
		d. 10 – 12 m ²
		e. 13 – 15 m ²
		f. 16 – 17 m ²
		g. > 18 m ²
9	Status Lapak	a. Sewa
		b. Permanen

Karakteristik Aspek Kegiatan PKL		
1	Fungsi kegiatan usaha	a. Fungsi perdagangan eceran
		b. Fungsi pelayanan jasa
		c. Fungsi lainnya (hibutan, sosial)
2	Sifat kegiatan usaha	a. Permanen (menetap)
		b. Non-permanen (berpindah-pindah)
3	Waktu kegiatan usaha	a. Pagi-siang
		b. Pagi-sore
		c. Pagi-malam
		d. Sore-malam
		e. Malam-pagi
4	Adanya tawar menawar	a. Tawar-menawar
		b. Tidak terdapat tawar-menawar
Karakteristik Aspek Psikologi PKL		
1	Suasana psikologis	a. Tenang
		b. Tidak tenang
2	Latar belakang menjadi PKL	a. Terpaksa karena memiliki kesulitan hidup dan tidak memiliki tempat tinggal
		b. Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
		c. Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan

TERIMA KASIH

No.	Jenis Barang Dagangan	Tingkat Pendidikan	Modal	Sarana Dagang	Tingkat Keterampilan	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kerja	Luas Lapak	Status Lapak	Fungsi Kegiatan	Sifat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tawar-Menawar	Psikologis Pedagang	Latar Belakang Menjadi PKL
1	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
2	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
3	Minuman	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
4	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
5	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
6	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
7	penjual buku	500-1.000.000	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
8	Makanan	500-1.000.000	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
9	Aksesoris	500-1.000.000	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
10	Persewaan mobil-mobilan	> Rp 2.000.000,-	Pinjaman	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	13-15 m2	Permanen	Pelayanan Jasa	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan

11	Sepatu	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Memiliki keterampilan khusus	SMA	kerabat	4-6 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan
12	barang bekas	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SD	Anggota Keluarga	1-3 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
13	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
14	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
15	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
16	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
17	service kunci	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pelayanan Jasa	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
18	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
19	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Memiliki keterampilan khusus	SD	Anggota Keluarga	1-3 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
20	penjual koran/majalah	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pinjaman	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
21	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki

					husus										tempat tinggal
22	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
23	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
24	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
25	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
26	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
27	penjual korek api dan gas	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gelaran	Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
28	Aksesoris	500.000- 1.000.000	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
29	Makanan	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gerobak	Memiliki keterampilan husus	SD	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
30	Aksesoris	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Sewa	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
31	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan husus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal

32	penjual balon udara	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
33	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	bngunan prmnen	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan
34	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan
35	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
36	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
37	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
38	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	bngunan prmnen	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-sore	Ada	Tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan
39	Konveksi	> Rp 2.000.000,-	Pribadi	bngunan prmnen	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-sore	Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
40	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
41	Konveksi	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
42	Konveksi	Rp 500.000 - Rp	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Melihat potensi yang jauh lebih

		1.000.000,-			keterampilan khusus										menguntungkan
43	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
44	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pinjaman	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
45	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
46	Aksesoris	< Rp 500.000,-	Pinjaman	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
47	Minuman	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
48	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
49	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
50	Makanan	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
51	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
52	Kaset/CD	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-sore	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal

53	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
54	Kaset/CD	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
55	Sepatu	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
56	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pinjaman	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-sore	Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
57	Ahli Kunci	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gerobak	Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pelayanan Jasa	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
58	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
59	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
60	Sepatu	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
61	Kaos kaki	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
62	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
63	Konveksi	Rp 1.000.000 -	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi

		Rp 2.000.000,-			keterampilan khusus										memiliki tempat tinggal
64	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
65	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
66	Kaos kaki	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
67	Sepatu	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
68	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
69	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
70	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
71	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
72	Kaos kaki	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
73	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal

74	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
75	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
76	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
77	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
78	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
79	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
80	Makanan	> Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
81	Makanan	> Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
82	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
83	Minuman	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
84	Makanan	Rp 500.000 - Rp	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi

		1.000.000,-			keterampilan khusus										memiliki tempat tinggal
85	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	4-6 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
86	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
87	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
88	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
89	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
90	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non-Permanen	Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
91	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Orang Tua	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
92	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
93	Konveksi	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
94	Aksesoris	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang & Sore-Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal

95	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
96	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
97	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
98	Aksesoris	< Rp 500.000,-	Pribadi	Gelaran	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Sore- Malam	Tidak Ada	Tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal
99	Makanan	Rp 500.000 - Rp 1.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMP	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Permanen	Sore- Malam	Ada	Tidak tenang	Melihat potensi yang jauh lebih menguntungkan
100	Makanan	Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000,-	Pribadi	Gerobak	Tidak Memiliki keterampilan khusus	SMA	Anggota Keluarga	1-3 m2	Permanen	Pedagang Eceran	Non- Permanen	Pagi-siang	Tidak Ada	Tidak tenang	Masalah ekonomi, tetapi memiliki tempat tinggal

LAMPIRAN B

ANALISIS STAKEHOLDER

Kelompok Stakeholders	Interest Stakeholders Terhadap Program	Pengaruh (Influence) Stakeholders Terhadap Program	Dampak Program Terhadap Interest (+) (0) (-)	Kepentingan (Importance) Stakeholders Terhadap Kesuksesan Program	Pengaruh (Influence) Stakeholders Terhadap Program
PEMBUAT REGULASI (PEMERINTAH)					
Bappeko Kota Surabaya	1. Penyusun Rumusan Kebijakan Teknis 2. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan 3. Pengkoordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.	Monitoring implementasi perencanaan	(+)	(5)	(5)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Merumuskan kebijakan teknis bidang cipta karya 2. Penyelenggaraan rencana teknis tata ruang dan bangunan 3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan atau rekomendasi perizinan sesuai ketentuan	1. Pembuat kebijakan teknis (pedoman teknis) untuk seluruh pemanfaatan ruang. 2. Pemantau dan menganalisa kelayakan teknis 3. Penentu pemberian	(+)	(4)	(4)

		izin kegiatan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
Dinas Koperasi dan UMKM	Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam hal pengelolaan dan pembimbingan PKL dan UKM yang legal agar nantinya bisa mampu menjadi sektor formal yang berizin	Pengelolaan dan pembinaan PKL dan UKM yang legal dan berizin	(+)	(5)	(5)
Satpol PP	1. Pelaksanaan kebijakan dan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum di daerah 2. Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah, peraturan bupati	1. Pelaksanaan pembinaan dan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai program pedoman dan petunjuk teknik			
SWASTA					
Pengusaha	Pengusaha PKL	Berkontribusi dalam memberikan bantuan pendanaan untuk penataan PKL	(+)	(3)	(3)

MASYARAKAT					
Ketua paguyuban PKL	Ketua organisasi perkumpulan PKL	1. Pengelola dan pengatur PKL 2. penampung aspirasi PKL	(+)	(5)	(5)
Akademisi	1. Pengkaji permasalahan PKL 2. Mengkritisi permasalahan PKL	Dapat memberikan arahan program penataan PKL	(+)	(5)	(5)
Tokoh masyarakat	Memiliki pemikiran lebih terhadap adanya PKL	Mendampingi PKL untuk penataan kawasan yang lebih baik	(+)	(4)	(4)

Sumber: Hasil Analisa, 2014

Kepentingan (importance)

1. Little/No Importance
2. Some Importance
3. Moderate Importance
4. Very Importance
5. Critical Player

Pengaruh (influence)

1. Little/No influence
2. Some influence
3. Moderate influence
4. Significant Influence
5. Very Influence

Kolom Dampak

- (+) Dampak Positif
(0) Tidak Berdampak
(-) Dampak Negatif

Influence of Stakeholders		Importance Of Activity To Stakeholder				
		Little/No Importance	Some Importance	Moderate Importance	Very Importance	Critical Player
		1	2	3	4	5
Little/No Influence	1					
Some Influence	2					
Moderate Influence	3			Tokoh masyarakat	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
				Swasta		
Significant Influence	4				Akademisi	
					Satpol PP	
Very Influential	5					Ketua paguyuban
						Dinas koperasi dan UMKM
						Bappeko Kota Surabaya

Sumber: Hasil Analisa, 2014

LAMPIRAN C

KUESIONER ANALISIS DELPHI

Kuisisioner Eksplorasi

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penataan PKL di

Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Dengan hormat,

Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap arahan penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember, Kota Surabaya. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan menjadi daftar dalam perumusan Arahan Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Terima kasih kepada bapak/ibu yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan sesuai dengan kompetensi bapak/ibu pada bidang ini.

Hormat Saya,
Septian E.W – Mahasiswa PWK ITS
HP : 087855271779

Petunjuk umum :

Pertanyaan pada kuisioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember Tambaksari. Cara pengisian kuisioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat anda

Identitas Responden

Nama :

Instansi/bidang :

Eksplorasi Pendapat Responden

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Keterangan

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan			
	Status lahan			
	Tingkat pendapatan pedagang			
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha			
	Komunikasi antar stakeholder			
	Kerjasama kemitraan dengan PKL			

Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar			
	Kemacetan			
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional			
	Jenis alat peraga yang digunakan			
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL			
	Perizinan lokasi			

2. Selain variabel diatas, apakah menurut anda ada faktor lain yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel Lain	Alasan

LAMPIRAN C.1

HASIL WAWANCARA EKSPLORASI DELPHI TAHAP I

Identitas Responden 1

Nama : Ibu Ema
Instansi/bidang : Staff Dinas PU dan Cipta Karya Surabaya

1. Menurut anda Variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan		V	Karena kebanyakan pedagang tidak mempunyai hak atas lahan yang mereka tempati
	Status lahan	V		Status lahan (tempat pedagang berjualan) pedagang pedagang umumnya bukan atas hak milik perseorangan
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Pemilihan lokasi yang startegis akan mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Pemberian penyuluhan diharapkan PKL bisa tertata dengan rapi karena mereka mempunyai pengetahuan
	Komunikasi antar stakeholder	V		Informasi yang berkaitan dengan PKL dapat langsung diketahui pedagang
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Pemberian modal usaha untuk kelangsungan PKL
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Kualitas lingkungan disini kebersihan PKL yang harus diperhatikan
	Kemacetan	V		Pembatasan jumlah PKL agar tidak meluber ke badan-badan jalan.
Pengendalian	Luas	V		Luas kawasan operasional harus

kegiatan pemanfaatan ruang	kawasan oprasional			diatur dengan jelas terhadap jumlah PKL yang menempati suatu lokasi
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		PKL terlihat tertata rapi dan tidak kumuh karena alat peraga suda d atur
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL		V	Jarak antar satu lokasi PKL dengan lokasi lain lebih jadi pertimbangan
	Perizinan lokasi	V		Izin lokasi sebenarnya juga kurang jelas arahnya dalam pekot . karena sektor informal bukan menjadi prioritas pemerintah

Identitas Responden 2

Nama : Devrie Novianto

Instansi/bidang : Staff bidang ekonomi BAPPEKO

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan		V	Harga lahan menjadi prioritas terakhir
	Status lahan	V		Pedagang menempati lahan sewa kebanyakan karena PKL berlokasi disembarang tempat
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Pendapatan pedagang yang tinggi cenderung melihat pada lokasi yang ramai dan dikunjungi banyak orang
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Peningkatan pengetahuan PKL perlu dtambah karena memandirikan meraka sendiri dengan mendapatkan informasi tentang cara berdagang yang baik
	Komunikasi antar	V		Terjalinnya komunikasi yang baik akan menghindarkan PKL konflik

	stakeholder			dengan pihak regulator
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Bantuan modal usaha diperlukan PKL
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		PKL menyebabkan dampak yang buruk kebanyakan karena kumuh
	Kemacetan	V		Pengaturan perpajakan dengan lokasi berjualan ditrotoar harus diatur
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Luassan PKL harus di cermati karena bila tidak diawasi mereka semakin membesar
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan alat peraga yang mudah dan efisien menjadi prioritas
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL		V	Tentunya untuk penataan PKL supaya ringkas
	Perizinan lokasi	V		Izin lokasi yang ada terkadang terkendala dari pihak regulator

2. Selain faktor diatas, apakah menurut anda ada faktor lain yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Faktor lain	Alasan
Kesesuaian dengan pruntukan lahan	Karena PKL kekurangan tempat untuk melegalkan kegiatan jual beli

Identitas Responden 3

Nama : Bapak Hadi
 Instansi/bidang : Tim teknis lapangan Dinas Koperasi dan UMKM

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan	V		Harga lahan ini pengaruhnya besar untuk penataan. Menjadi tanggung jawab pemerintah kota
	Status lahan	V		Kebanyakan PKL sewa dan tidak permanen
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Pedagang besar memiliki tingkat pendapatan yang besar, pengaruh lokasi juga
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Biar pedagang pinter gampang diarahkan
	Komunikasi antar stakeholder	V		Melakukan koordinasi sebagai kajian bersama untuk penataan PKL
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Koperasi simpan pinjam yang berjalan saat ini
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Kebersihan , kenyamanan daya tarik masyarakat
	Kemacetan	V		Jumlah PKL yang terdata biasanya , penyebab kemacetan
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Lokasi PKL jangan besar-besar yang penting cukup menampung
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Biar rapi dengan tendanisme
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	V		Biar tertata rapi , masyarakat senang melihatnya
	Perizinan	V		Perizinan lokasi banyak yang kurang

	lokasi			jelas sekarang
--	--------	--	--	----------------

2. Selain variabel diatas, apakah menurut anda ada faktor lain yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Faktor lain	Alasan
Biaya operasional	Pedagang butuh sarana dan prasarana seperti listrik dan air

Identitas Responden 4

Nama : Pak Nyoto

Instansi/bidang : Kepala Satpol PP Kecamatan Tambaksari

1. Menurut anda variabel - variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan		V	Harga lahan tidak dimiliki PKL
	Status lahan	V		Kebanyakan sewa lokasi baik itu pedagang keliling sama yang non permanen
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Dilihat dari lokasi yang strategis sama barang yang dijual
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Pembinaan dengan cara yang ditawarkan merupakan pengalaman baru bagi PKL
	Komunikasi antar stakeholder	V		Terjalinya komunikasi yang baik membuat saling terbuka dan mengerti kondisi yang terjadi
	Kerjasama	V		Bantuan modal lunak serta koperasi

	kemitraan dengan PKL			simpan pinjam
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Keamanan , kenyamanan dan ketertiban membuat daya tarik masyarakat tersendiri
	Kemacetan	V		Penataan jumlah pedagang dengan perparkiranya
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Luasan yang dipakai pedagang berjualan harus tersedia sarana dan prasarana
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan tenda cukup bagus untuk mmberikan kesan baik
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	V		Pengaturan jarak berhubungan dengan luasan lokasi biar mudah ditata
	Perizinan lokasi	V		Pemberian izin harus jelas supaya tidak merugikan PKL

2. Selain Variabel diatas, apakah menurut anda ada faktor lain yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Faktor lain	Alasan
Respon masyarakat sekitar	Terkait kondisi kenyamanan dan kualitas lingkungan tersesit untuk menambahi

Identitas Responden 5

Nama : Pak Eddy
 Instansi/bidang : Pengusaha PKL

1. Menurut anda faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban	Alasan
-----------	----------	---------	--------

		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan	V		Harga lahan yang rendah memungkinkan pedagang untuk berjualan
	Status lahan	V		Status lahan yang ditempati non permanen dan membayar retribusi
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Melihat jenis barang yang didagangkan dan keberanian PKL untuk mengambil resiko jualan
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Merupakan hal yang positif buat pedagang
	Komunikasi antar stakeholder	V		Klo komunikasi jalan pedagang senang karena bisa mengakses informasi kedepanya
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Bantuan modal sma koperasi
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Kebersihan dengan kesadaran dri pedagangnya
	Kemacetan	V		Pengelolaan parkir sama PKL liar
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Luas lokasi diusahakan yang besar supaya lapak pedagang menjual banyak
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan tenda sama gerobak
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	V		Jarak yang diatur ukuran tenda 2x2m
	Perizinan lokasi	V		Izin lokasi pada pemerintah , takut dengan penggusuran

Identitas Responden 6

Nama : Bu Suning
 Instansi/bidang : Dosen Tata Kota Unipa

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan		V	Harga lahan yang ada tinggi sehingga kebanyakan PKL menyewa tempat
	Status lahan	V		Persewaan tempat msh menjadi solusi buat pedagang kecil
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Modal usaha mempengaruhi pendapatan pedagang
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Pembinaan yang baik akan meminimalisir konflik
	Komunikasi antar stakeholder	V		Dengan terwujudnya komunikasi akan dengan mudah dalam melaksanakan kenijakan terkait sektor informal
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Pemberian kredit dan koperasi pedagang setempat
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Kualitas lingkungan menentukan aktivitas dan siakp masyarakat
	Kemacetan	V		Perparkiran harus ditata dan PKL yang dipinggir trotoar
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Luas kawasan sekupnya yang terpenting menampung PKL
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan alat peraga yang mudah dan efisien sangat dianjurkan

	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	V		Biasanya tidak lebih antara 1 sampe 2 m antar lapak pedagang
	Perizinan lokasi	V		Pemberian ijin yang jelas tergantung pemerintah setempat

Identitas Responden 7

Nama : Pak Matt

Instansi/bidang : Ketua Paguyuban PKL

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan		V	Lahan yang ada bukan milik swasta melainkan milik pemerintah
	Status lahan	V		Sewa lahan yang ada
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Pendapatan disini ditentukan oleh modal yang besar
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Pembinaan yang dilakukan seperti dialog bersama
	Komunikasi antar stakeholder	V		Komunikasi yang terjalin bisa dijadikan untuk menukar informasi
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Pemberian modal usaha dan koperasi
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Faktor kebersihan dan kenyamanan menjadikan PKL terkesan tertata rapi
	Kemacetan	V		Pengaturan perparkiran yang harus

				dikelola
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Pembatasan luasan merupakan salah satu upaya penataaan
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan tenda-tenda dan gerobak
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL		V	Sekitar 1-2m
	Perizinan lokasi	V		Lokasi berdagang PKL mempunyai izin sendiri

Identitas Responden 8

Nama : Pak Iwan

Instansi/bidang : Tokoh Masyarakat

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Indikator	Variabel	Jawaban		Alasan
		S	TS	
Aspek Ekonomi	Harga lahan	V		Harga lahan merupakan menjadi faktor yang berpengaruh karena dilihat dari lokai PKL
	Status lahan	V		Pedagang kebanyakan menyewa lahan
	Tingkat pendapatan pedagang	V		Tingkat pendapatan bisa dilihat dari lokasi
Aspek sosial	Penyuluhan tentang waktu, tempat dan sarana usaha	V		Penyuluhan tentang tatacara berdagang yang baik memantu PKL
	Komunikasi antar	V		Terjalinya komunikasi yang baik merupakan kemudahan mendapatkan

	stakeholder			informasi
	Kerjasama kemitraan dengan PKL	V		Dengan adanya koperasi simpan pinjam diharapkan bisa membantu PKL
Aspek dampak penataan ruang	Kualitas lingkungan sekitar	V		Faktor kebersihan merupakan jaminan dari lingkungan PKL
	Kemacetan	V		PKL yang menempati trotoar dan badan jalan harus diatur
Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang	Luas kawasan oprasional	V		Luas lahan yang dijadikan tempat berdagang harus ada batsan dengan jumlah PKL
	Jenis alat peraga yang digunakan	V		Penggunaan alat peraga seperti tenda dan gerobak
	Jarak yang digunakan berdagang antar PKL	V		Ketentuan jarak berdagang antar pedagang biar mudah ditata
	Perizinan lokasi	V		Izin lokasi untuk berdagang harus jelas

LAMPIRAN C.2

KUESIONER ANALISIS DELPHI ITERASI I

Kuisioner Iterasi I Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Dengan hormat,

Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap arahan penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember, Kota Surabaya. jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan menjadi daftar dalam perumusan Arahan Penataan PKL diKawasan Gelora Sepuluh Nopember yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Sebelumnya saya sudah menyebar kuesioner yang sejenis, namun terdapat beberapa faktor yang masih belum disepakati oleh beberapa responden. Untuk itu dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan untuk menyamakan pendapat para responden.

Maka dengan menggunakan kuesioner ini, diharapkan dapat menemukan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Dengan ini peneliti mengharap kesediaan bapak/ibu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih atas ketersediaan Anda.

Hormat Saya,
Septian E.W – Mahasiswa PWK ITS
HP : 087855271779

Petunjuk umum :

Pertanyaan pada kuisioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan geloran Sepuluh Nopember Tambaksari. Cara pengisian kuisioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat anda

Identitas Responden

Nama :

Instansi/bidang :

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Keterangan

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan			
Biaya Operasional			
Respon masyarakat sekitar			
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL			
Kesesuaian dengan peruntukan lahan			

2. Selain variabel diatas, apakah menurut anda ada faktor lain yang mempengaruhi penataan PKL di kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel Lain	Alasan

LAMPIRAN C.3

HASIL WAWANCARA ITERASI DELPHI TAHAP II

Identitas Responden 1

Nama : Bu Ema
Instansi/bidang : Staff Dinas PU dan Cipta Karya Surabaya

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan tidak menjadi prioritas dalam penataan PKL karena lahan PKL bukan milik pedagang
Biaya Operasional	V		Pedagang kebanyakan menyewa lahan
Respon masyarakat sekitar	V		Tingkat pendapatan bisa dilihat dari lokasi semakin bersih lingkungan PKL maka semakin banyak masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Penyuluhan tentang tata cara berdagang yang baik membantu PKL. Dalam hal ini pengaturan jarak
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Lokasi hendaknya sesuai dengan guna lahan agar pedagang tertib peraturan

Identitas Responden 2

Nama : Devri Novianto
Instansi/bidang : Staff bidang ekonomi BAPPEKO

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban	Alasan
----------	---------	--------

	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan merupakan menjadi faktor yang berpengaruh karena dilihat dari lokasi PKL
Biaya Operasional	V		Pedagang mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan saran dan prasarana
Respon masyarakat sekitar	V		Kembali lagi pada kualitas dengan lingkungan dan faktor kenyamanan
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Penyuluhan tentang tata cara berdagang yang baik membantu PKL
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Lokasi PKL yang digunakan harus pada lokasi semestinya

Identitas Responden 3

Nama : Pak Hadi

Instansi/bidang : Tim Teknis Lapangan Dinas Koperasi dan UMKM

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan tidak termasuk karena lahan yang digunakan tidak dijual.
Biaya Operasional	V		Seharusnya pengeluaran biaya tidak ada klo terkait sarana dan prasarana
Respon masyarakat sekitar		V	Keberadaan PKL yang rapi dan tertib akan menjadi perhatian masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Pengaturan jarak sangat bisa dipertimbangkan jika dikaitkan dengan luasan lokasi
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Keberadaan PKL kebanyakan menyalahi peraturan. Maka dari itu perlu pengawasan berkala untuk lokasi berdagang PKL

Identitas Responden 4

Nama : Pak Nyoto
 Instansi/bidang : Kepala Satpol PP Kecamatan

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan merupakan menjadi faktor yang berpengaruh karena dilihat dari lokaSi PKL
Biaya Operasional	V		Pengeluaran biaya untuk operasional yang mendukung kegiatan berdagang seharusnya tidak perlu
Respon masyarakat sekitar		V	Kondisi lingkungan dan keamanan yang bisa menarik minat masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Pengaturan jarak antar lapak PKL berdampak pada PKL yang mudah ditata
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Peruntukan lokasi bagi PKL harusnya sesuai dengan pemerintah yang memfasilitasi

Identitas Responden 5

Nama : Pak Eddy
 Instansi/bidang : Pengusaha PKL

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	

Harga lahan		V	Lahan yang digunakan merupakan lahan milik pemerintah jadi tidak mungkin untuk dijual
Biaya Operasional	V		Adanya biaya operasional untuk mendukung kegiatan berdagang
Respon masyarakat sekitar	V		Keamanan kebersihan merupakan daya tarik masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Pengaturan jarak untuk penataan PKL dan batas luas lokasi
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Kebanyakan lahan yang digunakan lahan milik pemerintah dan ruang publik

Identitas Responden 6

Nama : Bu Suning
 Instansi/bidang : Dosen Tata Kota Unipa

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan untuk lokasi PKL dirasa tidak perlu karena kebanyakan PKL sewa lahan
Biaya Operasional	V		Pengeluaran biaya operasional selama menguntungkan PKL
Respon masyarakat sekitar	V		PKL yang bersih dan tertata rapi akan menarik minat masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Pengaturan jarak sangat dianjurkan untuk estetika pedagang itu sendiri
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Banyak lokasi PKL yang berada di pinggir jalan dan mengganggu kenyamanan karena melanggar fungsi ruang

Identitas Responden 7

Nama : Pak Matt
 Instansi/bidang : Ketua paguyuban PKL

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Harga lahan untuk PKL dirasa tidak mempengaruhi karena nilai lahan yang tinggi
Biaya Operasional	V		Selama untuk kepentingan bersama dirasa sah-sah saja
Respon masyarakat sekitar	V		Keunikan barang yang diperdagangkan menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Para pedagang berbagi tempat untuk melangsungkan berjualan
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Sebaiknya pemerintah memberikan tempat yang sesuai dengan peraturan tanpa mengurangi omzet pedagang

Identitas Responden 8

Nama : Pak Iwan
 Instansi/bidang : Tokoh Masyarakat

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Harga lahan		V	Pedagang tidak mungkin untuk membeli lahan apalagi menempati lokasi yang tidak semestinya
Biaya Operasional	V		Sarana dan prasarana untuk aktivitas PKL selama bermanfaat saya mendukung
Respon masyarakat sekitar	V		Tingkat kebersihan dan ketertiban akan menarik masyarakat
Jarak yang digunakan untuk berdagang PKL	V		Pengaturan jarak seharusnya diatur untuk memberi kesan PKL tertata

			rapi
Kesesuaian dengan peruntukan lahan	V		Lokasi pemerintah yang disediakan harus memenuhi tuntutan pedagang.

LAMPIRAN C.4
KUESIONER ANALISIS DELPHI
ITERASI II

Kuisisioner Iterasi II
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penataan PKL di
Kawasan Gelora Sepuluh Nopember

Dengan hormat,

Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap arahan penataan PKL dikawasan Gelora Sepuluh Nopember, Kota Surabaya. jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan menjadi daftar dalam perumusan Arahan Penataan PKL diKawasan Gelora Sepuluh Nopember yang merupakan tujuan dari penelitian ini. Sebelumnya saya sudah menyebar kuesioner yang sejenis, namun terdapat beberapa faktor yang masih belum disepakati oleh beberapa responden. Untuk itu dilakukan penyebaran kuesioner lanjutan untuk menyamakan pendapat para responden.

Maka dengan menggunakan kuesioner ini, diharapkan dapat menemukan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember.

Dengan ini peneliti mengharap kesediaan bapak/ibu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih atas ketersediaan Anda.

Hormat Saya,
 Septian E.W – Mahasiswa PWK ITS
 HP : 087855271779

Petunjuk umum :

Pertanyaan pada kuisisioner ini merupakan substansi yang berkaitan dengan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan geloran Sepuluh Nopember Tambaksari. Cara pengisian

kuisioner ini adalah dengan mengisi pada kolom jawaban yang sesuai dengan pendapat anda

Identitas Responden

Nama :

Intansi/bidang :

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Keterangan

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar			

LAMPIRAN C.5

HASIL WAWANCARA ITERASI DELPHI

TAHAP III

Identitas Responden 1

Nama : Bu Ema
 Instansi/bidang : Staff Dinas PU dan Cipta Karya Surabaya

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Faktor kebersihan lingkungan dan kenyamanan menjadi daya tarik masyarakat

Identitas Responden 2

Nama : Devri Novianto
 Instansi/bidang : Staff bidang ekonomi BAPPEKO

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Dilihat dari kualitas lingkungan dan tidak terjadi kemacetan akan menarik simpati masyarakat

Identitas Responden 3

Nama : Pak Hadi
 Instansi/bidang : Tim teknis lapangan Dinas Koperasi dan UMKM

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Keunikan barang yang dijual pedagang dan kemudahan akses

			menuju lokasi akan membuat masyarakat membeli barang yang diinginkan
--	--	--	--

Identitas Responden 4

Nama : Pak Nyoto
 Instansi/bidang : Kepala Satpol PP Kecamatan

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Tingkat kemacetan berpengaruh terhadap respon masyarakat dilihat juga faktor fisik lingkungan

Identitas Responden 5

Nama : Pak Eddy
 Instansi/bidang : Pengusaha PKL

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Tingkat kebersihan dan mudah dilihat masyarakat lokasinya

Identitas Responden 6

Nama : Bu Suning
 Instansi/bidang : Dosen Tata Kota Unipa

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban	Alasan
----------	---------	--------

	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Aspek visibilitas dan kebersihan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat

Identitas Responden 7

Nama : Pak Matt
 Instansi/bidang : Ketua Paguyuban PKL

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Lingkungan yang bersih dan aman akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli barang

Identitas Responden 8

Nama : Pak Iwan
 Instansi/bidang : Tokoh Masyarakat

1. Menurut anda variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi penataan PKL di Kawasan Gelora Sepuluh Nopember ?

Variabel	Jawaban		Alasan
	S	TS	
Respon masyarakat sekitar	V		Aspek lingkungan yang bersih dan kemudahan lokasi untuk ditempuh merupakan salah satu respon masyarakat

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Surabaya pada tanggal 28 September 1990 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain SDN Ketabang V Surabaya, SMP Negeri 3 Surabaya, SMA Negeri 2 Surabaya, dan terakhir terdaftar di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknolobi Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 2010 dengan NRP 3610100023 melalui jalur Mandiri Gelombang

Pertama. Selama menjadi mahasiswa, penulis secara aktif bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Planologi (HMPL) ITS sebagai Staff Divisi Hubungan Luar masa jabatan 2011-2012 dan sebagai Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Planologi Jawa Timur masa jabatan 2012-2013. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi di luar kampus sebagai Presidium Nasional Sementara Korwil Jatim Bali dan sebagai pengurus cabang Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) sebagai penanggung jawab divisi media dan komunikasi.